

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PATRONASE, KLIENTELISME DAN POLITIK IDENTITAS
DALAM PERHELATAN DEMOKRASI AKAR RUMPUT**

(Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di
Sulawesi dan NTB)



Tim Peneliti

Fathudin, S.HI., S.H., MA.Hum., M.H. (Ketua)
Drs. Abu Tharim, SH., M.Hum (Anggota)
Nur Habibi Ihya, SH., MH. (Anggota)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “Patronase, Klientelisme dan Politik Identitas dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput” (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB) merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “Fathudin”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 September 2020

Peneliti,



Fathudin, S.HI., SH., MA.Hum., MH.

NIP. 19850610 201903 1 007

Mengetahui,

Kepala Pusat
Penelitian dan Penerbitan
(PUSLITPEN) LP2M
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DR. IMAM SUBCHI, MA.
NIP. 19670810 200003 1 001

JAJANG JAHRONI, MA., PhD
NIP. 19670612 19940 3 1006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Fathudin, S.HI., SH., MA.Hum., MH.**
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum
Alamat : Griya Serua Blok F No. 4 Jln. Haji Saal I Kel.
Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok,
Jawa Barat 16523

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian Patronase, Klientelisme dan Politik Identitas dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumpun” (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB) merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 September 2020

Yang Menyatakan,



Fathudin, S.HI., SH., MA.Hum., MH.
NIP. 19850610 201903 1 007

ABSTRAK

Relasi politik klientelistik memiliki akar sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Keberadaanya tidak hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang kerap mewarnai politik pada aras nasional dan daerah, tetapi juga turut mewarnai proses demokrasi pada aras akar rumput (desa). Penelitian ini mengkaji beberapa pola dan bentuk relasi patron-klien dan pemanfaatan jaringan identitas dalam pemilihan kepala desa di enam desa di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan enelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa desa dengan tingkat kemajemukan yang tinggi baik dengan latar belakang etnis, suku maupun agama, pemanfaatan legitimasi elit (tokoh) dan jaringan identitas menjadi strategi pemenangan yang cukup efektif dibandingkan pemanfaatan modalitas finansial. Namun demikian, bentuk-bentuk patronase seperti *money politc* dan *vote buying* dalam pemilihan kepala desa juga masih turut mewarnai perhelatan pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: *Partronase, Klientelisme, Politik Identitas, Pemilihan Kepala Desa*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR BEBAS PLAGIASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kajian Terdahulu dan Signifikansi Penelitian.....	16
E. Rencana Pembahasan.....	21
 BAB II Landasan Teori dan Kajian Literatur	
A. Patronase dan Klientisme dalam Diskursus Teori.....	22
B. Politik Identitas dalam Fenomena Politik.....	29
C. Elit dan Kekuasaan.....	33
D. Teori Kubus Kekuasaan (<i>Powercube</i>).....	37
 BAB III Metodologi Penelitian	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Hipotesis yang Diuji.....	42
C. Lokus Penelitian.....	44
D. Data dan Metode Pengumpulan Data.....	45
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Latar Sosio-Budaya Lokus Penelitian.....	48
1. Kabupaten Bulukumba.....	48
2. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.....	54
B. Legitimasi dan Pemanfaatan Jaringan Elit.....	60
C. Bentuk Patronase dan Klientelisme.....	72
D. Efektifitas Penggunaan Jaringan Identitas.....	76
 BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi diidealkan sebagai sebuah sistem yang dianggap mampu memberikan jaminan bagi keberlangsungan pengawasan rakyat terhadap berbagai urusan publik dengan landasan prinsip kesetaraan. Sebagaimana Schumpeter memberikan definisi demokrasi, demokrasi merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang bagi rakyat untuk dapat menerima dan menolak pemimpin mereka melalui proses pemilu yang kompetitif.¹ Pandangan Schumpeter sering dikenal sebagai pengertian dari demokrasi prosedural yang di dalamnya mengisyaratkan perlunya arena terbuka berdasarkan prinsip kesetaraan di dalam proses seleksi kepemimpinan. Schumpeter juga menambahkan perlunya persaingan yang adil dan terbukanya partisipasi warga negara secara luas untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Bahkan, menurut Huntington partisipasi tersebut dapat saja bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Prinsipnya partisipasi merupakan keterlibatan aktif warga di dalam proses pemilihan untuk pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka.²

Partisipasi dan kontrol merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi, karena standar minimal yang mendasar dalam demokrasi mencakup dua dimensi. *Pertama*, tersedianya ruang persaingan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik. *Kedua*, pada saat yang bersamaan harus tersedia ruang aktivitas yang cukup dengan jaminan yang memadai bagi partisipasi politik semua warga negara. Pada bagian lain, kontrol dan partisipasi politik suatu warga juga dianggap sebagai syarat yang disarankan agar tercipta demokrasi yang sesungguhnya.³ Kedua syarat ini idealnya berlaku tidak hanya pada penerapan demokrasi pada aras dan

¹ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper and Brothers, 1947), h.

² Samuel Huntington dan John M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University, 1977), h. 3

³ Wolfgang Merkel, *Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi*, (Jakarta: FES, 2003), h. 19. Lihat juga Heru Cahyono, “Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 Nomor 2 Desember 2012, h. 354.

spektrum yang lebih luas, tetapi juga berlaku pada aras akar rumput seperti di desa.

Kendati merupakan gagasan yang bersifat universal, demokrasi prosedural dalam penerapannya memiliki ragam varian. Dalam tradisi liberal misalnya, dimana penerapan demokrasi didasarkan pada semangat kebebasan individu (*individualisme*). Oleh karenanya dalam tradisi ini memberikan ukuran penerapan demokrasi salah satunya dengan membuka ruang-ruang partisipasi bagi individu yang seluas-luasnya.⁴ Namun demikian, kendati ruang-ruang partisipasi politik individu terbuka secara luas, tidak menjadikan praktik demokrasi prosedural dalam tradisi liberal luput dari sasaran kritik. Dalam pandangan AE Priyono misalnya menyatakan, demokrasi liberal cukup bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah perkotaan akan kebebasan sipil-politik yang berbasis pada aspirasi-aspirasi individual. Tapi demokrasi tidak bisa hanya memenuhi kebutuhan individual akan kebebasan sipil dan politik. Bagi masyarakat pedesaan yang lebih berwatak komunal (kebersamaan), di mana akses kolektif atas sumberdaya alam lokal menjadi pertaruhan hidup-mati, demokrasi harus menekankan sisi partisipasi kolektif warga. Kepentingan kalangan menengah kota secara sosiologis dan kultural jelas haruslah dibedakan dengan kepentingan kelas masyarakat non-kota di tingkat lokal, khususnya di daerah pedesaan.⁵

Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa praktik demokrasi dalam tradisi liberal sejatinya dianggap telah mereduksi praktik demokrasi itu sendiri. Dalam tradisi liberal, penerapan demokrasi yang dijalankan dalam kerangka pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan sebagai wadah partisipasi publik justru dianggap akan melahirkan oligarki elite.⁶ Oligarki

⁴ Terdapat tujuh macam kriteria tentang demokrasi yang dikemukakan sebagaimana dikemukakan Robert Dahl, antara lain : adanya fungsi legislatif, pemilu berkala yang jujur dan tanpa paksaan, hak memilih, hak dipilih, adanya kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi alternatif dan mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berserikat dalam rangka memberikan ruang partisipasi politik. Lihat Robert A Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy as Control*, (Yale University Press, 1982), h. 10-11

⁵ AE Priyono, "Demokratisasi Desa: Situs Baru Politik Partisipatoris?", h. 4.

⁶ Banyak studi membuktikan takdir pahit ini. Demos (2005) sudah sejak awal memperlihatkan terjadinya pembajakan elit terhadap lembaga-lembaga dan prosedur demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki dan plutokrasi.² Tapi studi lain yang dilakukan Hee- Yeon Cho (2008) melihat bahwa "demokrasi oligarkis" Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi "oligarki demokratis." Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan – sekaligus merebut kekuasaan – melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Jadi,

elit digambarkan Michels sebagai keberadaan segelintir elit yang kerap mengklaim mewakili rakyat banyak, namun padahal merekalah yang telah mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan dengan segala kepentingannya, meskipun seringkali tercerabut dari kepentingan konstituennya.⁷ Berbagai kontradiksi yang lahir dari penerapan demokrasi procedural dalam tradisi liberal dianggap bagian dari kegagalan yang dianggap tidak mampu menjawab tuntas alasan-alasan mengapa mayoritas mendapatkan perlakuan berbeda dengan minoritas.⁸

Kritik terhadap praktik demokrasi liberal tersebut pada akhirnya menjadi latar kelahiran konsep alternatif yang disebut dengan konsep demokrasi komunitarian. Demokrasi komunitarian dianggap sebagai sebuah konsep yang lebih dekat dengan praktik demokrasi yang dipraktikan pada aras desa. Konsep ini dianggap menjadi pilar dari komunitas yang menata diri (*self governing community*), karena memberikan ruang bagi partisipasi publik di level komunitas di dalam urusan publik pemerintahan dan pembangunan. Demokrasi komunitarian mengidealkan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok sosial, forum warga, dan jaringan kelompok yang tidak hanya untuk keperluan bantuan bagi kelompok, tetapi juga menjadi wadah perhatian warga, ikatan sosial dan partisipasi warga dalam pemerintahan di tingkat komunitas atau akar rumput.

Sejarah panjang telah menunjukkan bagaimana demokrasi pada aras desa telah dipraktikan, kendati juga tidak dapat disamakan dengan konsep demokrasi modern yang diterapkan era sekarang. Sebagai entitas masyarakat berpemerintahan (*self-governing community*), desa secara historis mempunyai pengalaman demokrasi komunitarian baik pada aras prosedural maupun pada aras substantif. Mohammad Hatta misalnya, pernah berujar: “Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”. Hatta juga menegaskan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada tradisi demokrasi asli yang berlaku di desa.⁹

bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Lihat AE Priyono, “Demokratisasi Desa: Situs Baru Politik Partisipatoris?”, h. 1.

⁷ Michels, R. *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. *Hearst's International Library Company*, (1915).

⁸ Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia; Sebuah Pencarian Teoritik” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 11 Nomor 1, Juli 2007, h. 3.

⁹ Mohammad Hatta, “Colonial Society and the Ideal of Social Democracy”, dalam *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, ed. Herbert Feith (Ithaca: Cornell University Press, 1970), h. 32.

Secara prosedural, desa mempunyai wadah organisasi semacam “rembug desa”, yang digunakan oleh elemen-elemen desa untuk membuat keputusan bersama melalui proses deliberasi (musyawarah). Sementara itu, secara substantif, desa mengembangkan demokrasi ekonomi yang berbasis pada kesetaraan kelas dan kepemilikan aset secara komunal, kepemimpinan local yang bertanggung jawab dan mengutamakan segi keteladanan, mempunyai seperangkat pranata sosial sebagai aturan main yang menciptakan hubungan sosial secara seimbang dan saling menghormati, serta memiliki tradisi solidaritas sosial dalam bentuk gotong-royong; kendati kalau dilihat dari perspektif kontemporer, demokrasi desa masa lalu kerap dianggap belum merupakan demokrasi yang sempurna, antara lain lantaran kuatnya hubungan patron-klien serta kurang memberi tempat bagi partisipasi warga.¹⁰

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, demokrasi desa dibingkai dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main). Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain.¹¹ Desa dengan segala kearifannya sejatinya telah mewariskan tatanan sistem dan nilai sosial kemasyarakatan yang lekat dengan nilai-nilai universal demokrasi. Kehidupan sosial masyarakat di desa masa lampau telah mengenal dan memberlakukan seperangkat nilai yang sebangun dengan nilai-nilai universal demokrasi. Beragam nilai yang menjadi bagian dari *local wisdom* yang dimiliki desa tersebut sejatinya dapat menjadi modalitas social bagi desa sebagai entitas politik untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang didasarkan pada tradisi-tradisi tata sosial kemasyarakatan.

Di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru, desa semakin termiskinkan. Kekayaan berupa keragaman sistem, lembaga dan tata nilai sosial kemasyarakatan desa di Nusantara tercabik-cabik format penyeragaman desa oleh negara Orde Baru.¹² Dalam kondisi semacam inilah desa-desa di Indonesia sulit mengembangkan diri, meski di dalam dirinya mengalir tradisi-tradisi tata sosial kemasyarakatan yang mencerminkan

¹⁰ Gregorius Sahdan, (ed.). *Transformasi Ekonomi dan Politik Desa*. Yogyakarta: APMD Press, 2005), h. 185-190. Lihat juga Heru Cahyono, “Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 Nomor 2 Desember 2012, h. 357.

¹¹ Lili Romli, *Bunga Rampai Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, 2019), h. iv.

¹² Gambaran tentang Ffenomena desa di bawah tekanan rejim orde baru terdapat dalam beberapa studi yang pernah dilakukan, misalnya dalam buku Mochtar Mas'ood, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1983), buku Yando Zakaria, *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*, (Jakarta: ELSAM, 2000) dan Hans Antlov, 2003, *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka utama, 2003)

prinsip dan nilai demokrasi. Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya pada era Orde Baru melalui UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, semakin mengalami kemunduran. Wadah dan praktik demokrasi itu kemudian benar-benar hilang sama sekali ketika memasuki masa Orde Baru, khususnya setelah dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1979. Demokrasi dalam pilkades hanya tampak di permukaan karena proses pemilihan mengalami pengawalan yang ketat oleh pemerintah supradesa, melalui proses penelitian khusus (litsus) yang ketat sehingga yang lolos hanya calon yang betul-betul dinyatakan “loyal” kepada pemerintah dan terbukti mengabdikan kepada pembangunan dan Golkar. Selain itu, terjadi pergeseran makna pamong desa dari pamong yang populis menjadi perangkat desa yang birokratis dan tidak lagi berakar dan berpihak kepada masyarakat. Pamong menjadi tangan-tangan negara yang membebani dan mengendalikan masyarakat.¹³ Desa kemudian berubah menjadi sekadar kepanjangan tangan negara, dan bukan lagi tempat bagi warga untuk membangun komunitas bersama. Di sini desa tidak lagi *local-self government*, tetapi sekadar sebagai *local-state government*. Kepala desa tidak lagi sebagai “pamong desa”, tetapi berubah menjadi “fungsionaris negara” (aparatur negara) karena tidak lagi menjadi pengayom atau pemimpin masyarakat desa karena lebih banyak menjalankan tugas negara.¹⁴

Era reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Jika sebelumnya desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat, maka menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya. Namun, karena berbagai kelemahan tersebut, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004. Secara mendasar, ada berbagai argumentasi yang melandasi alasan mengapa perlu dilakukan revisi terhadap UU No 22 Tahun 1999. UU Nomor 22 Tahun 1999, dipandang terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI.¹⁵ Kendati masih terdapat kelemahan, setidaknya dalam kedua undang-undang tersebut, ada perubahan tentang desa yang tidak lagi diseragamkan. Selain itu, terdapat pula

¹³ Heru Cahyono, “Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 Nomor 2 Desember 2012, h. 357.

¹⁴ Ari Dwipayana, dan Suroto Eko. (ed.), *Membangun Good Governance di Desa*. (Yogyakarta: IRE Press, 2003)

¹⁵ Pembagian kewenangan yang terlalu mutlak pada daerah telah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat dan propinsi terhadap daerah hilang. Akibatnya, UU ini rentan melahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat. Rakhmat Bowo Suharto, “Otonomi Desa Pasca Reformasi”, h. tp.

pengaturan tentang demokrasi melalui pemilihan kepala desa dan keberadaan Badan Perwakilan Desa. Pada akhir tahun 2014, Desa lalu diatur sendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁶

Penguatan demokrasi pada aras desa (akar rumput) dianggap menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi pada aras nasional. Meminjam kalimat Antlov menyatakan, "... dulu desa adalah objek sentralisasi, depolitisasi, kooptasi, intervensi, dan instruksi dari atas. Sekarang desa [*harus dibayangkan*] menjadi arena demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat".¹⁷ Sayangnya selama ini, khususnya terhitung sejak era reformasi, perhatian publik lebih banyak terfokus pada sistem dan perjalanan demokrasi di level nasional. Sementara penerapan demokrasi di masyarakat akar rumput belum mendapatkan perhatian yang lebih serius baik pada persoalan regulasi maupun perhatian dalam konteks proses realitas politik yang terjadi di akar rumput. Padahal, upaya penguatan demokrasi secara nasional membutuhkan ikhtiar menumbuhkan kesadaran dan pembelajaran demokrasi yang lebih langsung menyentuh pada jantung kehidupan masyarakat di level paling bawah yakni melalui upaya demokratisasi desa.¹⁸ Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 -selanjutnya disebut UU Desa—secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi

¹⁶ Ada perubahan signifikan yang terjadi dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini. Desa memiliki sejumlah kewenangan. Dalam Undang-undang (UU) tersebut dinyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Lili Romli, *Bunga Rampai Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, 2019), h. IV-v

¹⁷ Hans Antlov Seperti dikutip AE Priyono, " Demokratisasi Desa: Situs Baru Politik Partisipatoris?", h. 4.

¹⁸ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 8.

keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.¹⁹

Dalam tradisi yang pernah berkembang dan berjalan di desa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebenarnya memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Secara tradisional, adat istiadat mengatur masyarakat pedesaan Jawa. Menurut adat istiadat penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya jika perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa. Administrasi desa juga memiliki fungsi pelaksana, yaitu melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan oleh wewenang tingkat atas, termasuk pelaksanaan keputusan rapat desa.²⁰ Wewenang paling tinggi di desa adalah rapat desa. Semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa tersebut dan berbicara serta memberikan suara.²¹ Jika dilihat pada lanskap negara, diyakini bahwa pendirian negara ini bermanifestasi pada politik komunalisme dan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengakomodir aspek-aspek komunitarianisme. Oleh karenanya, secara peradaban politik, desa sebagai entitas politik yang secara usia jauh lebih tua kemunculannya dibandingkan kehadiran negara kesatuan Republik Indonesia, menjadikannya sebagai entitas politik yang memiliki kronologi sejarah maupun sosiologi komunal yang mendalam.²²

Seiring berjalannya waktu, berbagai tradisi yang menjadi kekhasan entitas desa telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Desa, sebagai entitas politik mikro yang berbasis pada *self government community* tidak dapat dilepaskan dari dialektika panjang globalisasi dan demokrasi yang semakin liberal dan kapitalistik. Untuk memahami fenomena tersebut, setidaknya ada dua hal yang melatarinya. *Pertama*, menyangkut pola kolonialisme Belanda selama 350 tahun membangun tanah jajahannya dengan doktrin liberalisme-kapitalisme. *Kedua*, pola politik patronase desa yang membentuk relasi pamong desa dan warga sebagai patron-klien bagian dari strategi politik hegemoni kolonialisme. Dalam hal ini, pamong desa melalui *Revenue Constitution* tahun 1814 bertindak sebagai agensi pemerintah kolonial dalam

¹⁹ Naeni Amanulloh, *ibid*, h. 9.

²⁰ Prijono Tjiptoherijanto dan Yumika M Prijono, "Demokrasi dalam Masyarakat Tradisional Jawa" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XII Nomor 4, 1994. H. 396-397.

²¹ *Ibid*, h. 397.

²² Galang Geraldy, "Refleksi Politik Demokrasi Desa: Revitalisasi Demokrasi Komunitarian Desa Dalam Menghadapi Konstelasi Globalisasi" *Proceeding ICSGPSC*, h. 45.

pemungutan pajak tanah dan upeti hasil pertanian lainnya dalam level administratif.²³

Dalam konteks kekinian, kendati keberadaan Undang-Undang tentang Desa memiliki visi penguatan pada tumbuhnya kapasitas lokal demokratis melalui skenario pelibatan warga (*civic-engagement*) pada aras masyarakat desa, namun keberadaan desa tidak luput dari serbuan karena ekspansi modal membuat kapasitas otonomi desa-desa menyusut. Seperti yang diingatkan Joshua Forrest, bahwa gagasan-gagasan lokalisme kewilayahan kini sedang menyusut. Mazhab lokalisme kewilayahan percaya bahwa masyarakat pedesaan mempunyai daya tahan dalam menghadapi apa yang disebut arus “metropolitanisasi” – yakni pertumbuhan wilayah yang terus berlanjut di mana kawasan perdesaan terurbanisasi dengan cepat sejalan dengan kebijakan aglomerasi regional. *Forrest* memperlihatkan gejala-gejala baru di mana selama dua dasawarsa terakhir ini, bahkan di seluruh dunia, potensi masyarakat lokal dalam mempertahankan kontrol atas sumberdaya perekonomian masing-masing, pun juga menyangkut kemampuan mereka untuk membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan lokal justru sedang sangat menurun.²⁴ Adanya perluasan investasi oleh swasta itu, muncul gelombang migrasi yang menyerbu desa-desa dan gelombang yang akhirnya mengikis tradisi komunitarianisme (kebersamaan) lokal dan otentik (asli) desa-desa. Singkatnya spirit lokalisme kewilayahan menjadi melemah. Pelemahan inilah yang menyebabkan menipisnya otonomi dan kapasitas tata-kelola penyelenggaraan kepentingan publik pemerintahan desa.²⁵

Dalam sejarahnya, demokrasi prosedural sudah diperkenalkan oleh bangsa barat sejak dua ratus tahun lalu ketika Indonesia dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811-1816. Pemilihan lurah, atau sekarang dikenal dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) mulai diterapkan ketika Thomas Stanford Raffles, gubernur Jendral Hindia Belanda 1811-1816, mengambil kebijakan untuk merubah sistem politik masyarakat desa. Kepala desa (saat itu dikenal sebagai lurah), yang sebelumnya di angkat oleh pemerintah di atasnya, diubah menjadi dipilih oleh warga masyarakat desa. Kebijakan ini diterapkan untuk mengubah budaya lurah yang cenderung terikat pada penguasa pribumi, serta memperkenalkan model demokrasi barat.²⁶ Kebijakan tersebut

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. (Jakarta: Yayasan TIFA, 2005), h.

²⁴ Joshua B Forrest, (2014). *The Demise of Territorial Localism*, paper prepared for presentation at the 23rd World Congress of Political Science, International Political Science Association, Montréal, Canada, July 22nd.

²⁵ Fatih Gama Abisono Nasution (ed), *Desa; Situs Baru Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2017), h. 9.

²⁶ Hanif Nurcholis, “Dua Ratus Tahun Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Nilai Demokrasi Oleh Bangsa Indonesia”, Proceeding Semnas FISIP-UT 2011, h. 552-572

dinilai tepat, dengan dipilihnya lurah oleh warga desa, maka pengaruh raja mengalami penurunan. Model demokrasi barat tersebut juga telah merubah pola hubungan lurah. Sebelumnya, jabatan lurah bersifat transaksional antara calon lurah dengan raja. Setelah regulasi diterapkan, pola hubungan berubah menjadi hubungan antara calon lurah dengan warga desa.

Saat ini, untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Kendati dilaksanakan dalam bentuk sederhana, pemilihan kepala desa dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik, yang menjadi bagian dari sistem politik pada aras yang lebih tinggi dan kompleks. Desa merupakan representasi sebuah masyarakat demokratis yang juga mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Bahkan, demokrasi desa dianggap sebagai demokrasi “asli” yang dapat dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional. Beberapa fitur penerapan demokrasi di level desa misalnya dapat dilihat dengan adanya ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat desa dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.²⁷ Dalam pandangan Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis sering disebut sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong atau demokrasi ala Indonesia.²⁸

Dalam arena desa, demokrasi dimaknai sebagai upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Melalui penerapan demokrasi, di desa juga berlaku definisi umum kekuasaan, yakni mengidealkan kekuasaan yang berasal dan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat atau warga desa merupakan pemilik sejati kekuasaan di desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terlihat sangat jelas penegasan kedudukan desa dalam kapasitasnya sebagai *self-governing community*-komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang memiliki kekhasan tersendiri.²⁹ Pada konteks ini pula yang menjadi alasan bahwa desa merupakan daerah otonom yang paling tua, karena desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan), sehingga menjadi alasan bagi desa sebagai entitas politik yang mempunyai hak otonomi penuh.³⁰

²⁷ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, ” Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? Studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi jawa barat tahun 2008-2013” Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, h. 236.

²⁸ Koentjoro Poerbopranoto dalam Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Ibid*, h. 237.

²⁹ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, h. 14.

³⁰ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1984), h. 182.

Pilkades sebagai mekanisme dalam proses memilih pemimpin merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang paling menarik karena munculnya berbagai peristiwa yang menyertai-nya, seperti konflik diantara calon dan pemilih, munculnya protes sebagai respon terhadap ketidakpuasan hasil pemungutan suara, politik uang (*money politics*). Dalam praktiknya, proses pemilihan kepala desa juga dimaknai sebagai aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana penerapan demokrasi di level akar rumput berjalan. Dalam pandangan Anthony H. Birch, demokrasi dimaknai sebagai pemberian hak kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam politik, pengambilan keputusan politik yang biasanya dilakukan dengan pemilihan suara langsung.³¹ Namun demikian, praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak serta merta dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye yang dilakukan agar mendapat dukungan suara yang masif dari masyarakat, lebih dari itu juga menyangkut persoalan lain seperti gengsi, harga diri dan kehormatan. Tak heran jika pelaksanaan perhelatan kompetisi pemilihan kepala desa juga kerap menimbulkan konflik di masyarakat.³²

Perhelatan perebutan kekuasaan di akar rumput (desa) juga menggambarkan bagaimana cara-cara mendapatkan kekuasaan itu dimainkan, seperti halnya dalam perhelatan pada aras yang lebih tinggi, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Pada konteks ini maka menjadi menarik untuk diamati bagaimana sumber daya kekuasaan dimanfaatkan oleh para kandidat kepala desa untuk mendulang dukungan dari warganya. Dalam konteks masyarakat desa yang homogen, unjuk kekuatan ekonomi (*material*) sebagai salah satu sumber daya kekuasaan mungkin menjadi salah satu faktor yang signifikan bagi upaya kemenangan seorang kandidat kepala desa, namun dalam masyarakat yang heterogen baik secara etnis maupun agama sumber daya kekuasaan *non material* mungkin memiliki peran signifikan bagi upaya memobilisasi massa pemilih. Hal ini di samping didasarkan pada karakteristik masyarakat desa yang masih memegang nilai-nilai tradisional dalam menentukan pilihannya, juga memungkinkan adanya penggunaan sumber daya kekuasaan *non material* seperti pemanfaatan jaringan etnisitas maupun identitas lainnya seperti agama.

Jeffrey A. Winters berkesimpulan bahwa pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki suatu kuantum kekuasaan mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Menurut Winters terdapat lima sumber daya kekuasaan individual meliputi hak politik formal, jabatan resmi (baik di

³¹ Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Edisi ke-3, (Oxon: Routledge, 2007), h. 109

³² Sadu Wasistiono, *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, (Bandung. Penerbit Mekar Rahayu, 1993)

dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi, (*mobilizational power*), dan kekuasaan material (*material power*).³³ Selama ini, penggunaan sumber daya materi untuk memobilisasi massa pemilih menjadi kecenderungan yang dipilih oleh kandidat pada ajang pemilu di semua level, baik di level daerah maupun nasional. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati misalnya, menyebut adanya penggunaan materi dalam bentuk patronase yang dapat berupa pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya.³⁴ Patronase Klientelisme merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.³⁵

Patronase politik sudah direduksi menjadi dimensi yang dipertahankan sampai Perang Dunia. Sebagai contoh, patronase dalam kegiatan pemerintah. Ketika kandidat partai politik memenangkan pemilihan, pejabat yang baru terpilih memiliki hak untuk menunjuk sejumlah orang menjadi pejabat atau menjadi pegawai baru di pemerintahan. Inilah esensi dari sistem patronase dalam menunjuk orang untuk bekerja dalam institusi pemerintah.³⁶ Fenomena patronase dalam ajang perebutan kekuasaan cukup menggejala dan menjadi strategi mobilisasi pemilih yang tidak hanya berlaku pada pemilihan berskala besar, tetapi juga mulai masuk pada pemilihan di akar rumput. Potret tersebut terlihat dengan maraknya praktik politik uang di setiap ajang pemilihan, mulai dari pemilihan pada aras nasional, wilayah sampai pada aras desa.

Fenomena tersebut sebagaimana disinyalir Edward Aspinall, dalam penelitiannya Aspinall menyebut bahwa praktik politik uang masih mewarnai penyelenggaraan pemilihan umum di sejumlah negara Asia Tenggara. Sebut saja Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umumnya banyak ditemukan praktek politik uang. Penelitian yang dilakukan di empat negara tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak kemiripan pola dalam pelaksanaan politik uang dalam pemilu di negara-negara Asia Tenggara. Misalnya serangan fajar di Indonesia juga dijumpai di Thailand dengan istilah *The night of the barking dogs*. Sementara di Papua Nugini hal tersebut dikenal sebagai malam setan. Konteksnya di Indonesia, ia menemukan pola patronase yang seragam yang biasanya dalam bentuk materi

³³ Jeffrey A. Winters, "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia." *Prisma*, Vol. 33 No. 1 tahun 2014, h. 11-34.

³⁴ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, "*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov 2015), h. 4-5.

³⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *ibid*.

³⁶ Lesmana Rian Andhika, "The Dangers Of Patronage And Clientelism In Simultaneous Villages Chief Elections" *Jurnal Kajian* Vol. 22 No. 3 September 2017 h.

yang dibagikan untuk mendapatkan manfaat politik, seperti bentuk serangan fajar yang dilancarkan oleh tim sukses.³⁷

Dalam pandangan Aspinall patronase dan klientelisme dianggap sebagai akar merebaknya *money politics* di negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan patronase klientelisme dinilai sebagai produk sosial budaya dimana kelompok tertentu dan yang mempunyai keistimewaan memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan loyalitas pengikutnya.³⁸ Patronase menggambarkan adanya suatu hubungan yang terpersonifikasi didasarkan pada loyalitas bersyarat dan transaksi manfaat timbal balik. Jika patronase lebih menggambarkan praktik transaksional yang bersifat materi, klientelisme lebih merujuk pada pola relasi antara kandidat dengan para elit politik, pemilih atau pendukung. Dalam klientelisme yang diandalkan adalah ikatan sosial.³⁹ Ikatan social ini biasanya berbasis pada jaringan etnisitas, kesukuan bahkan agama

Perebutan kekuasaan pada aras desa, pola hubungan ini dapat saja terjadi namun dalam praktiknya juga tidak sepenuhnya berakar pada sumber daya materi, mengingat legitimasi kekuasaan di aras desa dapat berasal dari sumber daya yang lainnya, karena karakteristik masyarakat desa yang masih cenderung memegang teguh nilai-nilai tradisional. Seperti di Jawa misalnya, Anderson menilai bahwa khasanah kebudayaan masyarakat Jawa masih identik dengan energi mistis “kesakten”, sehingga pada konteks ini Anderson menganggap adanya perbedaan antara konsep kekuasaan dalam khasanah Jawa dengan konsep kekuasaan dalam perspektif ilmu politik Barat.⁴⁰ Dalam perspektif antropologi kepemimpinan memang tidak hanya dimaknai sebagai kedudukan social, tetapi juga proses sosial, karena kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang mendorong gerak warga masyarakat.⁴¹ Pada konteks ini, maka kepemimpinan selalu lekat dengan tiga hal penting yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan.

Hubungan antara budaya dan kepemimpinan sangat dekat dan keduanya saling membutuhkan. Clifford Geertz misalnya, menyebut bahwa sumbangan antropologi terhadap politik yang lebih menitikberatkan masyarakat petani, tradisi, yang memiliki ambisi-ambisi kenegaraan memang

³⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, “*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*

³⁸ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), h. 329.

³⁹ Edward Aspinall & Ward Berenschot, *Democracy For Sale*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 35.

⁴⁰ Ramlan Surbakti, (*Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010), h. 102.

⁴¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 181

benar adanya.⁴² Ambisi tradisional Jawa misalnya, kini telah berkembang ke jagad kepemimpinan modern. Ambisi saling menguasai yang lain, dengan cara tradisi dan terang-terangan telah bercampur baur. Maka tidak mengherankan jika dasar pemikiran kekuasaan Jawa, selalu terkait dengan pimpinan, baik tradisional maupun modern. Kekuasaan itu lekat pada sang pemimpin. Kekuasaan akan menyebabkan sang pemimpin memiliki kewibawaan. Pimpinan dikelilingi oleh persoalan budaya kekuasaan Jawa yang rumit.⁴³ Lebih jauh Koentjaraningrat menyebut, unsur budaya merupakan variabel terpenting dan paling utama guna memahami perkembangan politik suatu bangsa karena budaya politik suatu bangsa atau masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau bangsa tersebut.⁴⁴

Mobilisasi pemilih dalam ajang perebutan kekuasaan dapat dilakukan dengan beragam strategi, termasuk pada aras akar rumput (desa). Di beberapa desa yang mencerminkan realitas kemajemukan multietnis misalnya, pemanfaatan jaringan etnisitas maupun basis identitas lainnya seperti agama mungkin menjadi salah satu strategi yang dimainkan dalam upaya pemenangan. Secara operasional, politik identitas etnis adalah konsep kunci dalam arena politik yang memanfaatkan penggolongan manusia berdasarkan perbedaan yang disebabkan oleh ketimpangan atau ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kekuasaan, wilayah, peluang kerja.⁴⁵ Di sebagian masyarakat pedesaan yang lebih bersifat homogen, sensitifitas terhadap isu-isu mengenai identitas sosial masih cukup tinggi. Misalnya, etnis Tionghoa di Indonesia, melalui kekuatan finansial dan ekonomi, keberadaan mereka dianggap sangat penting. Minoritas dalam jumlah ditutupi oleh mayoritas dalam penguasaan aset ekonomi. Di lain pihak, dalam konteks Lampung, misalnya isu tentang etnis Jawa dan Lampung. Biasanya selalu disandingkan menjadi pasangan calon guna meraih simpati pemilih.

Etnis kerap dijadikan sebagai komoditas politik dalam upaya menyamakan persepsi anggota etnis yang seragam. Pemanfaatan jaringan etnisitas mungkin saja dipakai pada ajang pemilihan kepala desa, karena

⁴² Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 168-169.

⁴³ Suwardi Endraswara, *Falsafah Kepemimpinan Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2013), h. 9.

⁴⁴ Koentjaraningra dalam Ahmad Setiawan, *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 54-57.

⁴⁵ Dalam pandangan Agnes Heller, merupakan konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Karena ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*Free play*), meskipun di balik itu bahaya munculnya pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Lihat Agnes Heller dalam Ubed Abdilah S, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. (Magelang: Indonesiatara, 2002). h.16

dianggap akan berdampak pada pilihan dan perilaku politik warga desa yang dilatar belakangi oleh faktor identitas etnis. Fenomena ini tampak kentara jika dilihat pada masyarakat dengan realitas kemajemukan yang tinggi. Sebagai salah satu identitas masyarakat, identitas etnis juga mengandung unsur-unsur dan nilai ideologis. Jika isu identitas etnis dibalut dengan nilai ideologis, maka memungkinkan untuk dimanfaatkan para kontestan dalam upaya mendulang suara dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Mobilisasi massa pemilih dengan mendasarkan pada kesamaan etnis dan identitas lainnya seperti agama biasanya dilakukan dalam rangka membangun kesadaran kolektif atas dasar persamaan identitas, dan pada akhirnya melahirkan solidaritas kelompok. Kemampuan membangun solidaritas kelompok inilah yang akan menjadi instrument untuk memobilisasi pendukung.

Politik identitas baik berbasis etnis maupun agama sama-sama kerap dijadikan sebagai instrumen untuk mengaktivasi dan mengefektifkan kekuatan psiko-kultural etnisitas dalam memobilisasi massa pemilih pada setiap kontestasi politik. Langkah-langkah mobilisasi tersebut biasanya dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran warganya secara kognitif tentang relevansi politik terhadap kesejahteraan etnis dan identitas kelompoknya. Pada tahap selanjutnya dilakukan dengan melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas politik yang didasarkan kepada kesadaran, perhatian dan rasa memiliki terhadap kelompok tersebut.⁴⁶ Jika hal ini dimainkan sebagai salah satu strategi, maka akan memiliki peluang yang signifikan. Modalitas sosial dan budaya dalam arena politik lokal masih memiliki signifikansi untuk membangun dominasi kekuatan politik para aktor politik. Kontestasi biasanya akan dimenangkan oleh mereka yang mampu akumulasi berbagai modalitas tersebut.

Kajian yang memotret bagaimana pola hubungan yang terjadi antara kandidat dan calon pemilih dalam bingkai hubungan patron-klien memang telah banyak dilakukan, hanya saja kajian yang ada lebih banyak memotret pada aras yang lebih tinggi dan luas yakni dalam konteks pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum. Kajian terhadap realitas proses perhelatan demokrasi di level akar rumput belum banyak dilakukan. Padahal, penelitian tentang patronase, klientilisme dan politik identitas di level akar rumput memungkinkan untuk memberikan banyak sumbangan pemikiran, khususnya untuk memahami budaya dan masyarakat lokal di Indonesia, serta bagaimana dinamika politiknya. Secara praktis, kajian ini juga dapat memberikan banyak pemahaman mengenai proses dan karakteristik politik pada tataran masyarakat desa.

⁴⁶ Hasbullah, "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Symbol Agama dan Etnis dalam Pilkada," Jurnal Ushuluddin, Volume 17, No. 2 Tahun 2011, h. 11

Kajian-kajian mengenai politik pedesaan khususnya pasca Undang-Undang Desa merupakan studi yang cukup menarik mengingat karakternya yang berbeda satu sama lain. Bentuk-bentuk patronase-klientelisme di aras desa dapat juga dapat terlihat misalnya dalam bentuk memanfaatkan realisasi anggaran dana desa sebagai *pork barrel* untuk kepentingan politik jaringan etnisitasnya. Jika aktivitas politik memilih pada pemilihan umum di kabupaten, kota, provinsi, hingga presiden disinyalir oleh beberapa ilmuwan lebih banyak didominasi oleh penggunaan materi untuk menarik massa pemilih, maka pada konteks masyarakat desa penting dilakukan sebuah penelitian untuk melacak sumber daya kekuasaan yang digunakan oleh para calon kepala desa, bagaimana pola-pola relasi yang dibangun di antara pemilih dan para kandidat. Upaya memotret realitas ini penting dilakukan khususnya di masyarakat desa yang memiliki kemajemukan tinggi mulai dari suku, etnis maupun agama.⁴⁷ Selain itu, karakteristik masyarakat desa dengan segenap nilai, budaya dan adat yang menyelimutinya juga tidak boleh diabaikan. Karena, pemilihan kepala desa juga sarat dengan penggunaan *local values* sebagai acuannya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada seputar kajian terhadap proses pemilihan kepala desa yang difokuskan pada upaya memotret pola-pola patronase, klientelisme dan pemanfaatan jaringan identitas (etnisitas dan agama) pada masyarakat desa yang memiliki realitas kemajemukan yang tinggi. Terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pola hubungan patron-klien berbasis identitas kelompok (etnis dan agama) dimainkan dalam upaya pemenangan kandidat calon kepala desa?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya pemenangan pada perhelatan pemilihan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hendak melacak bagaimana pola-pola patronase, klientelisme dan pemanfaatan jaringan etnisitas maupun identitas dimainkan dalam upaya pemenangan kandidat calon kepala desa pada perhelatan pemilihan kepala desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya pemenangan pada

⁴⁷ Endik Hidayat, Budi Prasetyo dan Setya Yuwana, "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri" Jurnal Jurnal Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018, h. 55-56.

perhelatan pemilihan kepala desa. Penelitian akan dilakukan di desa-desa yang dianggap memiliki karakteristik sosio-kultur dengan tingkat kemajemukan tinggi khususnya seperti di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan di Bulukumba Sulawesi Selatan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian yang telah dilakukan tentang pola patronase dan klientelisme memang lebih banyak dilakukan dalam konteks kajian terhadap proses pemilihan di level yang lebih besar seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilu presiden. Beberapa penelitian tersebut misalnya terlihat pada sejumlah penelitian yang pernah dilakukan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmaja di sejumlah wilayah sebagai berikut: di Kabupaten Bener Meriah, praktik patronase di wilayah ini dapat dijelaskan bagaimana politik sukuisme menjadi salah satu strategi yang membuka peluang besar bagi perolehan suara bagi kandidat, patronase ini muncul baik pada kandidat baru maupun kandidat petahana.⁴⁸ Masyarakat beralasan bahwa suara mereka layak dihargai mahal biasanya muncul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat dengan para kandidat.⁴⁹ Hal serupa juga terjadi di kota Medan dimana patronase dilakukan oleh para kandidat petahana maupun calon kandidat baru bahkan sejak lama sebelum pemilihan. Pratiknya dilakukan dengan cara turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial etnis, dan donatur untuk yayasan etnis tertentu.⁵⁰ Di Bangka Belitung, juga terpotret bagaimana pola yang serupa juga terjadi, dimana patronase diubah menjadi praktik pemberian yang berbentuk barang.⁵¹

Di samping kajian seputar pola patronase, kajian tentang klientelisme juga pernah dilakukan diantaranya penelitian yang pernah dilakukan di kota Palembang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dana aspirasi dari petahana kerap kali dijadikan modus untuk membangun relasi klientelisme dengan berbagai proyek, dan bantuan usaha.⁵² Sementara di Jawa Timur terungkap bahwa praktik klientelisme yang luas ternyata tidak juga menjadi jaminan bagi kemungkinan perolehan suara secara signifikan dari pemilih, klientelisme ini bahkan harus diikat dengan patronase.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa spektrum dalam mengkaji potret patronase dan klientelisme sering digunakan dalam level yang lebih

⁴⁸ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja (Eds), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), h. 73-402.

⁴⁹ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja, *Ibid*, Bagian III, h. 73-99

⁵⁰ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja, *Ibid*, Bagian IV, h. 100-125

⁵¹ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja, *Ibid*, Bagian V, h. 126-146

⁵² Edward Aspinall dan Mada Sukmaja, *Ibid*, Bagian VII, h. 174-199

⁵³ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja, *Ibid*, Bagian XV, h. 380-402

luas. Hal demikian didasarkan pada ketentuan regulasi di Indonesia yang relatif baru dalam memandang eksistensi desa sebagai *self local governance*, sehingga pada akhirnya melahirkan politik hukum desa yang baru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendati demikian, setidaknya tercatat beberapa kajian yang mencoba memberikan konseptual secara intensif dan evaluatif terhadap pola relasi dari demokrasi akar sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti penelitian yang dilakukan Alamsyah dalam mengamati potret pemilihan kepala desa pada masa transisi menuju otonomi daerah yang dilakukan di beberapa wilayah. Lebih lanjut, hasil kajian tersebut memberikan potret pola interaksi antara calon kepala desa dengan para pemilih yang lebih banyak dipengaruhi oleh gambaran politik calon kepala Desa, evaluasi retrospektif di tingkat pemilih, dan media komunikasi yang digunakan.⁵⁴ Sementara penelitian yang lainnya lebih berfokus pada aspek performa kapasitas para calon kepala Desa.⁵⁵

Sedangkan di level internasional, terdapat sejumlah kajian yang menggambarkan bagaimana proses demokrasi diterapkan di akar rumput (desa). Beberapa kajian tersebut terpotret dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan seperti di negara Pakistan dan China. Di Pakistan, upaya untuk menarik simpati para pemilih calon kepala desa dilakukan dengan menciptakan citra popularitas yang baik di tengah-tengah masyarakat.⁵⁶ Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa barang dengan latar keagamaan. Berbeda dengan di Pakistan, di China beberapa strategi yang dilakukan oleh kandidat kepala desa biasanya dilakukan dengan menjadi bagian dari konstituen rezim penguasa. Selain itu *voter buying* (pembelian suara) juga dilakukan kendati tidak pada pemilihan dalam skala besar.⁵⁷

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa kajian sosial politik dilakukan oleh berbagai peneliti, untuk mencoba lebih mempotret konstelasi demokrasi akar rumput. Diantaranya seperti yang dilakukan Endik Hidayat dkk, dalam mengamati Pemilihan Kepala Desa Tanjuk, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Melalui penelitian tersebut, diuraikan bahwa terdapat jaringan patronase di antara pejabat pemerintahan, pengusaha lokal, dan aparat keamanan. Integrasi oligarki desa

⁵⁴ Alamsyah, "Dinamika Politik Pilkades di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Taman Praja*, No.1/Vol.1.2011, hlm. 1-15.

⁵⁵ Jawandri, "Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Naga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No.1/Vol.1.2013, hlm. 235– 247.

⁵⁶ M. Rashiduzzaman, "Election on Politics in Pakistan Villages," *Journal of Commonwealth Political Studies*, Vol.4/ Issue.3. 2008, h. 191-200

⁵⁷ Pierre F. Landry, et al., "Election in Rural China: Competition Without Parties," *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol. 43/ Issue.6.2010, h. 763-790.

tersebut memiliki keterkaitannya dengan struktur kekuasaan negara dan non-negara. Oleh Karena itu, pada kontestasi inilah kemudian berbagai elemen kekuatan sosial, ekonomi, dan politik terlihat lebih tegas berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa Tanjung. Lebih dari itu, Pilkades di Desa Tanjung menunjukkan bahwa semakin banyak sumber kekuasaan non-material digunakan oleh calon kepala desa memberikan peluang terpilih seorang calon juga semakin besar. Sebaliknya, banyaknya sumber daya ekonomi dan politik tidak menjamin berta- hannya kekuasaan di tingkat desa.⁵⁸

Selain itu, penelitian terhadap konstelasi akar rumput juga dilakukan oleh La Ode Muhammad Elwan di Desa Botomatinggi, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara deskriptif, melalui penelitian tersebut, diuraikan mengenai model-model mobilisasi dan implikasinya pasca kontestasi pemilihan kepala desa. Dalam menjelaskan dikotomi model-model mobilisasi, setidaknya terdapat mobilisasi secara terbuka dan tertutup. Dalam praktiknya terlihat bahwa masyarakat desa merasa terdampak akibat ketajaman efek demokrasi. Sebab tidak jarang upaya mobilisasi baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup digunakan oleh aktor dan mesin politik secara tidak sehat, seperti masih adanya penggunaan *black campaign*, diskriminasi hingga *money politik*. Lebih lanjut, persaingan yang tajam tersebut memaksa calon/kandidat kepala desa untuk melakukan berbagai dorongan dalam mencari dukungan dan posisi pemilih yang memang sudah berada pada berbagai tekanan mobilisasi sehingga pemilih/warga desa dihadapkan secara dilematis akibat pola mobilisasi yang dilakukan oleh berbagai kandidat, yang pada akhirnya berefek pasca penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Hal demikian tergambar dari tidak sedikit warga desa yang memutuskan untuk kemudian pindah ke desa tetangga, setelah pemilihan. Kondisi tersebut disinyalir karena konstelasi sosial masyarakat yang semula berkerabat justru beralih kepada kondisi pada hubungan keluarga yang tidak terjalin dengan baik, akibat perbedaan pilihan politik.⁵⁹

Secara spesifik, penelitian lainnya yang mempotret relasi patronase dan klientelisme di tingkat desa juga sudah mulai dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Lesmana Rian Andhika di dalam mempotret penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2017. Yang dilakukan melalui 3 (tiga) gelombang selama kurun waktu 6 (enam) tahun di

⁵⁸ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuwana, "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri", *Jurnal Politik*, Vol 4, No. 1, Agustus 2018, h.53-84.

⁵⁹ La Ode Muhammad Elwan, "Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016)", *Jurnal Publicuho*, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Halu Oleo, Volume.1 No.4, Januari 2019, h. 1-17.

24 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan “Dana Desa” memberikan daya tarik kepada siapapun untuk dapat mencalonkan diri dengan berbagai cara strategi kemenangan. Kondisi tersebut menjadikan faktor suburnya praktik Patronase, klientelisme, *vote buying*, sebab hal tersebut dibalut dengan beberapa cara/strategi kemenangan untuk dapat memobilisasi pemilih dengan tujuan meraih kemenangan. Lebih lanjut, cara/strategi kemenangan itu layaknya memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Bahkan Strategi kemenangan demikian disinyalir akan memperburuk demokrasi di tingkat lokal.⁶⁰

Penelitian yang serupa juga dapat ditemukan melalui tulisan Devy Dhian Cahyati dan Yonatan Hans Lutter dalam mengamati manuver petahana kepala desa Klangor, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada pemilihan kepala desa 2018. Secara aktual, penelitian tersebut memberikan paradigma yang berbeda mengenai konstelasi patronase dan klientelisme yang dilakukan pada skala politik nasional maupun kabupaten/kota dengan apa yang terjadi di tingkat desa. Para penulis berpendapat bahwa petahana tidak hanya menciptakan jaringan patronase selama kontestasi pemilihan kepala desa, di mana petahana memberikan uang atau hadiah lainnya kepada para pemilih. Melainkan hal yang dilakukan adalah bahwa kandidat/petahan menciptakan jaringan patronase selama aktivitas sehari-hari. Menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia baginya, petahana menggabungkan tiga pendekatan patronase: politik kebajikan, taktik menakut-nakuti, dan politik uang. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa petahana mendefinisikan kembali politik uang, dengan mengubahnya dari alat melakukan transaksi menjadi alat untuk menghargai dan memberi penghargaan kepada pemilih. Dengan menggunakan strategi ini, petahana dapat menjamin loyalitas pendukung dan menerima suara mereka.⁶¹

Potret lainnya, yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan mencoba melihat eksistensi dan konstelasi Patronase dan Klientelisme, juga dapat diamati dari penelitian Abdul Chalik, melalui karyanya yang berjudul *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Penelitian ini secara komparatif mencoba melihat lokus yang berbeda yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mempotret keterlibatan elite politik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Jatim tahun 2015 dan Pemilihan Kepala Desa. Lebih mendetail, keterlibatan elite politik lokal yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan kepala desa terfokus pada tiga aspek,

⁶⁰ Lesmana Rian Andhika, “Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak”, *Jurnal Kajian*, Vol.22 No.3 September 2017, h.205-219.

⁶¹ Devy Dian Cahyati dan Yonatan Hans Lutter Lopo, “Daily Patronage Politics: A Village Chief’s Route to Power”, *PCD Journal* Vol.VII, No.2, Tahun 2019, h.169-196.

yaitu, (1) keterhubungan elite politik lokal dengan kekuatan politik dan mesin politik selama Pilkada dan Pilkadaes, (2) arsitektur elite politik lokal dengan kekuatan politik, (3) dinamika turbulensi elite politik lokal dalam ruang kekuasaan.⁶²

Melalui penelitiannya tersebut, tergambar bahwa peran kekuatan sosial politik banyak dimainkan oleh kelompok kiai, santri dan Ormas pemuda yang berbasis keagamaan. Keterlibatan mereka pada ruang tertutup mengandaikan adanya pemutarbalikan dengan pergeseran peran dari orientasi politik kultural (*cultural broker*) ke politik praktis. Peran mereka jauh lebih tampak dibandingkan dengan organ politik resmi (partai politik) sebagai partai pengusung. Hal tersebut terlihat jelas di Situbondo, Gresik dan Sumenep. Tidak ada satu titik pun persoalan politik strategis tanpa melibatkan elite politik yang berbasis agama, terutama kiai pesantren, kiai langgar, santri senior dan alumni yang sudah memiliki jaringan kuat (*local strongman*).⁶³

Sementara pada kasus Pilkadaes setidaknya juga dapat dikatakan relatif memiliki persamaan. Kondisi yang mungkin sedikit membedakan adalah peran Blater (preman atau bajingan) dan pemuda justru lebih kuat dibandingkan dengan peran kiai dan santri. Namun tidak sedikit ditemukan para Blater juga berlatar belakang santri dan memiliki kedekatan kultural dan emosional dengan kiai-kiai berpengaruh. Beberapa Blater di Madura dan Pendalungan justru bekerja sama dengan kiai dengan menjadi kaki tangan mereka untuk kepentingan mobilisasi massa.⁶⁴

Untuk melengkapi beberapa kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti di atas, maka penelitian tentang pola patronase, klientelisme dan politik identitas yang didasarkan pemanfaatan jaringan etnisitas dan agama memiliki signifikansinya, khususnya pada masyarakat desa dengan latar sosio-kultur yang heterogen baik dari segi suku, etnis maupun agama. Secara konseptual penelitian ini memiliki sisi kebaharuan dari bagaimana jaringan organik tim pemenangan salah seorang kandidat kepala desa terbentuk atas dasar latar belakang suku, etnis dan agama, yang relatif masih secara minim dikaji oleh berbagai penelitian, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, secara sosial-kultur penggunaan etnisitas, suku dan agama dalam konstelasi akar rumput dimungkinkan akan terjadi dan disinyalir akan bersentuhan dengan mesin politik lainnya, seperti sumber daya material/finansial (ekonomi). Setidaknya pola-pola seperti ini dapat dijumpai di beberapa wilayah yang kondisi sosio kultur masyarakatnya heterogen misalnya seperti di Mataram

⁶² Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.10-322

⁶³ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik lokal* Ibid, h. 291

⁶⁴ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik lokal* Ibid.

Nusa Tenggara Barat dan di Bulukumba Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa kajian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa belum ada penelitian yang fokus pada upaya untuk memotret pola relasi patron-klien berbasis identitas (etnis dan agama) dalam perhelatan demokrasi di level desa khususnya di desa-desa dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Penelitian ini hendak melihat praktik patronase-klientelisme di tingkat pedesaan. Jika studi yang dilakukan oleh Jeffrey Winters berkesimpulan bahwa pemanfaatan sumber daya material masih dominan dalam perhelatan politik nasional dan politik lokal (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia, penelitian ini akan melihat bahwa kendati sumber kekuasaan material masih terdapat di dalam pemilihan kepala desa, namun penggunaan sumber-sumber kekuasaan non-material seperti pemanfaatan jaringan etnisitas dan identitas kelompok masyarakat juga masih memainkan peranan yang cukup signifikan. Selain itu dengan ragam karakteristik yang melekat di masing-masing desa, menjadikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat juga dapat disebut sebagai salah faktor yang tidak dapat dinegasikan.

E. Rencana Pembahasan

Bab *Pertama*, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan metode dan teknik pengumpulan data. Bab *Kedua*, akan dikaji tentang desa dan demokratisasi desa, meliputi pembahasan tentang desa pasca undang-undang desa, fitur-fitur demokratisasi desa, mekanisme pemilihan pemilihan kepala desa. Bab *Ketiga*, akan dibahas tentang relasi pemilih dan elit politik, meliputi pembahasan tentang patronase dan klientelisme, politik identitas dalam pemilu, relasi sosial dan multikulturalisme. Bab *Keempat*, potret sosio kultur lokus penelitian, Pola Patronase dan Klientelisme Berbasis Etnis dan Agama, meliputi pembahasan tentang pola-pola tersebut di wilayah-wilayah yang menjadi lokus penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Latar Historis Patronase dan Klientisme

Studi tentang klientelisme politik sebenarnya telah berlangsung dalam dua gelombang utama. Dalam gelombang pertama selama tahun 1960-1970-an, para intelektual perintis, kebanyakan di antara mereka adalah kaum antropolog yang kebanyakan bekerja di negara-negara agraris di Asia Tenggara, Amerika Latin dan Eropa Selatan, mengamati bagaimana relasi patron-klien yang telah menjadi ciri khas relasi antara para tuan tanah dan petani penggarapnya dalam masyarakat-masyarakat seperti ini telah meluas masuk ke dalam ranah politik. Selama masa-masa sulit atau peristiwa-peristiwa besar dalam hidup mereka, para petani-penggarap itu seringkali bisa kembali meminta bantuan pada para tuan tanah yang biasanya mengeksploitasi mereka. Sekarang mereka mengalihkan loyalitas itu ke dalam kancah politik formal kepada para tuan tanah yang sama atau pada orang-orang kepercayaan para tuan tanah itu, atau kepada birokrat muda, kaum profesional, dan para pemimpin partai yang menggeser posisi para tuan tanah.⁶⁵

Adalah James Scott, peneliti yang banyak menyajikan model tentang bagaimana interaksi antara pemilih dan politisi terbentuk sebagai potret bagaimana relasi antara para tuan tanah dan petani-penggarap di banyak negara di Asia Tenggara. Menurut Scott, di seluruh wilayah ini para petani-penggarap menyediakan jasa dan tenaga bagi para tuan tanah dimana mereka mengabdikan, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan ketika mereka menghadapi kesulitan hidup. Dengan memautkan diri mereka ke dalam relasi pertukaran semacam ini, para klien berusaha memperoleh jaminan keamanan dalam lingkungan kehidupan yang keras dan tidak tentu. Ketika pemilihan umum dilakukan dan memasuki kehidupan mereka di kampung, para klien itu memperoleh sebuah sumber daya politik yang baru, karena hanya dengan memberikan atau menahan suaranya mereka telah berpengaruh bagi nasib sang calon untuk kedudukan yang dikejarinya.⁶⁶ Dalam pandangan Aspinall, para politiksi dan partai-partai politik beradaptasi dengan pola-pola relasi yang usianya ratusan tahun tersebut, meskipun perluasan pengaruh negara colonial dan pasca-kolonial seringkali telah menggerogoti kewajiban timbal balik antara para tuan tanah dan petani-penggarapnya.⁶⁷

⁶⁵ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale; Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2019), h. 30-31.

⁶⁶ James C Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", *The Journal of Asian Studies* Vol. 32, No. 1 (November, 1972). Lihat juga James C Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (March 1972)

⁶⁷ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale; Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, h. 30-31.

Aspinall juga menyebut bahwa relasi politik klintelistik memiliki akar sejarah yang cukup dalam di dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut terpotret misalnya pada masa pra colonial. Masyarakat pra-kolonial mendasarkan hidupnya dengan bergantung pada gaya pemerintahan yang personalistik. Majapahit, Mataram dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya dibangun di atas hubungan yang pada umumnya tidak tersistem tetapi hubungan patron-klien antara yang memerintah dan taklukan dipersubur oleh suatu rasa yang akan kewajiban timbal balik. Meski demikian, hal ini bukanlah hal yang aneh sebagaimana ditunjukkan Mungiu-Pippidi (2015) dan Fukuyama (2011), pertukaran manfaat yang terpersonalisasi telah menjadi bentuk organisasi social yang dominan di seluruh sejarah kehidupan manusia.⁶⁸ Kendati memiliki akar sejarah yang kuat, namun kepustakaan tentang bentuk-bentuk klientelisme di Indonesia masih relatif sedikit, padahal berbagai istilah patronase, klientelisme dan patrimonialisme kerap kali muncul dalam diskursus tentang politik Indonesia. Relasi pertukaran klientelistik juga kerap kali dipersalahkan karena dianggap sebagai penyebab berbagai masalah, mulai dari soal lemahnya partai politik, lemahnya layanan public, konflik antar etnik, dan dominasi politik oleh para elit ekonomi.⁶⁹

Penggunaan patronase dan klientelisme relatif sering kali dipertukarkan bahkan disamakan, tanpa melihat dimensi di antara keduanya. Di antara ahli yang menggabungkan terminologi tersebut adalah Carl H. Lande yang kemudian mengungkapkan bahwa:⁷⁰

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.

Dalam perkembangannya, kedua terminologi tersebut dapat dipandang secara terpisah kendati tetap bertalian satu sama lainnya. Pandangan demikian diungkapkan oleh Alex Weingrod yang menggarisbawahi bahwa penggunaan istilah klientelisme mulai mengemuka ketika beberapa ilmuwan politik mencoba menjelaskan sebuah pola baru patronase yang lebih menonjolkan peran sosok partai politik dibandingkan sosok orang kuat (*strong man*) hingga dapat memobilisasi masa. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan istilah *clientele* atau *political party directed patronage*.⁷¹

Istilah *patron* berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan

⁶⁸ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *ibid*, h. 31.

⁶⁹ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Ibid*, h. 29-30.

⁷⁰ Carl H. Lande, 'Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' dalam *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. xx.

⁷¹ Hasrul Hanif, Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 12. No.3. 2009. H.328. lihat Alex Weingrod, Patrons, Patronage and Political Party, Comparative Study in Social and History, Vol.10 No.4 (Juli-1968) h.377-400.

pengaruh.⁷² Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.⁷³ Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).⁷⁴

Patronase juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah).⁷⁵ Namun, tidak setiap praktek patronase juga bersifat klientelistik. Kandidat yang memberikan sumber daya baik berupa barang maupun jasa kepada pemilih yang tidak pernah ditemui oleh sang kandidat atau tidak akan ditemui lagi tidak dapat dipahami sebagai klientelisme. Sebab, karakter lain yang melekat pada relasi klientelistik adalah adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*). Dengan demikian, dalam sebuah relasi, elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang patron dalam pemilu.⁷⁶

Istilah klientelisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya adalah “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “*clientela*” dan “*patronus*”. Wolfgang Muno mendefinisikan “*Clientela*” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clientela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”.⁷⁷ Susan C. Stokes mendefinisikan

⁷² Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004), Cetakan Pertama, hlm. 132

⁷³ Martin Shefter, *Political Parties and the State : The American Historical Experience*. Princeton University Press: (Princeton:1994) h.

⁷⁴ Lutfi Wahyudi, Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, *Jurnal Paradigma*, Vol.7 No.3 Desember 2018. H.158.

⁷⁵ Wolfgang Muno dalam Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2 No.1 Tahun 2017. H. 35.

⁷⁶ Aspinall & Sukmajati, 2016 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, “*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov 2015), h.

⁷⁷ Wolfgang Muno dalam Rekha Adji Pratama, *Ibid*.

klientelisme sebagai metode untuk memobilisasi elektoral. Menurutnya klientisme adalah:⁷⁸

Focusing on clientelism as a methode of electoral mobilization, I define it as the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me.

Definisi lain diungkapkan oleh Luis Roniger yang memaknai klientelisme dengan mengatakan:⁷⁹

Clientelism involves asymmetric but mutually beneficial relationship of power and exchange, a nonuniversalistic quid pro quo between individuals or groups of enequal socioeconomic or political standing.

Definisi yang mirip dengan Stokes Roniger juga diungkapkan oleh ilmuwan lainnya seperti Nicolas Vd Walle, dengan mengatakan klientelisme sebagai:⁸⁰

The selective distribution of good and service by politicians to favored constituties in exchange for their political loyalty.

Konsep klientelisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda dengan patronase (*patronage*). Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Sedangkan Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality* dan resiprokal.⁸¹ Lebih dari itu, klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian

⁷⁸ Susan C. Stokes, Political Clientelism, dalam Carles Boix dan Susan C Stokes, (ED), The Oxford HandBook of Comparative Politics, (Oxford: Oxford University Press:2009), h.3.

⁷⁹ Luis Roniger, Favors, "Merit Ribbons" and Serices: Analyzing the Fragile Resilience of Clientelism, dalam Tina Hilgers, (ED), Clientelism in Everyday Latin American Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2012).h.26.

⁸⁰ Nicolas Van de Walle, The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan African, dalam Diego Abante Brun dan Larry Diamond, (ED), Clientelism, Social Policy, and Quality of Democracy, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014), h.232.

⁸¹ Dirk Tomsa, 2014. Party System Fragmentation in Indonesia : The Subnational Dimension. Journal of East Asian Studies 14 No.2. H. 249-278.

politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.⁸²

Kendati dapat dibedakan, namun kedua terminologi tersebut dalam praktiknya, keduanya sangat erat dan memiliki keterkaitan yang kuat. Edward Aspinall misalnya, mengemukakan bahwa lazimnya klientelisme memiliki keterkaitan yang erat dengan patronase, namun dalam beberapa keadaan tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat klientelisme.⁸³ Sebab, klientelisme tidak lagi dianggap cara yang ampuh untuk meraih suara tanpa adanya ikatan patronase.⁸⁴ Analisa Aspinall juga diperkuat pandangan Keith R. Legg yang melihat bahwa hubungan patron-klien pada umumnya berkenaan dengan penguasaan sumber daya yang timpang, hubungan yang pribadi (*particularistic*) dan berdasarkan asas saling menguntungkan. Sumber daya yang timpang tersebut dapat mencakup kekayaan, kedudukan, atau pengaruh. Selain itu juga menyangkut adanya hubungan pribadi yang sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*). Lande menyebut, konsep kemesraan yang muncul dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian yang diberikan oleh patron dan mendapatkan balasan kesetiaan yang diberikan oleh klien.⁸⁵

Menurut Scott, hubungan patron-klien dimaknai sebagai sesuatu kasus hubungan yang terjadi antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.⁸⁶ Dalam pandangan Scott, pola hubungan patron-klien setidaknya dipengaruhi oleh tiga kondisi, *Pertama*, terdapat perbedaan (*inequality*) yang menyolok dalam kepemilikan kekayaan, status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron biasanya lebih mendasarkan pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan bukannya pada pewarisan kedudukan.

Kedua, tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status sosial maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidakamanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat Zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan

⁸² Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: Polgov 2015), h. 4-5.

⁸³ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Ibid*, h.5.

⁸⁴ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Ibid*, h. 5.

⁸⁵ Keith R Legg, *Patrons, Clients, and Politicians*, terjemahan Affan Gaffar (Jakarta : Sinar Harapan, 1993),h.45

⁸⁶ Scott dalam Henddy Shri Ahimsah Putra, *Patron &Klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h.4.

demikian, ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peran hukum, nilai-nilai berdamai serta pranata-pranata yang kuat. *Ketiga*, yang juga merupakan implikasi definisi hubungan patronase adalah ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri.⁸⁷

Dalam analisa Burhanudin Muhtadi, paling tidak saat ini pandangan berbagai ilmuwan politik masih meyakini bahwa *patron-klien* adalah penyebab merebaknya praktik *money politics* di negara-negara berkembang. Lebih lanjut, menurutnya, literatur keserjanaan dalam studi patron-klien dapat dibagi menjadi tiga aliran.⁸⁸ *Pertama*, aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Menurut kubu aliran ini, klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial-politik. Patron-klien dinilai sebagai bagian intrinsik Dunia Ketiga yang relatif masih miskin dengan tingkat buta huruf yang tinggi. Dalam pandangan aliran ini, mereka dapat disebut “tidak modern”. Menurut Martin S. Lipset, demokrasi hanya mungkin dapat diterapkan dalam masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang memadai. Fokus dari aliran pemikiran ini adalah konseptualisasi dan studi kasus. Asumsi teoritik yang dibangun adalah bahwa *patron-klien* dapat diatasi jika negara itu sudah modern, baik pada aspek ekonomi maupun politiknya.⁸⁹

Aliran *kedua* adalah argumen kebudayaan yang menyebut bahwa patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya dimana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*).⁹⁰ Di antara ilmuwan yang mendukung pandangan ini adalah Ayokunle Olumuyiwa Omobowale. Secara lengkap Omobowale menulis :

Clientelism (patronage) is definitely not a novel social phenomenon. Though it is a non-material aspect of culture, its ontological reality is accepted, not just because it is said to exist, but because of the potency of its inherent exchange relationship, which brings patrons and clients together for the interchange of valued resources beyond the direct control of each actor (i.e. patron and client) within the social structure.⁹¹

⁸⁷ Henddy Shri Ahimsah Putra, *ibid*, h. 4.

⁸⁸ Burhanudin Muhtadi, “Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara Party ID dan Patron-Klien,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10. No.1, Juni 2013, h. 41-57.

⁸⁹ Martin Seymour Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” *American Political Science Review*, (53 (1), 1959), h. 69-105.

⁹⁰ L. Taylor, “Clientship and Citizenship in Latin America”, *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 23, No. 2, 2004, h. 213-227.

⁹¹ Ayokunle Olumuyiwa Omobowale, “Clientelism and Social Structure: An Analysis of Patronage in Yoruba Social Thought”, *Afrika Spectrum*, Vol. 43, No. 2, 2008, Hamburg: GIGA Institute of African Affairs, h. 203.

Berdasarkan pendapat Omobowale di atas, klientelisme dianggap bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga sebuah “*political subcultures*”. Menurut Jaensch, “*When the attitudes of a particular part of a population vary considerably in either intensity or content, that part can be said to have its own distinctive political subculture.*”⁹² Ilmuan lain yang mendukung pandangan ini adalah Gianni Zappala yang melalui studinya menggunakan perspektif Jaensch tentang *political subculture* yang menggambarkan jejaring klientelisme di kalangan pemilih imigran Australia dari negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Meski mereka sudah bermigrasi ke Australia sangat lama dan hidup dalam suasana demokrasi dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat memadai, namun perilaku dan budaya politik mereka masih sangat kental dengan nuansa patron-klienya.⁹³

Aliran *ketiga* dalam studi klientelisme adalah pendekatan institusionalis yang menekankan desain institusi politik berjasa menyebarkan praktik patron-klien, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai ditengarai menjadi penyebab maraknya patronase politik dalam sistem pemilu,⁹⁴ desentralisasi⁹⁵ dan proses pengambilan keputusan, baik di legislatif maupun eksekutif. Bagi aliran ini, patron-klien makin menarik bagi politisi di negara yang integrasi sistem politiknya masih buruk, pembelahan etnik yang kuat, dan performa ekonomi yang lemah.⁹⁶

Dalam perkembangannya, patronase dan klientelisme merupakan konsep yang biasa dipakai untuk menunjukkan pola hubungan patron (pemilik wewenang) dan klien (pelanggan) dalam menganalisis fenomena sosial. Bahkan dalam analisa Carl H. Lande saat ini, ilmuan politik memiliki kecenderungan untuk memulai menengok fenomena patronase, karena hubungan patron-klien diyakini ada di semua lapisan masyarakat, modern atau tidak modern, demokratis atau otoriter. Lebih lanjut Lande mengemukakan:

What have been called patron-client relationships and horizontally dyadic alliances have been observed in a wide variety of national and institutional settings where they have taken many different forms. They have been found in early chiefdoms, in ancient city-states and empires, in feudal systems, in

⁹² D. Jaensch, *The Politics of Australia*, (Melbourne: Macmillan, 1992), hlm. 22-23. Dalam Burhanudin Muhtadi, Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara “Party ID” dan Patron-Klien, Jurnal Penelitian Politik, Vol.10. No.1 Juni 2013, h. 45.

⁹³ Gianni Zappala, “Clientelism, Political Culture and Ethnic Politics in Australia”, Australian Journal of Political Science, Vol. 33, No. 3, 2010, h. 381-397.

⁹⁴ E. Scheiner, “Clientelism in Japan: The Importance and Limits of Institutional Explanations”, dalam Herbert Kitschelt dan Steven Wilkinson (Eds.), *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*, (Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2007), hlm. 276-297

⁹⁵ Maria Pilar Garcia-Guadilla and Carlos Perez, “Democracy, Decentralization, and Clientelism: New Relationships and Old Practices”, *Latin American Perspectives*, Vol. 29, No. 5, 2002, hlm. 90-109.

⁹⁶ Burhanudin Muhtadi, Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara Party ID dan Patron-Klien, Jurnal Penelitian Politik, Vol.10. No.1, Juni 2013. H.41-57.

Western and Third World democracies, in military dictatorships, and in modern socialist States. They have been observed in operation at various levels of societies: among the poorest of the poor, among the rural and urban middle classes, and at the very center of the struggle for power between members of ruling elites.⁹⁷

Kendati memiliki makna yang berbeda, terdapat perbedaan antara patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.⁹⁸ Perbedaan antara patronase dan klientelisme juga dapat ditilik dari karakteristiknya masing-masing. Karakteristik yang memberikan ciri spesifik dari patronase adalah relasi patron-klien yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik utama dari klientelisme menurut adalah bersifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Ada juga keterangan bahwa relasi dua arah (dalam patronase) bisa saja berubah menjadi tiga arah jika si patron berubah menjadi perantara yang menjembatani klien mereka dengan komunitas di luarnya, inilah yang kemudian di sebut sebagai klientelisme.⁹⁹

B. Politik Identitas dalam Fenomena Politik

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan disebut juga sebagai jati diri. Suparlan menyebut jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dengan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu.¹⁰⁰ Sementara Buchari dengan mengutip Jumadi (2009), mengemukakan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain. Hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.¹⁰¹

⁹⁷ C.H. Lande, "Political Clientelism in Political Studies: Retrospect and Prospect", *International Political Science Review*, 4, 4, 1993, h. 440.

⁹⁸ Stokes sebagaimana dikutip Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2 No.1 Tahun 2017, h. 36.

⁹⁹ Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2 No.1 Tahun 2017, h. 36.

¹⁰⁰ Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (Jakarta: KIK Press, 2004), h. 25

¹⁰¹ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*, (Jakarta: YOI, 2014), h, 27

Secara tegas, Cressida Heyes dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu. Daripada pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan atas pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensial tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.¹⁰²

Kauffman menyebut politik identitas bermula dari adanya kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa tersingkir oleh dominasi kelompok lainnya di dalam sebuah bangsa atau negara. Contoh seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana praktik pembedaan kelompok masyarakat telah membangun kesadaran golongan yang merasa terpinggirkan seperti masyarakat kulit hitam, dan etnis-etnis lainnya melawan golongan masyarakat kulit putih.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut politik identitas didefinisikan sebagai politik yang digunakan dalam membedakan. Politik identitas menjadi sebuah penegasan terhadap batas untuk menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang ditolak. Hal ini membuat status keanggotaan antara seorang anggota dan orang lain yang bukan anggota menjadi jelas dan bersifat permanen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agnes Heller yang menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori utamanya. Menurutnya, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis.¹⁰⁴

Menurut Jeffrey Week, identitas politik (*political identity*) berkaitan dengan kepemilikan atau keanggotaan individu dalam kelompok (*belonging*) berdasarkan persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain.¹⁰⁵ Sehingga, terdapat dua kategori di dalamnya, yakni identitas sosial mengenai kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Hal ini menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Kemudian, identitas politik mengenai nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*).¹⁰⁶ Kemudian, identitas politik (*political identity*) menjadi konstruksi

¹⁰² Cressida Heyes, *Identity Politics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, diakses dari Plato.Stanford.edu/entries/identity_politics.

¹⁰³ Kauffman dalam Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 4

¹⁰⁴ Agnes Heller sebagaimana dikutip Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis*, (Magelang: IndonesiaTera, 2002), h. 22

¹⁰⁵ Jeffrey Week sebagaimana dikutip Titik Widayanti, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. (Yogyakarta: UGM, 2009), h. 15.

¹⁰⁶ Setyaningrum, Arie."Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam "Politik perlawanan" Yogyakarta: IRE, 2005. hal. 19

yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan, politik identitas (*political of identity*) mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Oleh karena itu, politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Donald L. Morowitz (1998), mendefinisikan politik identitas dengan memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen. Sehingga, dapat kita maknai bahwa politik identitas merupakan ‘politik perbedaan’.¹⁰⁷ Para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas lainnya juga telah mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Sebut saja Agnes Heller, telah mendefinisikan politik identitas adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Pendapat lain dikemukakan oleh Gutmann yang menyatakan bahwa politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu.¹⁰⁸ Selain itu, dalam demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, klaim politik identitas tidak selalu mendukung nilai kebebasan dan keadilan, tetapi juga klaim yang dapat mengancam atau merusak nilai-nilai tersebut.¹⁰⁹

Permasalahan lainnya dari perjuangan politik identitas ialah siapa yang memberikan hak kepada kelompok yang mengatasnamakan identitas, misalnya agama atau etnis? Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan siapakah yang diemban dalam perjuangan politik identitas?.¹¹⁰ Karena itu, gerakan perjuangan identitas saat ini sangat jarang terwujud atas ekspresi spontan. Para politisi saat ini memanipulasi politik identitas demi kepentingannya, misalnya kandidat harus merepresentasikan sub-sub kelompok yang ada di masyarakat. Elite politik memainkan peran penting dalam menentukan tujuan dan taktik. Klaim-klaim identitas seringkali dibentuk dan disalah arahkan oleh dinamika intra dan inter

¹⁰⁷ Morowitz, D.L. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk”. dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner, *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*, (Bandung: ITB Pres, 1998),

¹⁰⁸ Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. (Oxfordshire: Princeton University Press, 2203), h. 1

¹⁰⁹ Eisenberg, A., & Kymlicka, W. *Bringing Institutions Back In: How Public Institutions Assess Identity*. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.), *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. (Vancouver: UBC Press, 2011), h. 2

¹¹⁰ Ingram, D, *Rights, Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: Principle Compromises in a Compromised World*, (Marryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2004). h. 55

kelompok. Pada tingkat intra kelompok, elite dapat membingkai tradisi-tradisi kelompok untuk memelihara kekuasaan dan otoritasnya menghadapi potensi pertentangan baik dari dalam maupun luar kelompok. Elite-elite minoritas seringkali mereproduksi perasaan diskriminasi sebagai alasan perjuangan.¹¹¹

Dalam praktiknya, elite politik sering bertindak seperti entrepreneur melakukan strategi-strategi yang oportunistik tentang bagaimana memobilisasi identitas untuk meningkatkan status baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun dalam kelompoknya. Politisasi identitas tidak hanya berwujud sebagai ekspresi perasaan atau pandangan kelompok tentang pengalaman tertentu misalnya diskriminasi, tetapi juga sebagai kendaraan instrumental dan oportunistik bagi elite yang orientasi kepentingan pribadi.¹¹² Ketika politik identitas dimanipulasi oleh kepentingan elite politik, maka terdapat beberapa risiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi, dalam keadaan heterogenitas etnik yang seringkali menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi.¹¹³ *Pertama*, politik identitas membentuk hierarki dalam kelompok-kelompok minoritas. Ketika tuntutan-tuntutan dari kelompok politik identitas dipenuhi para elitnya semakin berani untuk meningkatkan tekanan terhadap para anggota kelompoknya dalam membela nilai-nilai tradisional di ruang publik. Sebaliknya, ketika tuntutan kelompok politik identitas tidak dipenuhi mereka dapat memicu "*cultural defensiveness*" yang juga memperkuat elite-elite konservatif yang mendorong para anggota kelompok untuk menaati tanda-tanda identitas secara ketat demi melindungi kelompok dari tekanan atau ancaman pihak luar.¹¹⁴

Kedua, risiko gerakan politik identitas dikooptasi oleh negara. Politik identitas menjadi obat darurat untuk menyelesaikan masalah sosial yang kritis, termasuk rasisme, kemiskinan, dan perampasan (*dispossession*). Dampaknya, kelompok akan menonjolkan sisi primordialisme dan aspek sakral secara berlebihan, dan meningkatkan stereotipe pada kelompok-kelompok lawannya. Para pejabat pemerintah cenderung dipengaruhi oleh pandangan-pandangan stereotipe dalam memutuskan kebijakan atau perkara. *Ketiga*, itu, komunitas demokratis akan dilemahkan karena orang-orang mengacu pada basis-basis yang membedakan mereka daripada menyatukan mereka. Modal sosial yang berbasis pada saling percaya sulit dicapai akibat fragmentasi etnik dan keagamaan. *Keempat*, identitas adalah pokok yang sulit untuk didialogkan secara rasional serta non-negotiable, sehingga berpotensi menciptakan deadlock dan konflik terbuka. Lebih jelasnya Alcott and Mohanty (2006) menyebut bahwa pertarungan politik yang memanipulasi isu-isu identitas akan menyebabkan elite-elite politik cenderung

¹¹¹ Eisenberg, A., & Kymlicka, W. (2011). Bringing Institutions Back In: How Public Institutions Assess Identity. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.), *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. Vancouver: UBC Press. hal. 3

¹¹² Weinstock, D. M. (2006). "The Real World of (Global) Democracy". *Journal of Social Philosophy*, 37(1), hal. 6–20.

¹¹³ Birnir, J. K. *Ethnicity and Electoral Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), h. 61

¹¹⁴ Weinstock, D. M. (2006). "The Real World of (Global) Democracy". *Journal of Social Philosophy*, 37(1), hal. 6–20.

mudah menggunakan isu-isu yang dapat memobilisasi massa secara efektif. Selain itu, penggunaan isu-isu identitas juga menggambarkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk menunjukkan kinerja secara substantif, sehingga pertanyaan lebih diarahkan pada isu-isu non-substansial. Isu-isu substansial lebih dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan isu-isu kebijakan.¹¹⁵

C. Elit dan Kekuasaan

Jika politik identik dengan urusan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi, maka elite adalah sekelompok kecil orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan tersebut. Sebagaimana disebut C. Wright Mills “*In so far as national events are decided, the power elite are those who decide them.*”¹¹⁶ Dalam suatu tatanan masyarakat selalu dijumpai adanya satu kelompok individu yang memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, kendati perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan.¹¹⁷ Ilustrasi tersebut secara tidak langsung merefleksikan konsep dari teori elit-klasik yang mendefinisikan bahwa terdapat stratifikasi masyarakat yang terdiri dari sekelompok kecil manusia yang berkemampuan, dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah. Sementara di sisi lain, terdapat sejumlah manusia yang ditakdirkan untuk diperintah.¹¹⁸

Dalam perkembangannya, dikotomi antara sekelompok manusia yang memerintah dan mereka yang diperintah ternyata mengalami perkembangan berupa lahirnya sekelompok individu yang tidak memerintah namun menentukan proses dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca tentang lapisan masyarakat yang terdiri dari elit dan non-elit: (1). Lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*), dan elit yang tidak memerintah (*non-governing*). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu *non-elite*.¹¹⁹ Lebih lengkapnya mosca mengemukakan:

“In all societies..two class of people, a class that rules and that class is ruled. The first class always the less numerous, performs and political functions, mono- polizes power and enjoy the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first,

¹¹⁵ Alcoff, L. M., & Mohanty, S. P. (2006). Reconsidering Identity Politics: An Introduction. In L. M. Alcoff, M. Hames-Garcia, S. P. Mohanty, & P. M. L. Moya (Eds.), *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan. hal. 2

¹¹⁶ C. Wright Mills, *The Power Elit*, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 18.

¹¹⁷ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.27

¹¹⁸ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, ter. Yohannes Kristiarto, dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 197.

¹¹⁹ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, *Ibid*, h. 197

in manner that is now more or less legal, now more or less arbitrary and violent, and supplies the first”¹²⁰

Kata elite sendiri berasal dari bahasa latin yakni *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi. Dengan begitu elite merupakan kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial lebih di atas.¹²¹ Definisi elit juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa elit politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik.¹²² Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain dan kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif baik sebagai probabilitas untuk memengaruhi kebijakan dan kegiatan negara maupun probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai- nilai secara otoritatif.¹²³ Oleh karena itu, secara garis besar, elit dapat dipahami sebagai posisi atau kedudukan di dalam struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pendidikan, dan pekerjaan-perkerjaan bebas lainnya.

Menurut Maurice Duverger, studi tentang elit memusatkan perhatian pada empat hal. *Pertama*, anatomi elit berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elit itu muncul. *Kedua*, fungsi elit berkenaan dengan apa tanggung jawab sosial elit. *Ketiga*, pembinaan elit menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elit, imbalan apa yang mereka terima, dan kewajiban-kewajiban apa yang menunggu mereka. *Keempat*, keberlangsungan (bertahannya) elit berkenaan dengan bagaimana dan kenapa para elit itu dapat bertahan, serta bagaimana dan kenapa diantara mereka tidak dapat bertahan.¹²⁴ Dalam kaitannya dengan struktur politik, Roberh D Putnam menguraikan relasi elit melalui tingkat (kecenderungan) pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Menurutnya, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*), sedangkan

¹²⁰ Geraint Parry, *Political Elites* (London:George Allen and Unwin LTD, 1969), h.36.

¹²¹ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, terjemah Zahara D. Noer (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995), h.33.

¹²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali, 1985), h. 80.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 81

¹²⁴ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h. 163.

lapisan kedua di bawahnya adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. *Lapisan ketiga* terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah. *Lapisan keempat* terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik dan *Lapisan kelima* adalah kaum pemilih (*voters*).¹²⁵ Kendati terdapat berbagai lapisan dalam dimensi kekuasaan politik, namun dalam konteks politik lokal, relasi antar lapisan kaum berpengaruh (*Influentials*) dan kaum pemilih (*voters*) merupakan faktor yang paling menentu dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan politik. Hal demikian sebagaimana dijelaskan oleh Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker berdasarkan pengamatan keduanya terhadap beberapa ahli dalam memberikan kategori elite dalam struktur sosial, yaitu berupa:¹²⁶

Pertama, *perspektif psikologi*. Pandangan psikologis terhadap elit dikemukakan Vilfredo Pareto (1848- 1923). Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan aktor yang terbaik, dan merekalah yang disebut elit. Elit merupakan orang yang berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, ilmuwan tokoh agama, mekanik atau bahkan mafia yang umumnya dikenal pandai dan kaya.¹²⁷ Lebih lanjut, Kemampuan menduduki posisi yang terhormat didasarkan pada atribut kemanusiaan yang melekat pada seseorang, yang ia sebut sebagai *sentiment* atau *residues*. Untuk menjelaskan tentang konsep *residues*, Pareto menggunakan teori kelas dalam masyarakat. *Class one* merupakan kelas yang masih berada pada tataran "*instinct of combination*", yaitu masyarakat yang bergulat pada tataran gagasan, ide dan cita-cita untuk menuju kekuasaan. *Class two*, yakni tahap konsolidasi posisi, dalam bahasa Pareto disebut, "*the persistence of aggregates*". *Class three*, yakni kelas yang sudah menempatkan ide, gagasan dan cita-cita tersebut secara permanen dalam sebuah perintah atau kebijakan.¹²⁸

¹²⁵ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 38.

¹²⁶ Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Sosial Bases of Politics* (California: Worsworth Publishing Company, 1987), h. 142

¹²⁷ Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Sosial Bases of Politics* (California: Worsworth Publishing Company:1987), h.142.

¹²⁸ Geraint Parry, *Political Elites* (London: George Allen and Unwin LTD, 1969), h.7-46

Kedua, *pendekatan organisasi*. Elite dilihat dari sudut pandang organisasi dikemukakan oleh Mosca dan Michels. Menurut Gaetano Mosca (1858- 1941), orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Mosca menekankan pentingnya apa yang ia sebut sebagai “formula politik”. Dia percaya, bahwa dalam setiap lapisan masyarakat, elite yang memerintah berusaha untuk menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilnya sebagai “konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin atau kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima”.

Ketiga, *pendekatan ekonomi*. Pandangan ini dikemukakan oleh James Burnham. Dalam salah satu karyanya “*The Managerial Revolution*” (1941), Burnham sependapat dengan pola pikir Marxis bahwa faktor produksi yang membuat masyarakat menjadi dominan. Masyarakat pada dasarnya terikat oleh suatu kekuatan yang dapat memberikan posisi dominan di kelasnya. Kata “kontrol” menjadi salah satu kunci pemikiran Burnham. Kontrol dimaknai sebagai “*access*” untuk memperoleh kesempatan mengembangkan ekonominya, kontrol dimaknai sebagai “*preferential treatment*” untuk memperkuat akses tersebut. Burnham menyatakan:

”In normal circumstances...the easiest way to discover what the ruling group is in any society is usually to see what group gets the biggest incomes. ... Control of production gives rise to political power and social prestige as well as to wealth.”¹²⁹

Keempat, *pendekatan institusi*. Pandangan ini dikemukakan oleh C. Wright Mills. Menurutnya, kekuasaan tidak sekadar ditentukan oleh peran tertentu di masyarakat, karena faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Burnham, tetapi juga faktor institusi. Apa yang disebut Mills sebagai “*the institutional landscape*” menandai adanya peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang memperoleh kekuasaan puncak. Menurut pemikiran ini, faktor hierarki dan kedekatan personal lebih menguntungkan daripada pendekatan profesional dan ekonomi.¹³⁰ Masing-masing lembaga yang ada di suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, yang memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak kekuasaan tanpa didasari oleh pertimbangan profesional tetapi karena pertimbangan hierarki dan kedekatan personal orang lain. Mills kemudian sampai kepada pernyataan, “*behind men’s back*”, bahwa dalam beberapa kasus ternyata kekuasaan juga dikontrol oleh kekuatan lain yang memiliki kemampuan lobi untuk memengaruhi.

Secara dinamis, hubungan antara elit dan massa, bukan hanya mengangkat dirinya (elit) di atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya

¹²⁹ Geraint Parry, *Political Elites* (London: George Allen and Unwin LTD, 1969), h.50

¹³⁰ Geraint Parry, *Political Elites* (London: George Allen and Unwin LTD, 1969), h. 52

terhadap massa di bawahnya, melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Dorongan elit untuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan, atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan, dan karena itu individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai- nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, sehingga segenap upaya mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu.¹³¹

D. Teori Kubus Kekuasaan (*Powercube*)

Teori *Powercube* (kubus kekuasaan) merupakan teori yang dikembangkan oleh John Gaventa berdasarkan pengamatannya terhadap teori kekuasaan tiga dimensi yang diungkapkan Steven Lukes. Lukes menjelaskan teori kekuasaan Tiga Dimensi dalam karya monumentalnya “*Power A Radical View*. Menurutnya kekuasaan dapat diinjau dari beberapa dimensi. *Dimensi pertama*, menjelaskan tentang kekuasaan yang hanya berfokus pada satu hal saja, yaitu tindakan para aktor dalam mengambil keputusan. *Dimensi kedua*, juga masih berfokus pada kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan. Sedangkan *dimensi ketiga*, memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan dan dikonsepsikan secara lebih terperinci oleh John Gaventa dengan memahami kekuasaan sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya berdasarkan dimensi dan beberapa variabel yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam teori *Powercube*, Gaventa mendeskripsikan bahwa kekuasaan politik Memiliki beberapa dimensi antara lain:¹³²

Pertama, dimensi *level* (dimensi tingkatan). Dimensi ini terdiri atas level *global* dan level nasional. Politik global merupakan politik di tingkat dunia yang menyangkut persoalan hubungan antarnegara, antarkawasan, atau bahkan antarbenua. Politik global terwadahi dalam lembaga- lembaga yang menghimpun berbagai negara di dunia, baik pada level kawasan maupun dalam ruang yang sangat luas (global). Isu- isu yang diangkat seputar masalah demokrasi, hak asasi manusia, iklim, energy, kemiskinan, pemanasan global (*global warming*), senjata nuklir, dan beberapa isu penting lainnya.¹³³ Level *Nasional* mencakup persoalan politik di tingkat negara, atau terbatas pada level nasional. Isu-isu yang diangkat cukup beragam. Di Indonesia saat ini isu yang cukup kuat selama dua warsa terakhir terkait dengan kesatuan dan persatuan bangsa (NKRI), penguatan paham Pancasila, isu desentralisasi atau otonomi daerah, isu fiskal dan energi. Isu yang tidak kalah

¹³¹ Darwis, “Elit Politik Lokal dalam dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali”, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.2 No.2. (Yogyakarta:2011) h. 315.

¹³² John Gaventa, “Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis” IDS (*Institute of Development Studies*), Volume 37 Number 6 (November 2006), h.29.

¹³³ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017) ,h. 24.

pentingnya adalah tentang isu kekuasaan, politik baik legislative maupun eksekutif. Isu tersebut secara bersamaan menjadi tak terpisahkan dari isu nasional.

Level lokal, politik di level lokal merupakan masalah- masalah politik di tingkat lokal. Istilah lokal menunjuk pada suatu wilayah geografis—suatu tempat yang dibatasi kewenangan menurut undang- undang.¹³⁴ Secara geografis politik lokal dapat berupa politik di level Propinsi, Kabupaten/Kota, atau bahkan desa. Isu- isu yang dapat diangkat dalam politik lokal berupa demokrasi, birokrasi, otonomi daerah, partisipasi warga, akuntabilitas pemerintah daerah, rekrutmen elite politik, Pemilukada, relasi pusat dan daerah, konflik pusat dan daerah, kekerasan di daerah hingga masalah kebudayaan di daerah lokal. Dalam konteks lokal tersebut, peran tokoh dan pemimpin lokal sangat menentukan terhadap keberlangsungan politik dan pemerintahan. Pada saat Indonesia menghadapi otonomi yang diperluas, sosok pemimpin daerah dan para elit yang lain sangat menentukan. Dalam kajian ini para pemimpin tersebut dikenal sebagai sebutan elite politik lokal. Mereka para tokoh, pemimpin yang memiliki kewenangan tertentu untuk menentukan nasib daerah (lokal).

Dimensi yang kedua adalah dimensi *space* (dimensi ruang). Yang dimaksud ruang adalah sebagai usaha dari pengambil kebijakan untuk mengobservasi, membangun komunikasi hingga mengontrol kekuasaannya. Gaventa mengutip pandangan Clarissa Rile Hayward mendefinisikan ruang kekuasaan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dengan efektif. Lebih lengkapnya Hayward mengatakan, “*we might understand power ‘as the network of social boundaries that delimit fields of possible action’*. Freedom, on the other hand, ‘*is the capacity to participate effectively in shaping the social limits that define what is possible*’.”¹³⁵

Dimensi (*space dimension*) memiliki tiga ruang kekuasaan yang meliputi: 1) Ruang Tertutup (*closed*). Ruang tertutup merupakan ruang yang hanya dimasuki oleh segelintir orang. Meskipun pada hakikatnya kekuasaan publik merupakan hak masyarakat, namun pada praktiknya tidaklah demikian. Ruang tertutup adalah proses perumusan kebijakan yang dilakukan di belakang pintu yang dapat diakses oleh kalangan terbatas. Pada ruang ini, partisipasi publik sangat terbatas bahkan tidak ada sama sekali. Keputusan dibuat oleh sepe- rangkat aktor di balik pintu tertutup, dengan berpura- pura seolah mendengarkan aspirasi mereka. Ruang tertutup (*closed space*), di mana elite seperti politisi, birokrat, pakar, bos, manajer dan pemimpin membuat keputusan dengan hanya sedikit mende- ngarkan dan melibatkan masyarakat. 2) Ruang Yang Diperkenankan (*invited*). Di level masyarakat dan pemerintah, tuntutan untuk partisipasi telah menciptakan peluang baru bagi keterlibatan dan konsultasi, biasanya melalui ‘permintaan’ dari berbagai pihak berwenang, baik itu pemerin- tah, lembaga supra- nasional atau organisasi non pemerintah. Undangan mungkin akan diatur seperti yang ditemukan dalam berbagai forum level Desa, Kecamatan Hingga Propinsi. Munrenbang merupakan salah satu contoh dari forum tersebut. Dengan semakin kuatnya bentuk baru dari ‘tata

¹³⁴ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.2 .

¹³⁵ Clarissa Rile Hayward, “De- Facing Power” *Journal Polity*, The University of Chicago Press Vol.1, 1998, h.2

pemerintahan yang partisipatif, ruang ini terlihat pada setiap tingkat, dari lokal, kebijakan nasional dan bahkan ke forum global, dan sering dalam organisasi dan tempat kerja juga. 3) Ruang Yang Diciptakan atau Diklaim (*claimed/created*). *Claimed Spaces* merupakan cara baru untuk mengorganisir partisipasi warga dalam memberikan kontribusi, mengoreksi dan mengevaluasi kekuasaan. Peran dapat dilakukan oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang terorganisir dalam LSM, Ormas, OKP maupun lembaga formal.¹³⁶

Dimensi yang ketiga adalah dimensi *Forms* (dimensi bentuk). Dimensi bentuk mengacu pada cara di mana kekuasaan memanifestasikan dirinya, termasuk bentuk- bentuk yang terlihat (*visible power*), tersembunyi (*hidden power*) dan tak terlihatnya (*invisible power*). Ruang dimensi Powercube mengacu pada arena potensi partisipasi dan tindakan, termasuk apa yang disebut tertutup (*closed space*). Lebih terperinci dimensi bentuk terdiri dari: 1) Kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) terwujud dalam kekuasaan yang melembaga, yang secara langsung dapat menentukan arah kebijakan politik.¹³⁷ 2) Sementara dalam kekuasaan “yang tersembunyi” (*hidden power*) yang menjadi target utama bukanlah siapa yang akan diusung karena hal tersebut sudah memiliki kepastian politik, memiliki kepastian sudah didukung oleh masyarakat, tetapi “transaksi apa yang dilakukan antara aktor dan voters”, “apa yang akan dilakukan setelah kemenangan diperoleh”. Hal tersebut terkait dengan keuntungan apa, posisi apa, dan bargaining apa yang akan ditindaklanjuti setelah kemenangan. 3) Kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*). Dalam kekuasaan tidak terlihat, masyarakat akan dibawa ke alam ketidaksadaran karena sudah terbius oleh janji- janji penguasa atau ideologi yang ditanamkan oleh penguasa. Menurut Gaventa:

Significant problems and issues are not only kept from the decision- making table, but also from the minds and consciousness of the different players involved, even those directly affected by the problem. By influencing how individuals think about their place in the world, this level of power shapes people’s beliefs, sense of self and acceptance of the status quo – even their own superiority or inferiority”¹³⁸

Kekuasaan “tidak terlihat” merupakan penanaman doktrin dan ideologi atas orang lain melalui cara- cara yang halus. Seseorang tidak secara langsung mendoktrin atau mengajak dalam pilihannya, melainkan dengan cara memasukkan pikiran dengan merubah mind set seseorang. Pikiran seseorang akan digiring dengan kekuatan kata- kata yang seolah dapat merubah segalanya. Seseorang akan dibawa ke alam tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari orang lain.

Dari berbagai dimensi kekuasaan dan beragam jenis dan warnanya (*teori powercube*), kesemuannya tidaklah berdiri sendiri melainkan saling terkait dan bahkan saling interelasi (mempengaruhi). Sebagaimana kekuasaan di atas panggung politik dipenuhi lapisan-lapisan pada setiap dimensinya. Karenanya kekuasaan yang

¹³⁶ John Gaventa, “Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis” IDS (*Institute of Development Studies*), Volume 37 Number 6 (November 2006), h. 29.

¹³⁷ John Gaventa, “Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis h.27

¹³⁸ John Gaventa, *Ibid*.

terlihat faktual belum tentu dalam kondisi riilnya, tetapi ada hal-hal yang mesti dirahasiakan dalam kekuasaan. Bentuk kekuasaan semacam ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kehidupan masyarakat disebuah negara atau komunitas politik tertentu. Bahkan dalam praktiknya, semua dimensi dapat dilakukan secara bersamaan tergantung kemampuan aktor, jaringan dan dukungan dari pihak lain. Pada ranah level, kekuatan lokal banyak dipengaruhi oleh kekuatan nasional, dan kekuatan nasional banyak dipengaruhi oleh kekuatan global. Pada kasus- kasus tertentu di beberapa negara dunia ketiga, setiap persoalan lokal dan nasional selalu berhubungan dengan isu global. Ada kalanya isu tersebut berasal dari tingkat lokal, dan ada pula isu global yang merambah ke isu lokal.¹³⁹ Oleh beberapa ahli, teori Powercube sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis tingkat, ruang dan bentuk kekuasaan, dan keterkaitan mereka. Hal ini secara dinamis memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai aspek kekuasaan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Lebih lanjut, penggunaan teori powercube memungkinkan secara visual untuk menganalisis, hubungan dan kekuatan, dan kemudian melihat kemungkinan gerakan, mobilisasi dan perubahan yang terjadi dalam pertarungan politik.¹⁴⁰

¹³⁹ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017),h.71

¹⁴⁰ Abdul Chalik, *Ibid*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Meminjam definisi Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas social dan lain-lain.¹⁴¹ Sementara menurut Bogdan dan Biklen S, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati.¹⁴² Sementara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Schutz, fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus kesadaran.¹⁴³

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).¹⁴⁴ Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.¹⁴⁵ Pendekatan ini bukanlah pendekatan kasus tetapi pendekatan fenomenologi yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dalam konteks ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam perhelatan pemilihan kepala desa mulai dari kandidat kepala desa, tim sukses, masyarakat, tokoh masyarakat. Oleh karena itu kedudukan dan peran peneliti adalah melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup para informan/narasumber. Pilihan terhadap pendekatan ini bertujuan untuk mencari rincian makna yang komplek tentang fenomena masalah yang ada, menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa terjadi, khususnya dalam konteks memotret dinamika pelaksanaan pemilihan kepala desa di masyarakat pedesaan.

¹⁴¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 11-13.

¹⁴² RC Bogdan & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 21-22.

¹⁴³ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 233.

¹⁴⁴ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi; Fenomena Pengemis Kota Bandung*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 2.

¹⁴⁵ Stephen W Littlejohn, *Theories of Human Communication*. Edisi ke-5. Belmont-California, Wadsworth, 1999), h. 57.

Pada konteks masyarakat desa penting dilakukan sebuah penelitian untuk melacak sumber daya kekuasaan yang digunakan oleh para calon kepala desa, bagaimana pola-pola relasi yang dibangun di antara pemilih dan para kandidat. Upaya memotret realitas ini penting dilakukan khususnya di masyarakat desa yang memiliki kemajemukan tinggi mulai dari suku, etnis maupun agama. Selain itu, karakteristik masyarakat desa dengan segenap nilai, budaya dan adat yang menyelimutinya juga tidak boleh diabaikan. Karena, pemilihan kepala desa juga sarat dengan penggunaan *local values* sebagai acuan yang memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih.

Studi terhadap proses pemilihan kepala desa tersebut diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana pola-pola patronase klientelisme dan politik identitas berbasis etnis dan agama ini dimainkan oleh para kandidat kepala desa pada ajang perhelatan pemilihan kepala desa. Metode ini juga diharapkan dapat menjelaskan, memahami, mengungkap, menguraikan serta menggambarkan fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan untuk melacak bagaimana pola-pola patronase, klientelisme dan pemanfaatan jaringan etnisitas maupun identitas dimainkan dalam upaya pemenangan kandidat calon kepala desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya pemenangan pada perhelatan pemilihan kepala desa.

B. Hipotesis yang Diuji

Penelitian ini menguji beberapa hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penelusuran literatur awal, antara lain: *pertama*, beberapa studi relasi politik klientelistik memiliki akar sejarah yang cukup kuat dalam sejarah Indonesia. Patronase-klientelisme dalam fenomena politik kini tidak hanya terjadi pada aras pemilihan di tingkat nasional maupun wilayah tetapi telah menjalar menjadi sebuah fenomena yang juga terjadi pada aras akar rumput pedesaan. Penggunaan sumber daya baik material maupun non material di dalam ajang perebutan kekuasaan telah menjadi fenomena baru dalam pelaksanaan demokrasi di akar rumput. Patronase seringkali diidentikan dengan berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah).¹⁴⁶ Sementara klientelisme lebih menunjukan adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*) antara pemilih dan kandidat.¹⁴⁷

Sesa-desa yang multikultural atau memiliki keragaman suku, etnis maupun agama, hubungan patron-klien berbasis identitas kelompok (seperti karena kesamaan latar belakang etnis, suku dan agama) memiliki potensi terjadinya penggunaan jaringan identitas sebagai instrumen untuk mengaktivasi dan mengefektifkan

¹⁴⁶ Wolfgang Muno dalam Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, Jurnal Wacana Politik, Vol.2 No.1 Tahun 2017. H. 35.

¹⁴⁷ Aspinall & Sukmajati, 2016 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, "*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*". Yogyakarta: Polgov 2015), h.

kekuatan psiko-kultural dalam memobilisasi massa pemilih pada setiap kontestasi pemilihan kepala desa. Hal tersebut dapat dilihat dari: *pertama*, bagaimana strategi kemenangan dibuat dan dilaksanakan para kandidat. *Kedua*, Bagaimana mereka memobilisir massa pendukung berbasis etnis, suku maupun agama. Langkah-langkah mobilisasi tersebut biasanya dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran warganya secara kognitif tentang relevansi politik terhadap kesejahteraan etnis dan identitas kelompoknya. Upaya kemenangan dalam ajang pilihan kepala desa biasanya juga dilakukan dengan mendayagunaan sumber daya kekuasaan (ketokohan, modal finansial) yang dimiliki para kandidat kepala desa untuk kepentingan mendulang suara sebanyak-banyaknya. Jika hal ini dimainkan sebagai salah satu strategi, maka akan memiliki peluang yang signifikan bagi kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Karena, modalitas sosial dan budaya dalam arena politik lokal terlebih di pedesaan masih memiliki signifikansi untuk membangun dominasi kekuatan politik para aktor politik lokal akar rumput.

Kedua, pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya kemenangan pada perhelatan pemilihan kepala desa dinilai cukup efektif. Mengingat sebagaimana menurut Jeffrey Week, identitas politik (*political identity*) berkaitan dengan kepemilikan atau keanggotaan individu dalam kelompok (*belonging*) berdasarkan persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain.¹⁴⁸ Pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik seringkali dipakai dalam hajatan politik pada spektrum yang lebih luas. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pada spektrum yang lebih kecil seperti pedesaan juga memiliki peran yang signifikan. Selama ini, penggunaan sumber daya materi untuk memobilisasi massa pemilih menjadi kecenderungan yang dipilih oleh kandidat pada ajang pemilu di semua level, baik di level daerah maupun nasional. Penggunaan materi dalam bentuk patronase biasanya dapat berupa pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya. Namun pada aras desa, kendati pola hubungan ini dapat saja terjadi namun tidak sepenuhnya berakar pada sumber daya materi, mengingat legitimasi kekuasaan di aras desa dapat berasal dari sumber daya yang lainnya, karena karakteristik masyarakat desa yang masih cenderung memegang teguh nilai-nilai tradisional seperti faktor ketokohan, kesaktian dan lain-lain.

Dalam konteks masyarakat desa yang homogen, unjuk kekuatan ekonomi (*material*) sebagai salah satu sumber daya kekuasaan mungkin menjadi salah satu faktor yang signifikan bagi upaya kemenangan seorang kandidat kepala desa namun dalam masyarakat yang heterogen baik secara etnis maupun agama sumber daya kekuasaan *non material* (identitas kelompok suku, etnis dan agama) mungkin memiliki peran signifikan dalam upaya memobilisasi massa pemilih. Jika identitas politik (*political identity*) seringkali menjadi konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Maka, politik identitas (*political of identity*) mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

¹⁴⁸ Jeffrey Week sebagaimana dikutip Titik Widayanti, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. (Yogyakarta: UGM, 2009), h. 15.

Strategi pemenangan dengan pemanfaatan jaringan etnis, suku dan agama memang memiliki akar kebiasaan yang telah dintrodusir dari pola-pola yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan pada sepektrum yang lebih luas, seperti pemilu, pilpres dan pilkada. Oleh karena begitu dianggap efektifnya pemanfaatan jaringan etnisitas, suku dan agama dalam ajang perebutan kekuasaan, maka jika pola-pola seperti ini dibiarkan tumbuh subur di pedesaan akan berpeluang pada terjadinya konflik masyarakat di akar rumput yang nota bene memiliki tingkat Pendidikan politik yang belum memadai.

C. Lokus Penelitian

Penelitian akan dilakukan di desa-desa yang dianggap memiliki karakteristik sosio-kultur dengan tingkat kemajemukan tinggi khususnya di beberapa desa di Bulukumba Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Bulukumba terdapat berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis dan Konjo (Makassar). Terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Di Kabupaten Lombok Barat juga memiliki keragaman yang cukup tinggi. Dari sisi etnis, Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnis mayoritas di Lombok. Jumlah mereka mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan penduduk Lombok. Etnis lain seperti etnis Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab dan Cina adalah pendatang. Etnis Bali merupakan kelompok etnis pendatang terbesar di Lombok yang jumlahnya mencapai hampir 3% dari keseluruhan penduduk Lombok.

Di Bulukumba, penelitian dilakukan di desa Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale dan dan Desa Balibo, Kecamatan Kindang. di Desa Karama terdapat dua suku yakni Suku Bugis dan Suku Konjo yang merupakan Sub suku Makassar. Meski demikian, persatuan masyarakat tetap terjalin kompak, terbukti dengan terjaganya persaudaraan dengan masih menjunjung nilai "Sipakalebi, Sipakainge, Sipakatau" yang artinya saling menghormati, saling mengingatkan, menghargai antar sesama atau memanusiakan manusia. Kehidupan di Desa Karama juga kental dengan nuansa religi, "ma' baca" berupa syukuran atas rejeki, rumah, kendaraan baru, atau awal rintisan usaha dengan mengundang orang untuk makan bersama sering terjadi di desa ini.

Di Kabupaten Lombok Barat, penelitian dilakukan di beberapa desa antara lain: Desa Jambatan Kembar Kecamatan Lembar, Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada, Desa Suranadi Kecamatan Narmada dan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Di Desa jambatan, terdapat dua agama yang dipeluk oleh mayoritas warganya yaitu agama Islam dan Hindu. Jika dilihat dari suku penduduk desa jambatan kembar sangat beragam antara lain: suku sasak, suku jawa, suku bugis, sedangkan suku yang modominasi adalah suku sasak dan suku yang lain jumlahnya hanya puluhan. Desa Suranadi dan Desa Buwun sejati juga merupakan desa yang majemuk, terdiri dari 2 (dua) etnis dan suku yang berbeda-beda dan dua agama yang dianut oleh kebanyakan penduduknya yakni Islam dan Hindu. Sedangkan Desa Batu Mekar merupakan desa yang terletak dikawasan hutan kecamatan lingsar Kabupaten Lombok Barat, suku sasak merupakan satu-satunya suku di desa batu

mekar, sedangkan agama terdiri dari islam dan hindu. Sekitar 70% penduduk muslim dan 30% penduduk beragama hindu.

D. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi lapangan di sejumlah di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale dan dan Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, serta bebera desa seperti di Desa Jambatan Kembar Kecamatan Lembar, Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada, Desa Suranadi Kecamatan Narmada dan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sementara data sekunder penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel jurnal, dan media massa yang terkait dengan isu yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan, *pertama*, dengan melakukan studi dokumen dan literatur untuk menggali data kepustakaan dan teoritis. Data kepustakaan ini dikumpulkan pada tahap *desk study*. *Kedua*, dengan melakukan wawancara/interview mendalam untuk menggali dan mengeksplere pengalaman para informan/narasumber yang terlibat langsung dalam ajang pemilihan kepala desa lokus penelitian. Informan terdiri dari kandidat kepala desa, kepala desa terpilih, calon kepala desa yang tidak terpilih tim sukses, tokoh masyarakat dan masyarakat pemilih.

1. Daftar Narasumber Empat Desa Kabupaten Lombok Barat, NTB.

NO	NARASUMBER	ALAMAT	KETERANGAN
1	Amirullah	Dusun Batu rimpang utara, Desa Jambatan Kembar	Calon kepala Desa Terpilih
2	Aisnah	Dusun Batu rimpang selatan, Desa Jambatan Kembar	Ketua tim pemenang Calon kepala Desa Terpilih
3	Supardi Sahlan	Desa Jambatan Kembar	Calon kepala desa tidak terpilih
4	M. Muzaki	Desa Jambatan Kembar	Ketua tim pemenang Calon kepala desa tidak terpilih
5	I Nyoman Wisade	Dusun Karang anyar desa jambatan Kembar	Tokoh masyarakat
6	Bambang Kurdi Sartono	Dusun Batu asak, desa buwun sejati	Calon tidak terpilih (incumbent)
7	Muhidin	Dusun pembuwun, desa buwun sejati	Calon kepala desa terpilih
8	M. Muzakir	Dusun pembuwun, desa	Ketua tim

		buwun sejati	pemenangan Calon kepala desa terpilih
9	I Nyoman Adwisana	Dusun suranadi selatan, desa suranadi kecamatan narmada kab. Lombok barat	Calon kepala desa terpilih (incumbent)
10	Sahdi	Dusun orong sedalem, desa suranadi kecamatan narmada kab. Lombok barat	a
11	Arep	Dusun kalimanting, desa suranadi kecamatan narmada kab. Lombok barat	Tokoh masyarakat
12	Juminah	Dusun nyurbaye, desa batu mekar kecamatan lingsar kab. Lombok barat	Calon kepala desa terpilih
13	Oktonom Bahardi	Dusun nyurbaye, desa batu mekar kecamatan lingsar kab. Lombok barat	Ketua tim pemenangan Calon kepala desa terpilih
14	Samsudin	Dusun punikan, desa batu mekar kecamatan lingsar kab. Lombok barat	Calon kepala desa tidak terpilih
15	Sudarsih	Dusun karang temu, desa batu mekar kecamatan lingsar kab. Lombok barat	Tokoh masyarakat

2. Daftar Narasumber 2 Desa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

NO	NARASUMBER	ALAMAT	KETERANGAN
1	Jusman	Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba	Calon kepala Desa Terpilih
2	Hamzah	Dusun Kampung Baru, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.	Ketua tim pemenangan Calon kepala Desa Tidak Terpilih
3	Hasnah B	Dusun Lempongge, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba	Koordinator Tim Pemenangan Calon kepala desa terpilih
4	Andi Ambo Upe	Dusun Lempongge, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba	Tokoh Masyarakat (Imam Masjid Dusun)
5	Hj. Darmawati	Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba	Calon Kepala Desa Terpilih
6	Muh Nasran Maarif	Jalan Sam Ratulangi, Poros	Calon tidak terpilih

		Bulukumba-Sinjai, Kec. Ujung Bulu, Kota Bulukumba.	(incumbent)
7	Firda Wahyuni	Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba	Tim Pemenangan kepala desa terpilih
8	Muhammad Rais	Dusun Kantisan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba	Ketua tim pemenangan Calon kepala desa terpilih
9	H. Husain	Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Bulukumba	Tokoh Masyarakat (Imam Desa)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Sosio-Budaya Lokus Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 5°20' LS - 5°40' LS dan 119°58' BT - 120°28' BT . Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 22.958 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Sedangkan untuk kondisi curah hujannya rata-rata 170 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 12 hari /bulan.

Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba seluas 1.154,58 km² atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan, Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing- masing seluas 173,51 km² dan 171,33 km² sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,44 km² atau hanya sekitar 1 persen. Secara populasi, masyarakat Bulukumba berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 418.326 jiwa yang terdiri atas 197.629 jiwa penduduk laki-laki dan 220.697 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 10 wilayah kecamatan dan terdiri atas 27 kelurahan serta 109 desa.¹⁴⁹ Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2018 mencapai 362 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.851 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 212 jiwa/Km².

Secara demografi, tercatat bahwa penduduk di Kabupaten Bulukumba merupakan pendudukan yang memiliki latar dari berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Konjo (Makassar). Dari sejumlah suku yang ada, masih terdapat satu suku yang masih

¹⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Bulukumba dalam Angka*, diakses pada 24 Agustus 2020 pada laman <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/download>

memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku ini mendiami Desa Tanah Towa yang terletak di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Towa merupakan lokasi bermukimnya sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat yang populer dengan nama Komunitas adat Kajang, yang memiliki pemimpin adat atau disebut dengan istilah *Ammatoa*. Tanah Towa merupakan sebagai sebuah wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan, dan pada prinsipnya tumbuh dan terbangun dengan dua kelompok masyarakat yang boleh dikatakan berbeda dengan satu sama lainnya dalam banyak hal, terutama perbedaan yang paling menonjol adalah persoalan dalam pandangan hidup, yaitu satu kelompok masyarakat yang memang berpegang teguh pada agama Islam sebagai pedoman dalam berkehidupan, dan satu kelompok masyarakat lainnya adalah kelompok orang-orang yang menamakan dirinya penganut aliran kepercayaan *patuntung* atau sering juga masyarakat dimaksud disebut masyarakat penganut aliran kepercayaan Kajang.¹⁵⁰

Selain itu, Bulukumba juga masih sering dinisbatkan dengan wilayah maritimnya, khususnya bagi suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati dan secara historis, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat di masyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar". Hal demikian menggambarkan bahwa masyarakat Bulukumba masih memiliki eksistensinya dalam kancah maritim, dengan kata layar, yang mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'. Terdapat tiga tempat jadi posisi sentral di Bulukumba sebagai lokasi yang menarik di eksplorasi kemaritimannya, Kelurahan Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo, Kelurahan Sapalohe. Di tiga kelurahan ini memiliki ciri khas tersendiri dalam aktivitas manajemen dan industrinya.

Dari sisi budaya keagamaan, masyarakat Bulukumba didominasi oleh penganut agama Islam yang kental dan juga cukup mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Hal demikian secara historis dilatari dari da'wah yang dibawah oleh ulama besar dari Sumatera, yang masing-masing bergelar Dato' Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu), yang dalam kehidupannya telah menumbuhkan kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku zuhud, suci lahir bathin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid "*appaseuwang*" (Meng-Esa-kan Allah SWT).

¹⁵⁰ Abdul Hafid, " Belief System In Indigenous Community of Kajang In The Village of Tanah Towa, District Of Kajang, Regency Of Bulukumba" Jurnal Patanjala Vol. 5 No.1, Maret 2013, h. 6-7.

Adapun terkait dengan kehidupan demokratisasi masyarakat terhadap kehidupan perpolitikan, setidaknya dapat tergambar dari aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di daerah, baik dari Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Tercatat setidaknya angka partisipasi masyarakat Bulukumba dalam Pemilu mencapai 73% atau 233.993 dari jumlah pemilih. Angka tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 lalu, yang hanya mencapai 57% atau 209.248. Kondisi demikian juga relatif sama dengan keadaan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, dengan angka partisipasi 216.000 masyarakat dalam pemilihan, namun pada akhirnya terjadi penyusutan angka partisipasi, pada putaran ke-2, sehingga menyebabkan angka partisipasi masyarakat hanya mencapai 110.115. Dari 320.148 pemilih terdaftar, yang menggunakan haknya hanya 209.637 orang atau 65,48 persen. Itu berarti 110.511 orang tidak menggunakan hak politiknya alias golput. Jumlah ini lebih buruk dibanding putaran pertama yang partisipasinya mencapai 216.435 orang.¹⁵¹

Di satu sisi, potret demikian secara langsung merefleksikan bahwa kesadaran politik masyarakat Bulukumba terhadap perhelatan demokrasi masih menjadi hal yang diupayakan secara kolektif dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Sedangkan di sisi lain, masih terdapat hambatan dalam meningkatkan kesadaran pemilih untuk menciptakan iklim yang sehat dalam upaya demokratisasi, mengingat partisipasi pemilih masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, pilihan rasional, faktor ekonomi, primordialisme, serta kharisma dari para kandidat atau peserta kontestasi dalam pemilihan umum maupun pemilihan di tingkat lokal.¹⁵²

Di antara kecamatan yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Balibo Kecamatan Kindang dan Desa Karama Kecamatan Rilau Ale. Kecamatan Kindang merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba. Dengan luas wilayah 148,76 Km² dan dihuni oleh penduduk, sekitar 29.815 jiwa, yang tersebar di 13 (tiga belas) Desa dan satu Kelurahan, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 14.517 Jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 15.298 jiwa.¹⁵³ Secara umum mata pencaharian masyarakat desa di Kecamatan Kindang sebagian besar adalah petani, hampir 80%, warga yang berada di desa merupakan petani yang

¹⁵¹ Golput di Bulukumba, <http://fajar.co.id/read/103120/41/golput-di-bulukumba-110511-orang>, diakses Tanggal 20 April 2012

¹⁵² Muhammad Asdar, Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilihan Kepala Daerah Putaran Ke-II Tahun 2010 di Bulukumba, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013, h.58

¹⁵³ Badan Pusat Statistik, *Bulukumba dalam Angka*, diakses pada 24 Agustus 2020 pada laman <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/download>

secara aktif berkebunan dan bercocok tanam seperti cengkih, coklat dan kopi, sebagai komoditi andalan di daerah ini. Kondisi tersebut secara sosio-kultural dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari warga desa seperti desa Balibo, Kahayya, Kindang dll. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa potensi dari sumber pendapatan masyarakat bergantung pada pertanian.

Selain itu, dari segi etnis dan keberagaman, masyarakat desa secara kolektif dihuni oleh berbagai suku, seperti Jawa, Bugis dan Kanjo. Kendati demikian mayoritas masih didominasi oleh suku Bugis dan Kanjo, yang secara sosio-kultural telah berdampingan satu sama lainnya dan hidup rukun. Adapun dari sisi keagamaan, tercatat 99 % menganut agama Islam, dan hanya beberapa kepala keluarga saja yang beragama non-Islam. Kondisi demikian menjadi ladang subur terhadap kegiatan sosial-keagamaan dalam kalangan Muslim. Hal tersebut terlihat dari banyaknya majelis-majelis taklim yang digerakkan oleh masyarakat sekitar.

Dari segi partisipasi politik, masyarakat desa di Kecamatan Kindang dinilai cukup memiliki antusias yang menarik untuk diteliti. Sebab hal demikian dapat tergambarkan dari dinamika pemilihan kepala desa yang cukup menyita perhatian. Tercatat pada 22 Maret 2020, dari 13 Desa, terdapat 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Kindang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, seperti Desa Arinhua, Balibo, Garuntungan, Mattirowalie, Benteng Paliolie, Tamaona, Oro Gading.¹⁵⁴ Lebih lanjut, dinamika yang tercatat dari penyelenggaraan pesta demokrasi di level desa tergambarkan dengan adanya manuver politik dari kontestasi Pilkades tersebut, setidaknya kelima kandidat dari tujuh kepala desa tersebut, berhasil menggeser berbagai petahana yang terlebih dahulu telah menjabat kepala desa.

Salah satu desa di Kecamatan Kindang yang menjadi objek penelitian adalah Desa Balibo. Desa Balibo merupakan satu dari 10 desa di Kecamatan Kindang, yang merupakan daerah dataran tinggi di Kabupaten Bulukumba. Hampir 80 persen warganya merupakan petani perkebunan yang bercocok tanam cengkih, coklat dan kopi yang merupakan komoditi andalan di daerah ini. Di Desa Balibo terdapat dua suku yakni suku Bugis dan Kanjo. Suku Kanjo merupakan sub etnik dari Suku Makassar. Suku ini berpusat di [Malino](#) dan Kalimpopo/Jannaya yang memiliki keterikatan dengan daerah [Tana Toa](#) lama dan desa-desa Kanjo yang lain.¹⁵⁵ Desa Balibo juga merupakan salah satu desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di tanggal 5 Maret 2020 kemarin, dengan jumlah pemilih sebanyak 2200, yang diikuti sebanyak empat orang kandidat Kepala Desa.

¹⁵⁴

<https://radarselatan.fajar.co.id/ini-dia-64-desa-di-bulukumba-yang-akan-pilkades/>

¹⁵⁵ Thomas Koten, ed. (2017-09-27). "[Inilah Uniknya 2 Suku Kanjo Sulawesi Selatan](#)". *NetralNews.com*..

Dalam perhelatan Pada Pilkades tersebut, Hj Darmawati merupakan perempuan berhasil mengalahkan tiga lelaki yang merupakan pesaingnya dan keluar menjadi pemenang. Bahkan berhasil mengalahkan petahana yakni Muh Nasran Maarif dengan selisih suara yang cukup signifikan.¹⁵⁶ Menurutnya, modal kemenangannya dikarenakan kepercayaan masyarakat yang telah lama dipupuk. Ia terlibat aktif di berbagai organisasi desa, termasuk majelis taklim binaannya di delapan Masjid yang tersebar di Desa Balibo. Dengan strategi itu ia membentuk kelompok wanita, termasuk melalui pengajian yang dilaksanakan setiap pekan oleh organisasi Wahdah Islamiyah di Desa Balibo. Selain itu, warga masyarakat Balibo juga 99 persen merupakan penganut agama Islam, hanya satu orang saja yang beragama non muslim, yang merupakan pendatang dan saat ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Kindang.¹⁵⁷

Tabel Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa
Desa Balibo, Kecamatan Kindang¹⁵⁸

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Akbal	62
2	Jamaluddin	424
3	Darmawati	952
4	Muh Nasran Maarif	762

Di Kecamatan Rilau Ale, desa yang dijadikan lokus penelitian adalah Desa Karama. Kecamatan Rilau Ale merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 117,53 Km² dan populasi masyarakat yang mencapai mencapai 40.339, yang tersebar di 14 Desa dan 1 Kelurahan. Di kecamatan ini terdapat dua suku yang menghuni desa-desa di Kecamatan Rilau Ale, yaitu, Suku Bugis dan Suku Konjo (Makasar). Meski demikian, diakui oleh masyarakat sekitar bahwa, persatuan masyarakat tetap terjalin kompak, terbukti dengan terjaganya persaudaraan dengan masih menjunjung

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Darmawati, Kepala Desa Terpilih. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2020, di Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Darmawati, Kepala Desa Terpilih. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2020, di Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Darmawati, Kepala Desa Terpilih. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2020, di Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba.

nilai " Sipakalebi, Sipakainge, Sipakatau" yang artinya saling menghormati, saling mengingatkan, menghargai antar sesama atau memanusiakan manusia.

Sebagaimana gambaran umum Kabupaten Bulukumba tentang keberagaman, masyarakat di Kecamatan Relau Ale terdiri dari mereka yang beragama Islam dan beberapa warga ada pula yang menganut agama Kristen. Kendati demikian, mayoritas masyarakat didominasi oleh agama Islam, bahkan dinilai telah merasuk dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi demikian tergambarkan dari beberapa desa, seperti Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale yang dinilai kental dengan nuansa religi, "*ma'bacha*" yang merupakan tradisi adat berupa syukuran atas rahmat yang diberikan sang kuasa, berupa rumah, kendaraan baru, atau awal rintisan usaha dengan mengundang orang untuk makan bersama.

Hal ini berupa bentuk puji syukur kepada Allah atas rejeki yang didapatkan, atau meminta doa kepada orang yang datang untuk kesuksesan usaha yang akan dilakukan di masa mendatang. Selain tradisi tersebut, terdapat juga tradisi yang biasa dinamakan "*Ma Berijama*" yaitu berupa kebiasaan masyarakat Desa Karama dengan mengundang warga sekitar untuk melaksanakan salat Magrib dan dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah di rumah yang memiliki hajat, yang pada akhirnya ditutup dengan gerakan "*Ma'rate*" yang merupakan gerakan zikir dengan menggerak kepala. Secara historis, hal ini dipengaruhi oleh penyebaran islam melalui tarekat *Khalwatiah Samman* yang sering diikuti hampir 70% masyarakat Desa.

Adapun dari aspek partisipasi politik masyarakat, setidaknya dapat terlihat dari konstelasi dan dinamika kontestasi pemilihan kepala desa. Secara umum tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin terlibat dalam proses dan kegiatan politik.¹⁵⁹ Pada Pemilihan di tingkat lokal, 6 (enam) Desa di Kecamatan Rilau Ale, tercatat secara demokratis menyelenggarakan kontestasi pemilihan kepala desa yaitu, Desa Bajiminasa, Batukaropa, Tanah Harapan, Bontoharu, Karama, dan Swatani. Hal yang menarik dari penyelenggaraan Pemilihan kepala desa ini adalah partisipasi masyarakat cukup menyita perhatian, karena signifikansi partisipasi pemilih maupun peserta yang terlibat dalam perhelatan pemilihan kepala desa. Dari aspek peserta dan pemilih, setidaknya tergambarkan bahwa rata-rata peserta pemilihan kepala desa diikuti oleh 4 hingga 5 kandidat dengan angka partisipasi rata-rata mencapai 90%.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), h.3.

¹⁶⁰ Diakses dari laman: <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/launching-pilkada-2020-bupati-semoga-partisipasi-pemilih-meningkat-90-persen>

Pemilihan kepala desa di desa Karama merupakan bagian dari rangkaian pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan di 64 Desa di Bulukumba pada bulan Maret 2020. Di Desa Karama, Jusman merupakan kandidat yang berhasil mengalahkan Andi Harianto dengan selisih suara signifikan. Jusman berhasil mengumpulkan suara sebanyak 994 Suara, sedangkan Andi Harianto 779 suara.¹⁶¹ Jusman merupakan putra asli Desa Karama, yang merupakan pensiunan TNI, yang mundur dari kesatuannya di TNI AD Perhubungan Kodam XIV Hasanuddin Makassar karena turut ikut dalam kontestasi Pilkades melawan Andi Hariantoyang merupakan Kades Incumben dua Periode. Ia merupakan keturunan bugis campuran Konjo, sehingga dirinya menguasai dengan fasih kedua bahasa tersebut. Hal ini menjadi keuntungan buat dirinya untuk mudah diterima di masyarakat Desa Karama.

2. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografis sangat menguntungkan bagi masyarakatnya. Hal demikian tergambarkan dari potensi alam dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat. Melalui pemandangan alamnya yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten ini. Secara geografis, Lombok Barat terletak di 115° 49,12' 04"- 116° 20'15,62" Bujur Timur dan 8° 24' 33,82" - 8° 55' 19" Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Lombok Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara - Kabupaten Lombok Utara; Selatan -Samudera Hindia; Barat - Selat Lombok dan Kota Mataram; Timur - Kabupaten Lombok Tengah.¹⁶² Berdasarkan persebaran wilayah, Kabupaten Lombok Barat memiliki luas wilayah sebesar 1.053,92 Km² dengan populasi mencapai 694,99 Ribu yang tersebar dalam wilayah administrasi yang meliputi 10 Kecamatan dengan persebaran 122 desa/kelurahan.

Dari sisi etnis, Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnis merupakan mayoritas di Lombok. Jumlah mereka mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan penduduk Lombok. Etnis lain seperti etnis Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab dan Cina adalah pendatang. Etnis Bali merupakan kelompok etnis pendatang terbesar di Lombok yang jumlahnya mencapai

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Darmawati, Kepala Desa Terpilih pada hari Minggu 10 April 2020, di Kediannya Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luar, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

¹⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, *Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2019*, diakses pada 25 Agustus 2020 pada laman <https://lombokbaratkab.bps.go.id/>

hampir 3% dari keseluruhan penduduk Lombok. Keberagaman di Kabupaten Lombok Barat pemeluk agama Islam memang menjadi mayoritas namun hal tersebut tidak menimbulkan adanya suatu konflik dengan pemeluk agama lain. Keanekaan agama yang ada justru mempererat rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi antar umat beragama. Acara perang topat yang diadakan setiap tahunnya di Kecamatan Lingsar merupakan salah satu bukti nyata kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lombok Barat. Acara ini dipelopori oleh umat beragama Hindu untuk menghormati hari raya umat Islam. Di satu sisi jika melihat ke beberapa kecamatan yang masih kencang dengan konstruk budaya, etnis dan sukunya adalah kecamatan lembar yang memiliki desa jembatan kembar.

Lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat dilakukan di empat desa di tiga kecamatan yang berbeda. *Pertama*, di kecamatan Lembar penelitian dilakukan di desa Jembatan Kembar yang memiliki jumlah penduduk 4233 jiwa. Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Di Kecamatan ini terdapat 10 Desa termasuk desa Jembatan Kembar. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Gerung di sebelah Utara, Kabupaten Lombok Tengah di sebelah Timur, Kecamatan Sekotong di sebelah Selatan serta Selat Lombok di sebelah Barat. Luas wilayah Kecamatan Lembar adalah 77,18 Km². Total jumlah penduduk 48.548 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki 23.739 jiwa dan perempuan 24.809 jiwa.¹⁶³

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Lembar dibagi menjadi beberapa bagian meliputi wilayah pemukiman 774,8 Ha, persawahan 2.383 Ha yang terdiri dari 26 subak, tanah tegalan/perkebunan 1283 Ha, dan tanah lain lainnya 67,5Ha. Struktur perekonomian di Kecamatan Lembar masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan pegunungan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Lembar, maka strategi pembangunan apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di samping hal tersebut, mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil dagang dan buruh bangunan.¹⁶⁴ Jika dilihat dari mata pencahariannya, menunjukkan bahwa sumber penghidupan sebagian besar penduduk di kecamatan ini bergantung pada sektor pertanian. Sementara berdasarkan keyakinan, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan sebagian lainnya beragama Hindu dan Budha. Namun demikian, kebudayaan daerah di Kecamatan Lembar tidak lepas dan diwarnai oleh agama Hindu oleh konsep universalnya “Tri Hita Karana” (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi

¹⁶³ Kecamatan Lembar dalam Angka 2018, <https://lombokbaratkab.bps.go.id/>

¹⁶⁴ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Rencana Strategis 2017, diakses pada 26 Agustus 2020 (20<http://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/RenstraKecamatanLembar2014-2019Review201701264402042018.pdf>)

antara manusia dan tuhan, manusia dengan manusia dengan lingkungannya) pada umumnya.

Perbedaan berakhirnya masa jabatan kepala desa berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berbeda-beda. Tercatat sejak tahun 2015, sekitar dua hingga tiga desa di kecamatan Lembar melaksanakan pemilihan kepala desa. Perhelatan demokrasi akar rumput yang dipotret di kecamatan Lembar adalah potret pemilihan kepala desa di desa Jembatan Kembar. Desa jembatan Kembar merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang berada di kecamatan lembar. Dilihat dari agama penduduk desa jembatan kembar terdiri dari dua agama yaitu agama islam dan hindu, jika dilihat dari suku penduduk desa jembatan kembar sangat beragam suku yang terdapat di desa jembatan kembar antara lain: suku sasak, suku jawa, suku bugis, sedangkan suku yang modominasi adalah suku sasak dan suku yang lain jumlahnya hanya puluhan KK. Realitas kemajemukan dengan latar keragaman suku tersebut telah menyumbang dinamika perpolitikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang masih lebih mengedepankan suku. Pada perhelatan pemilihan kepala desa di Desa Jembatan Kembar, pemilihan kepala desa diikuti oleh lima calon kepala desa. Dalam proses pemungutan suara para pemilihan kepala desa (pilkades) Desa Jembatan Kembar, masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut:¹⁶⁵

No urut	Nama calon	Perolehan suara
1	Saparwadi	391
2	Hendra kusumawati	146
3	Suherman	134
4	Supardi dahlan	660
5	Amirullah	883

Di desa Jembatan Kembar, kandidat yang terpilih adalah Amirullah dengan perolehan suara mencapai 883 dan mengalahkan empat kandidat lainnya. Amirullah merupakan kandidat yang berasal dari suku Sasak dan beragama Islam. Keterpilihan Amirullah disebabkan karena beberapa strategi yang dilakukan salah satunya adalah menyatukan dua kampung Dusun Batu Rimpang Selatan dan Dusun Batu Rimpang Utara. Di dua dusun ini Amirullah menonjolkan aspek keturunan suku sasak sebagai strategi untuk

¹⁶⁵ Wawancara dengan calon kepala desa terpilih Amirullah di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok barat Sabtu 9 Mei 202

menyatukan suara.¹⁶⁶ Terhadap komunitas masyarakat Hindu, Amirullah melakukan pendekatan terhadap kelompok Merajan. Kelompok Merajan merupakan kelompok peribadatan umat hindu berbasis keluarga. Sosok Amirullah dianggap oleh komunitas masyarakat Hindu sebagai kandidat yang dianggap lebih terbuka dan inklusif terhadap warga masyarakat Hindu.¹⁶⁷

Kedua, penelitian juga dilakukan di kecamatan Narmada yakni di desa Buwun Sejati dan Desa Suranadi. Kecamatan Narmada merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Lingsar di sebelah Utara, Kabupaten Lombok Tengah di sebelah Timur, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi di sebelah Selatan serta Kota Mataram dan Kecamatan Gunungsari di sebelah Barat. Total luas wilayah Kecamatan Narmada adalah 112.77 Km². Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian besar penghasilan masyarakatnya dari sektor pertanian. Di samping itu, Kecamatan Narmada juga merupakan Daerah yang sangat potensial di bidang Agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan Pertanian dan Perkebunan yang cukup luas terutama tanaman buah-buahan. Kecamatan Narmada wilayahnya terbagi menjadi 21 Desa.

Kecamatan Narmada memiliki luas wilayah sekitar 112,77 km² dengan mewilayahi 21 Desa, dengan 127 Dusun, serta dengan jumlah penduduk 100.675 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 50.030 Jiwa dan Perempuan 50.645 Jiwa.¹⁶⁸ Penduduk Kecamatan Narmada yang beragama Islam mencapai 90 %, sedangkan 10 % memeluk agama Hindu, Kristen Katolik, Protestan dan Budha. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Narmada sebanyak 303 Tempat ibadah yang terdiri dari 91 Masjid, 170 Musholla, 22 Langgar dan 20 Pura yang tersebar di masing-masing Desa.¹⁶⁹ Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Narmada dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi wilayah pemukiman 909 Ha, persawahan 2.201 Ha, tanah tegalan/tanah kering 4.431 Ha, dan tanah lain lainnya 766 Ha. Struktur perekonomian di Kecamatan Narmada masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.¹⁷⁰ Dari segi adat istiadatnya, Penduduk Kecamatan Narmada

¹⁶⁶ Wawancara dengan calon kepala desa terpilih Amirullah di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok barat Sabtu 9 Mei 202

¹⁶⁷ Wawancara dengan calon kepala desa terpilih Amirullah di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok barat Sabtu 9 Mei 202

¹⁶⁸ Pemerintah Kecamatan Narmada, *Laporan Penduduk Kecamatan Narmada Per Maret 2019*. Lihat Kecamatan Narmada dalam Angka, h. 59.

¹⁶⁹ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Narmada, Profil SKPD Kecamatan Narmada 2017, hal. 3

¹⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Narmada, Profil SKPD Kecamatan Narmada 2017, hal. 6

sebagian besar merupakan penduduk suku sasak, dimana bahasa sehari-hari yang digunakan umumnya bahasa sasak serta adat dalam pernikahan merupakan adat asli daerah sasak.

Berakhirnya masa jabatan kepala desa di Kecamatan Narmada berdampak pada perbedaan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada tahun 2015, terdapat dua desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, tahun 2017 sebanyak satu desa, dan pada tahun 2018 terdapat enam desa yang turut menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Tercatat sebanyak 17 kepala desa di kecamatan narmada untuk periode 2019-2025 di lantik oleh bupati setempat.¹⁷¹ Dua desa yang menjadi lokus penelitian di kecamatan ini Desa Suranadi yang memiliki keragaman dimana umat Hindu menjadi penduduk mayoritas dibandingkan umat Islam. Namun perbedaan realitas keragaman tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk fair dan bersih. Hal tersebut juga dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses pemilihan kepala desa dengan tingkat partisipasi mencapai 90%.¹⁷²

Di desa Suranadi, kandidat kepala desa yang terpilih adalah I Nyoman Adwisana (54 tahun) yang merupakan incumbent dengan perolehan suara mencapai 1900 lebih suara. Ia merupakan kandidat yang beragama Hindu dan berasal dari suku Sasak. Sebagai kandidat yang berasal dari warga mayoritas tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi I Nyoman Adwisana kendati ia mengakui bahwa ia tidak mengeluarkan modal finansial cukup banyak. Ia hanya mengandalkan modal pengabdian, modal pengalaman dan modal kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Bahkan menurutnya, ia hanya mengeluarkan modal tiga juta untuk dapat terpilih menjadi kepala desa lagi, itu pun hanya untuk membayar transportasi saksi-saksi kami yang bertugas di TPS.¹⁷³

Selain desa Suranadi, penelitian juga dilakukan di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Pada pemilihan kepala desa di desa Buwun Sejati, kandidat terpilih adalah Muhidin, merupakan muslim yang berlatar belakang suku Sasak. Ia mengaku telah mengantongi suara dengan komposisi sekitar 65% merupakan pemilih Muslim dan 35% merupakan pemilih Hindu. Muhidin berhasil mengalahkan kandidat lainnya yang tidak lain merupakan kandidat incumbent. Berlatar belakang pernah menjabat sebagai ketua LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) dan aktif melakukan pemberdayaan

¹⁷¹ <https://lombokbaratkab.go.id/dari-gelaran-pelantikan-17-kades-secara-serentak-di-lobar/>

¹⁷² Hasil wawancara oleh warga pada kecamatan narmada.

¹⁷³ Wawancara dengan Kepala Desa Suranadi terpilih I Nyoman Adwisana di Dusun Karang anyar desa jembatan Kembar Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 10 Mei 2020

terhadap masyarakat dianggap menjadi salah satu factor kemenangannya.¹⁷⁴ Kandidat lainnya yang merupakan Incumben adalah Bambang Kurdi Sartono. Ia menyadari terlalu percaya diri dengan modalitas sebagai incumbent, dan menganggap remeh competitor, termasuk tidak intens melakukan pendekatan dengan tokoh dianggap menjadi salah satu faktor kekalahannya.¹⁷⁵

Ketiga, penelitian juga dilakukan di Kecamatan Lingsar tepatnya di desa Batu Mekar. Kecamatan Lingsar merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan relatif banyak hingga rata-rata 112 mm perbulan dan di wilayah utara merupakan wilayah pegunungan dan berbukit-bukit. Secara geografis, Kecamatan Lingsar berada dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Narmada, sebelah barat berbatasan dengan Kota Mataram dan Kecamatan Gunung Sari, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada. Jumlah Penduduk Kecamatan Lingsar per Januari 2015 sebanyak 68.882 jiwa, dengan rincian laki- laki 33.545 jiwa dan Perempuan 35.337 jiwa , dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 22.156.

Luas wilayah Kecamatan Lingsar yaitu 79,75 Km2 dengan mewilayahi 15 Desa, dengan 93 Dusun, serta dengan jumlah penduduk 69.383 Jiwa. Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Lingsar (Data BPS tahun 2013) dipilah menjadi Pemukiman 1.993 Ha, persawahan 1.756 Ha, tanah tegalan/tanah kering 2.713 Ha, dan tanah lain-lainnya 3.197 Ha. Struktur perekonomian di Kecamatan Lingsar masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Lingsar, maka strategi pembangunan apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan. Lebih lanjut dari segi adat istiadatnya Penduduk Kecamatan lingsar sebagian besar merupakan penduduk suku sasak, dimana bahasa sehari - hari yang digunakan umumnya bahasa sasak serta adat dalam pernikahan merupakan adat asli daerah sasak.

Di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Lombok Barat, desa-desa di Kecamatan Lingsar termasuk yang paling jarang melaksanakan pemilihan kepada desa. Tercatat pada tahun 2017 hanya satu desa yang turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Salah satu penyebabnya adalah

¹⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Buwun Sejati terpilih Muhidin di Dusun Pembuwun, Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 12 Mei 2020

¹⁷⁵ Wawancara dengan Calon Kepala Desa Buwun Sejati yang tidak terpilih Bambang Kurdi Sartono di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 12 Mei 2020

pemekaran desa yang baru dilakukan sekitar tahun 2010.¹⁷⁶ Kemudian di tahun 2011, terdapat pemekaran lima desa lainnya, yaitu Desa Giri Madia, Desa Bug-Bug, Desa Gegelang, Desa Saribaye, dan Desa Gontoran.¹⁷⁷ Kendati demikian diakui oleh berbagai masyarakat, bahwa dalam dinamika perpolitikan di desa tersebut warga secara antusias berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa bahkan jika dihitung berdasarkan prosentasi tingkat partisipasi, antusias masyarakat dapat tergolong tinggi yaitu sekitar 80%.¹⁷⁸

Salah satu desa yang diteliti di kecamatan ini adalah Desa Batu Mekar. Dalam perhelatan pemilihan kepala desa di Desa Batu Mekar diikuti oleh lima orang kandidat yang dimenangkan oleh Juminah dengan perolehan suara mencapai 1600 suara. Bermodal sering melakukan pengabdian di bidang agama di masyarakat sekaligus tiga menjabat sebagai Kepala Dusun dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) berhasil mengantarkan Juminah sebagai kepala desa terpilih di desa Batu Mekar.¹⁷⁹

No	Nama calon	Perolehan suara
1	Najamudin	1001
2	Samsudin	1551
3	Juminah SHI MPd	1600
4	Sarnah (incumbent)	613
5	H. Kamarudin	300

B. Legitimasi dan Pemanfaatan Jaringan Elit

Dalam diskursus mengenai percaturan politik, baik di level nasional, lokal, maupun sub-lokal, akan dijumpai satu kelompok atau individu yang memiliki pengaruh, yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan.¹⁸⁰ Kondisi demikian disandarkan pada konsep teori elit klasik, yang menempatkan dikotomi strata masyarakat antara sekelompok kecil manusia yang berkemampuan, dan karenanya

¹⁷⁶ Pemerintah Desa Lingsar, <http://www.desalingsar.id/Sejarah/Detail> diakses pada 27 Agustus 2020.

¹⁷⁷ Lembaran Daerah Lombok Barat No 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Desa dan Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Lombok Barat. Lihat juga Kecamatan dan Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia <https://www.kemendagri.go.id/files/2019-05/Kode&Data%20Wilayah/52.ntb.fix.pdf>

¹⁷⁸ <https://lombokbaratkab.go.id/sekda-taufiq-gandeng-forkopimda-tinjau-pilkades-serentak-di-kecamatan-lingsar/>

¹⁷⁹ Wawancara dengan Calon Kepala Desa Batu Mekar terpilih, Juminah di Dusun Nyurbaye, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat Sabtu 16 Mei 2020

¹⁸⁰ Abdul Khalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, h.27

menduduki posisi untuk memerintah. Sementara pada sisi lain, terdapat sejumlah manusia yang ditakdirkan untuk diperintah.¹⁸¹

Dalam perkembangannya, dikotomi antara sekelompok manusia yang memerintah dan mereka yang diperintah ternyata mengalami perkembangan berupa lahirnya sekelompok individu yang tidak memerintah namun menentukan proses dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Hal ini digambarkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, dengan menggambarkan lapisan masyarakat yang terdiri dari elit dan non-elit: (1). Lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*), dan elit yang tidak memerintah (*non-governing*). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu *non-elite*.¹⁸² Melalui ekstensifikasi elit tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, atau merupakan kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial lebih di atas.¹⁸³ Definisi ini juga secara afirmatif dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan mengatakan bahwa Elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik.¹⁸⁴

Kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Dalam hal ini kekuasaan sebagaimana dimaksud mencakup kekuasaan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.¹⁸⁵ Berdasarkan postulat tersebut, maka pada bab ini, akan secara spesifik akan memotret pola relasi dan legitimasi elit tokoh (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) sebagai strategi kemenangan yang dimainkan oleh para kandidat kepala desa dalam perhelatan pemilihan kepala desa.

Meskipun diakui bahwa demokrasi di aras lokal melalui pemilihan kepala desa dianggap sudah berjalan dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ajang pemilihan kepala desa juga kerap melahirkan tensi

¹⁸¹ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohannes Kristiarto, dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 197.

¹⁸² SP. Varma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohannes Kristiarto, dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 197

¹⁸³ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, terjemah Zahara D. Noer (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995), h. 33.

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 80

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 81

politik yang cukup tinggi.¹⁸⁶ Kondisi demikian dapat digambarkan dengan melihat aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi pemilihan maupun pencalonan kandidat. Mengingat dalam proses politik, di samping persaingan terjadi di antara kandidat, dalam praktiknya juga tidak jarang para kandidat kerap melibatkan pengaruh ketokohan para tokoh di desa sebagai strategi mendulang suara. Dalam Pemilihan Kepala Desa di Balibo Kecamatan Kindang dan Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Bulukumba terpotret bahwa jika dilihat dari struktur sosialnya didominasi oleh suku Bugis dan Konjo. Masyarakatnya juga mayoritas muslim yang ta'at sehingga mendudukan tokoh agama sebagai bagian dari aktor kunci untuk memobilisasi massa pemilih. Penuturan Darmayanti sebagai kandidat terpilih pada ajang pemilihan kepala desa Balibo menyebut, kedekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena mereka memiliki kuasa dan pengikut yang turut memberikan pengaruh dalam upaya mewujudkan kemenangannya.¹⁸⁷

Salah satu tokoh yang digandeng Darmawati adalah H. Husain yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Balibo. Ia merupakan pedagang yang sehari-hari membeli hasil bumi masyarakat seperti Coklat, Cengkih, dan beberapa komoditi lainnya. Selain itu, dirinya juga merupakan tokoh Agama Pa'ba (Ahli Doa dan Barazanji) yang sering diundang disetiap ada hajatan seperti masuk rumah, syukuran kendaraan dan lain-lainnya. Kendati di periode sebelumnya ia merupakan pendukung Muh Nasran Maarif, kandidat petahana. Namun di periode ini ia menjatuhkan pilihan pada Darmawati dengan alasan Darmawati dianggap lebih religius karena banyak terlibat aktif di dunia dakwah dan kajian Islam melalui Wahdah Islamiyah yang dilaksanakan di Masjid-Masjid.¹⁸⁸

Hal serupa juga terjadi di desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Bulukumba. Andi Ambo Upe yang merupakan Imam Masjid di Dusun Lempongge, merupakan tokoh masyarakat suku Konjo digandeng oleh Jusman, salah seorang kandidat kepala desa Karama yang terpilih. Pada Pilkades 2019, Ambo Upe memiliki peran yang signifikan di dalam mengantarkan kemenangan Jusman. Dalam memilih kandidat, Ambo Upe mengaku tidak melihat suku ataupun agama, namun yang diharapkan dapat membawa Desa Karama lebih baik lagi. Figur yang demikian ia dapatkan ada

186 R. Siti Zuhro dkk, *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan* (Jakarta: Ombak, 2009), h. 62

¹⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Darmawati, Kepala Desa Terpilih. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2020, di Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba.

¹⁸⁸ Hasil Wawancara dengan H. Husain, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Balibo. Wawancara dilakukan pada hari Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba pada 27 Mei 2020.

pada sosok Jusman melalui pemaparan visi dan misi, serta program desa yang menurutnya baik.¹⁸⁹

Dalam praktiknya, pelibatan tokoh agama dan masyarakat tidak selamanya dimasukan ke dalam struktur tim pemenangan. Bersilaturahmi dan membangun komunikasi juga kerap dijadikan legitimasi dukungan. Hal seperti ini sebagaimana terjadi di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Kandidat terpilih, Amirullah kerap mendatangi dan menjalin komunikasi dengan para tokoh hanya sekedar membangun jastifikasi bahwa ia telah mendapat restu dari tokoh. Pada saat pertemuan tatap muka dengan warga ia juga kerap menyampaikan “kami sudah menghadap tokoh A sebelum pertemuan ini”. Kalimat seperti dianggap sebagai kalimat yang mampu membangun opini public, karena secara tidak langsung warga akan mengira bahwa tokoh agamanya, tokoh adatnya, tokoh masyarakatnya sudah memberikan dukungan kepadanya. Strategi ini, menurut Amirullah dianggap efektif dan berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat bahwa dirinya sudah mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat ia kunjungi.¹⁹⁰ Menurutnya, bersilaturahmi dan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat sangat penting dalam upaya pemenangan, karena masing-masing tokoh masyarakat memiliki militansi masing-masing dalam setiap dusun. Amirullah menuturkan.¹⁹¹

“Kedekatan kami dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sangat kuat. Terbukti disemua dusun dengan para tokoh kami dekat di desa Jembatan Kembar. Memang, kedekatan dengan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat tidak menjamin untuk mendulang suara banyak. Tetapi disini lain pemilih sangat bisa menilai tokohnya menjatuhkan pilihannya kepada kandidat. Hal inilah yang menjadi acuan pemilih untuk menentukan dalam memilih kandidat. Kami memang tidak menjadikan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai tim pemenangan terlebih kami hanya melakukan silaturahmi. Dan ketika kami melakukan pertemuan tatap muka dengan warga, kami sampaikan bahwa kami sudah menghadap ke tokoh A untuk meminta ijin dan doa restu dalam pencalonan kami. Dengan cara seperti itu masyarakat militan tokoh tersebut tergiring untuk mendukung kami”

¹⁸⁹ Wawancara dengan Andi Ambo Upe, Tokoh Agama Desa Karama. Wawancara dilakukan di Dusun Lempongge, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba pada Minggu, 10 Mei 2020.

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

Di desa Jembatan Kembar dan Buwun Sejati, kendati masyarakat muslim merupakan penduduk yang dominan, namun jumlah warga masyarakat yang beragama Hindu juga cukup signifikan. Amirullah sebagai kandidat terpilih di desa Jembatan Kembar memiliki latar belakang sebagai santri lulusan pondok pesantren, sehingga relatif mudah diterima di kalangan tokoh-tokoh Islam. Namun demikian, pendekatannya yang inklusif dan terbuka terhadap kelompok Hindu mampu meyakinkan komunitas masyarakat Hindu sehingga mendapatkan suara yang cukup signifikan dari komunitas masyarakat Hindu. Amirullah menuturkan:¹⁹²

“Kemampuan meyakinkan tokoh umat Hindu dengan pendekatan pluralisme sehingga pemilih umat Hindu juga merasa yakin menjatuhkan pilihannya kepada kami. Dan tidak ada satupun tokoh baik dari agama Islam maupun Hindu yang didekati melalui pendekatan materialisme semuanya murni kemampuan berkomunikasi secara fleksibel dan kemampuan untuk meyakinkan pemilih. Betapa tidak, dalam setiap acara Merajan¹⁹³ kami biasa menghadiri acara tersebut, padahal kami dilabeli sebagai seorang Ustaz oleh warganya. Dan sekaligus membuktikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mampu mengayomi semua agama, suku, ras dan keturunan.”

Menurut Amirullah, strategi memanfaatkan jaringan identitas keagamaan sangat efektif asalkan dapat membaca situasi dan kondisi. Seperti berbicara tentang agama Islam ketika pertemuan dengan tokoh agama Islam. Dan berbicara pluralisme ketika meyakinkan umat Hindu. Resistensinya pasti ada tetapi jika disampaikan pada waktu yang tepat dan mampu mengelola perberbedaan merupakan hal yang paling fundamental. Tetapi memanfaatkan kelompok identitas untuk memukul kelompok minoritas sangat kami jauhi karena dapat merusak tatanan berdesa.¹⁹⁴

¹⁹² Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

¹⁹³ “Kelompok merajan merupakan kelompok peribadatan umat hindu berbasis keluarga. Misalnya untuk acara persembahyangan semua keluarga hadir baik di dalam desa maupun dari luar desa. Kelompok-kelompok merajan ini sangat efektif kami lakukan karena langsung menyentuh pada tingkat kepala-kepala keluarga. Dan yang melakukan pendekatan terhadap kelompok merajan ini kami membuat tim pemenangan yang beragama hindu supaya tidak ada jarak secara agama. Program yang ditawarkan kandidat juga sangat menyentuh pada titik kondisi umat hindu. Dimana, setiap acara Merajan tim pemenangan menghadirkan calon kepala desa”. Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

“Secara agama memang kami lebih banyak dipilih oleh umat islam namun kami juga bisa meraup lima puluh persen lebih suara umat hindu. Disisi lain di desa kami memilih yang berlatar memiliki pendidikan tinggi lebih cenderung memilih kandidat yang mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu meyakinkan secara rasionalitas pembangunan desa. Tidak boleh tidak Meyakinkan kepada calon pemilih dengan segala bentuk visi misi yang memuat tentang situasi kondisi dan masalah yang dihadapi desa serta mampu memberikan harapan baru untuk kemajuan desa. Politik di masyarakat kita tidak melulu berbicara soal figure public dan strategi pemenangan tetapi hal yang paling substansial mampu berkomunikasi dengan baik untuk meyakinkan pemilih bahwa kita mampu”

Secara umum, penduduk di Lombok Barat, khususnya Desa yang berada di berbagai Kecamatan seperti Lembar, Narmada, dan Lingsar, kendati dihuni oleh berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, Namun mayoritas masih dominasi suku Sasak yang merupakan penduduk asli Kabupaten Lombok Barat. Kondisi tersebut secara langsung tergambar juga dari berbagai kandidat kepala desa yang terpilih dari kalangan suku sasak seperti Desa Jembatan Kembar, Buwun Sejati, Batu Mekar, dan Suranadi.

Dalam pandangan beberapa kandidat kepala desa, identitas yang didasarkan pada kesukuan juga merupakan hal yang cukup menentukan untuk meyakinkan masyarakat memilih, sebab pada realitas sosio-kultural, masyarakat desa jika dikuatkan dari golongannya, maka dia akan semakin yakin, apalagi untuk memilih ras dan keturunannya sendiri. Kondisi ini diuraikan oleh Amirullah, yang merupakan kandidat kepala desa Jembatan Kembar terpilih, bahkan pada tataran dusun diakui bahwa dirinya sering menonjolkan ras keturunan. Menurutnya hal tersebut memang satu-satunya cara mempersatukan suara kampung yaitu dusun batu rimpang selatan dan dusun batu rimpang utara. Ia juga menuturkan, bagaimana nenek moyang yang dulu memberikan rasa bangga pada ras dan keturunan, karena asal muasalnya dari satu keturunan dan menjadi besar seperti sekarang ini.¹⁹⁵ Pemanfaatan jaringan identitas (*political identity*) oleh Amirullah tampaknya cukup efektif. Meminjam definisi Jeffrey Week, tentang identitas politik (*political identity*), strategi ini dilakukan dengan membangun rasa kepemilikan atas dasar persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain.¹⁹⁶ Membangun rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas dasar kesamaan dalam suatu komunitas juga

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

¹⁹⁶ Jeffrey Week sebagaimana dikutip Titik Widayanti, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. (Yogyakarta: UGM, 2009), h. 15.

mendudukan posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*).¹⁹⁷

Dalam perspektif teori kubus kekuasaan (*powercube*), kondisi demikian dapat dipahami, sebagai bagian dari dimensi level yaitu demokrasi yang berada dalam skala akar rumput (desa), mengingat isu lokal di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri untuk menentukan daya tarik sebagai upaya mobilisasi kekuatan pendukung. Sehingga Ungkapan demikian akan selalu menjadi materi dalam sosialisasinya yang secara terus menerus dilakukan dalam pertemuan. Sedangkan pada dusun lain yang bukan ras dan keturunan diakui olehnya bahwa dirinya menggunakan pendekatan sosial berbasis masyarakat dengan menyampaikan program-program yang akan kami lakukan ketika terpilih menjadi kepala desa. Dalam konteks lokal tersebut, peran tokoh dan pemimpin lokal sangat menentukan terhadap keberlangsungan politik dan pemerintahan.

Adapun dari segi latar belakang keagamaan, menurut tim pemenangannya, Amirullah memiliki daya tarik masyarakat tersendiri, mengingat mayoritas masyarakat yang didominasi oleh kalangan muslim sasak dan terlebih dirinya merupakan seorang santri dan kerap mendatangi berbagai tokoh masyarakat seperti kiyai dan kalangan pemuda untuk bersilaturahmi. Namun diakui bahwa dirinya tidak melibatkan berbagai tokoh tersebut sebagai bagian dari tim pemenangan. Cukup sekedar bersilaturahmi dan datang dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, akan tetapi dalam sosialisasi dirinya tetap menjadikan momentum relasi dengan berbagai tokoh tersebut sebagai bagian dari materi kampanyenya, dengan mengatakan bahwa telah meminta izin dengan tokoh A dan B. Hal demikian secara tidak langsung mengindikasikan bahwa peran tokoh tidak terlalu banyak dilibatkan dalam ruang tertutup (*closed*) melainkan sering digunakan dalam ruang yang diperkenankan (*invited*) dan ruang yang diciptakan (*created*). Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada Desa Suranadi, yang didominasi oleh masyarakat hindu Sasak, diakui oleh I Nyoman Adwisana, Kandidat kepala desa terpilih, bahwa dirinya sering mengunjungi, bahkan meminta nasihat dari tokoh agama khususnya hindu tanpa melibatkan mereka untuk menjadi tim pemenangan.

Muhidin, kandidat kepala desa terpilih di desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada juga melakukan hal yang serupa. Ia melakukan kegiatan silaturahmi dan komunikasi ke sejumlah tokoh baik tokoh pemuda maupun tokoh sepuh. Menurutnya, jika di rata-rata 60% adalah tokoh pemuda dan

¹⁹⁷ Setyaningrum, Arie."Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam "Politik perlawanan" Yogyakarta: IRE, 2005. hal. 19

sisanya tokoh yang sudah tua baik dari umat Hindu dan Muslim. Muhidin menuturkan:¹⁹⁸

“Yang dilakukan adalah strategi bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat karena kami sangat memahami tipikal tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh-tokoh disini tipikalnya senang jika kita bertamu dan membangun komunikasi yang baik. Kalau tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sudah tua-tua kami cukup silaturahmi dan memohon dukungan dan doa dengan tidak menjadi tim pemenangan. Terlebih tokoh muda yang agresif, itu yang kami jadikan tim pemenangan. Dan juga silaturahmi itu modal satu-satunya yang murah dan gratis.”

Di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada yang penduduknya mayoritas beragama Hindu, sisanya adalah Islam. Di desa ini kandidat terpilih adalah I Nyoman Adwisana yang berlatar belakang warga Hindu. Ia juga melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh yang berlatar belakang Muslim, Budha dan Kristiani. Kedekatannya dengan tokoh Muslim menjadi faktor ia mendapatkan sumbangan suara sekitar 10% dari kalangan Muslim dari total suara yang didapatkan. Menurutnya, dalam kampanye ia memang lebih intens melakukan pendekatan di kalangan umat Hindu, kendati di kalangan umat Islam juga tetap ia lakukan. Mengingat dari sisi agama, Hindu memiliki jumlah paling besar di desa Suranadi jika dibandingkan Islam. Strategi dengan mendatangi tokoh-tokoh umat Hindu dianggap sangat efektif dan ia lebih merasa nyaman karena latar agama yang sama.¹⁹⁹

Adalah Juminah, kandidat terpilih dalam pemilihan kepala desa di desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, merupakan kandidat yang berlatar belakang muslim dan berasal dari suku Sasak. Ia juga membangun kedekatan dengan tokoh-tokoh agama yang tidak hanya pada musim kampanye saja tetapi jauh sebelum pemilihan. Ia sering diundang dalam acara-acara keagamaan seperti acara acara kepaten. Sehingga, kendati desa Batu Mekar merupakan paling luas di kecamatan Lingsar semua tokoh telah mengenalnya. Para tokoh-tokoh tersebut bergerak sendiri untuk mengajak warganya agar memilihnya. Selain itu, jika ada tokoh masyarakat yang tidak suka pada calon tertentu biasanya langsung digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh tersebut untuk kepentingan mendulang suara. Terhadap tokoh agama Hindu ia melakukan pendekatan social kemasyarakatan meskipun secara pribadi Juminah juga dipanggil ustadz oleh

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Muhidin, kandidat kepala desa Buwun Sejati Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Pembuwun, Desa Buwun Sejati Kec. Narmada kab. Lombok Barat pada hari Selasa, 12 Mei 2020.

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan I Nyoman Adwisana, kandidat kepala desa Suranadi Terpilih. Wawancara dilakukan di Suranadi Kec. Narmada Kab. Lombok Barat pada hari Minggu, 10 Mei 2020.

masyarakat luas. Dalam beberapa acara odalan, pujawali, tujuh bulanan anak dan adat Hindu lainnya, ia sering diundang untuk hadir. Bahkan, tim pemenangan Juminah juga banyak yang beragama Hindu.²⁰⁰

Keberadaan elit atau tokoh-tokoh di pedesaan memang memiliki peranan yang cukup signifikan bagi upaya pemenangan. Potret realitas yang terjadi di beberapa desa tersebut setidaknya dapat digambarkan dan dilakukan pembacaan dengan menggunakan teori kubus kekuasaan (*powercube*) yang menganalisa kekuasaan mulai dari perolehan hingga pendistribusian, dengan interelasi berbagai dimensi seperti dimensi level dan ruang.²⁰¹ Dalam dimensi level, pemilihan kepala desa memang tergolong sebagai perhelatan demokrasi dalam skala lokal. Oleh karena itu, biasanya strategi pemenangan dilakukan dengan menelisik isu-isu lokal, mulai dari demokratisasi desa, birokrasi desa dan infrastruktur desa. Dalam dimensi ini, kandidat kepala desa mulai melakukan inventarisasi isu tersebut dengan mengkaitkannya terhadap kepentingan elit. Dalam kondisi demikian, meski tidak selamanya, sebagian elit secara formal akan masuk dalam struktur tim pemenangan untuk merumuskan program maupun kepentingannya. Kendati dalam praktiknya tidak selalu demikian. Pada perhelatan Pilkadaes Balibo, beberapa elit tergolong turut serta merumuskan bahkan menentukan program kebijakan yang menjadi dagangan dari para kandidat, seperti yang dilakukan oleh Hj. Darmawati yang menempatkan Firda Wahyuni, tokoh aktif pemuda, untuk menjadi tim pemenangannya yang melalui keterlibatannya berhasil merangkul kaum muda di desa Balibo untuk memilihnya.²⁰²

Kendati demikian, terdapat juga salah satu elit yang tidak secara formal terlibat dalam pemenangan Hj. Darmawati, seperti H Husain, yang merupakan pedagang yang sehari-hari membeli hasil bumi masyarakat seperti Coklat, Cengkih, dan beberapa komoditi lainnya. Selain itu, H. Husain juga dinilai merupakan tokoh Agama Pa' baca (Ahli Doa dan Barazanji) yang sering diundang disetiap ada hajatan seperti masuk rumah, syukuran kendaraan dan lain-lainnya. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sebelumnya ia merupakan pendukung petahana yang dikalahkan oleh H. Darmawati. Menurutny keputusan untuk mendukung H. Darmawati didasarkan dari latar

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Juminah, kandidat kepala desa Batu Mekar. Wawancara dilakukan di Dusun Nyurbaye, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat pada Sabtu, 16 Mei 2020.

²⁰¹ Teori kubus kekuasaan dapat menelisik kekuasaan berdasarkan dimensi tingkatan (*level*), ruang (*space*) dan bentuk (*form*), namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua dimensi yaitu level dan ruang, mengingat penggunaan dimensi forum dilakukan sebagai manifestasi atau pendistribusian kekuasaan yang mungkin relatif berbeda dengan isu yang menjadi tema penulisan ini.

²⁰² Hasil Wawancara dengan Darmawati (Kepala Desa Terpilih), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

belakang H. Darmawati yang aktif terlibat dalam aktivitas sosial-keagamaan, melalui berbagai majelis taklim yang dibinanya. Sehingga menurutnya akan sangat baik bila desa Balibo dipimpin olehnya dengan harapan akan menciptakan masyarakat yang lebih religius.²⁰³

Kondisi yang relatif sama juga terjadi di Desa Karama, dari kedua calon kepala desa yang bersaing, upaya memobilisasi dalam strata masyarakat berimbas pada keberadaan pendukung fanatik calon kandidat, terbukti dengan adanya kubuh-kubuh di tengah Masyarakat.²⁰⁴ Dalam kondisi demikian, banyak elit-elit yang tidak secara langsung terlibat dalam tim kemenangan, mengingat peran elit yang justru dapat memicu ketajaman persaingan. Misalnya Andi Ampo Upe, seorang Imam Masjid yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan sosial menjatuhkan pilihannya Kepada Jusman (kepala desa terpilih) dengan dasar jiwa sosial dan keagamaannya, seperti aktif dalam memberikan sumbangan dan membantu warga hajatan.²⁰⁵

Adapun dari segi ruang (*space*), berbagai kontestan secara optimal menggunakannya melalui berbagai forum dan ruang yang ada, seperti ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenalkan (*invited*), dan ruang yang diciptakan (*claimed/created*). Ruang tertutup misalnya mulai dilakukan dengan membentuk tim kemenangan. Seperti yang terjadi pada kontestasi pemilihan kepala desa Balibo. Darmawati sebagai kandidat terpilih, mengakui bahwa pada tahap awal ia mencoba memulai dengan menjadikan ruang tertutup untuk menciptakan tim kemenangan yang berjumlah 40 orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang termasuk berbagai tokoh baik, agama, petani, anak muda dan lainnya. Lebih lanjut, melalui ruang ini juga kelemahan petahana dan rumusan-rumusan program kinerja kandidat kepala desa dibentuk, seperti melihat adanya kekurangan petahana berupa tidak adanya pembangunan monumental sejak menjabat sebagai kepala desa sehingga dirumuskanlah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), penghapusan pungli dan berbagai kebijakan lainnya, sebagai usaha menawarkan kelemahan lawan dan kelebihan kandidat.²⁰⁶

²⁰³ Hasil Wawancara dengan Husain, (Tokoh Agama Desa dan Pendukung Hj. Darmawati), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

²⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ampo Upe (Tokoh Agama dan Pendukung Jusman), di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Mei 2020.

²⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ampo Upe (Tokoh Agama dan Pendukung Jusman), di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Mei 2020.

²⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Darmawati (Kepala Desa Terpilih), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

Hal yang relatif sama juga dilakukan oleh Jusman, kandidat kepala desa Karama (kepala desa terpilih), hal yang sedikit berbeda, jusman merumuskan tim pemenangannya dengan didasari pada peta persebaran wilayah, yaitu dusun-dusun di desa Karama. Dengan mengusung program kerja yakni menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut menurutnya menjadi daya tarik dan simpatik masyarakat untuk memilihnya.²⁰⁷ Melalui ruang tertutup ini setidaknya kandidat mulai melakukan proses perumusan kebijakan yang dilakukan di belakang pintu, yang dapat diakses oleh kalangan terbatas. Meskipun pada hakikatnya kekuasaan publik merupakan hak masyarakat, namun pada praktiknya strategi memperoleh suara akan selalu dilakukan dengan tertutup.

Adapun ruang berikutnya yaitu ruang yang diciptakan atau ruang yang diklaim (*claimed/created*), yang merupakan cara baru untuk mengorganisir partisipasi warga dalam memberikan kontribusi, mengoreksi dan mengevaluasi kekuasaan. Pemanfaatan ruang ini dilakukan secara berbeda oleh berbagai kandidat. Seperti Darmawati, Melalui 8 (delapan) Majelis taklim yang dibinanya, tidak jarang ia mengevaluasi kekuasaan serta mengoptimalkan pendekatan persuasif serta emosional kepada para jamaah yang keseluruhannya adalah wanita, lebih lanjut, Ia juga mengaku mendapatkan keuntungan tersendiri, pasalnya dirinya mudah dalam merangkul kaum wanita, mengingat ia juga dibantu oleh tim pemenangannya yang didominasi wanita, sehingga tidak jarang juga bisa mempengaruhi suami dan anak-anak mereka.²⁰⁸ Sedangkan di desa Karama, Jusman jauh-jauh hari telah aktif membagikan sembako pada setiap perayaan keagamaan, momentum ini dinilai merupakan ruang yang produktif untuk mengenalkan dirinya terhadap berbagai elit agama maupun adat. Lebih lanjut, dari salah satu tim pemenangannya, Hasna, mengakui, bahwa faktor terbesar dari kemenangan jusman adalah selain sering berbagi, Jusman memiliki perlengkapan pesta, seperti Kursi, meja, kipas angin, janur kuning dan sebagainya yang justru sering dimanfaatkan dan digunakan oleh warga dalam setiap perayaan adat maupun keagamaan. Bahkan yang paling terasa menyentuh adalah, saat musim kemarau pada pada 2019, Jusman membagikan ribuan liter kubik air disetiap rumah warga yang terdampak pada kekeringan.²⁰⁹

²⁰⁷ Wawancara dengan Jusman, di Kediannya Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Minggu 10 Mei 2020.

²⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Darmawati (Kepala Desa Terpilih), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020.

²⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Jusman (Kepala Desa Terpilih). Wawancara dilakukan Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Pada Minggu, 10 Mei 2020.

Dimensi ruang berikutnya adalah ruang yang diperkenalkan (*invited*). Konsekuensi dari tuntutan masyarakat terhadap partisipasi publik, secara langsung menciptakan ruang ini, sehingga secara sekuensial telah menciptakan peluang baru bagi keterlibatan masyarakat dan konsultasi para pemilih. Melalui berbagai forum kegiatan desa, kampanye, para kandidat akan dituntut aktif dan produktif untuk bersosialisasi dan memberikan pandangan terhadap kemajuan desa. Hal ini dilakukan secara aktif dengan mendatangkan para tokoh baik agama, kepala adat, maupun masyarakat secara individu. Jusman misalnya, yang merupakan putra asli Desa Karama dan juga pensiunan TNI, secara aktif bersosialisasi dengan berbagai tokoh khususnya tokoh etnis, seperti bugis dan konjo, mengingat dirinya merupakan keturunan Bugis dengan campuran Konjo, bahkan diakui bahwa dirinya sangat memiliki kedekatan dengan kedua suku tersebut, mengingat ia dapat menguasai dua bahasa secara fasih untuk berkomunikasi dengan golongan etnis bugis dan Konjo. Lebih lanjut, terhadap individu masyarakat dirinya juga aktif mendatangi berbagai kepala rumah tangga untuk sekedar mendekatkan secara emosional.²¹⁰

Strategi yang relatif sama juga digunakan oleh Hj. Darmawati dalam pemilihan kepala desa balibo, melalui ruang yang diperkenalkan (*invited*) Hj. Darmawati juga mencoba mendekati elit lokal yang berada diluar tim pemenangannya, Khususnya pada saat masa sosialisasi kandidat dan kampanye terhadap program yang telah ia susun. Lebih lanjut, secara masif ia juga mendekatkan dirinya pada berbagai kepala rumah tangga, bahkan terhadap masyarakat yang dinilai apatis terhadap kontestasi pemilihan kepala desa, karena menurutnya masih terdapat masyarakat yang enggan memilih jika tidak dibayar. Bahkan terhadap beberapa orang yang tidak tertarik untuk menyalurkan suara dalam pemilihan kepala desa, jika tidak dibayar dengan uang. Untuk itu dirinya memberikan sejumlah uang, Rp-50.000,00. Sebagai dorongan agar terlibat dalam pemilihan kepala desa. Menurutnya kondisi demikian telah menjadi realitas dan budaya yang tidak dapat terelakan.²¹¹

Secara umum cukup terpotret bahwa keberadaan elit baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat memainkan peranan yang cukup signifikan di dalam mendorong partisipasi politik warga. Berbagai peran dimainkan dengan beragam varian bentuknya yang dapat memberikan legitimasi kandidat kepala desa dan mempengaruhi massa pemilih. Dorongan elit untuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena ada dorongan

²¹⁰ Hasil Wawancara dengan Jusman (Kepala Desa Terpilih). Wawancara dilakukan Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Pada Minggu, 10 Mei 2020.

²¹¹ Hasil Wawancara dengan Darmawati (Kepala Desa Terpilih), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020

kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan, atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan, dan karena itu individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, sehingga segenap upaya mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu.²¹²

Partisipasi politik yang sifatnya mobilisasi atau pengerahan terjadi manakala elit mengadakan upaya untuk melibatkan massa ke dalam aktivitas-aktivitas politik. Partisipasi politik pada dasarnya bersifat mandiri atau sukarela, namun jika adanya dorongan elit tentu akan berdampak pada sifat partisipasi politik massa pemilih yang bersifat mobilisasi. Dorongan elit menjadi salah satu factor yang relative dominan dalam menentukan sifat partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.²¹³ Merujuk pada konsep Ralf Dahrendorf, relasi antara elit dan massa digambarkan sebagai relasi supraordinasi dan subordinasi. Dalam hubungan wewenang semacam ini, individu yang tergolong dalam kelompok supraordinasi secara social diperkirakan mengendalikan perilaku-perilaku individu yang tergabung dalam kelompok subordinasi. Lebih lanjut Goerge Simmel menganalisis bahwa meskipun relasi tersebut mencakup arus pengaruh satu arah, namun sebenarnya hubungan tersebut mengandung interaksi timbal balik.²¹⁴

C. Bentuk Patronase dan Klientelisme

Kendati dalam sejarahnya patronase-klientelisme lahir dari Rahim masyarakat bercorak agraris—karena menjadi ciri khas relasi antara para tuan tanah dan petani penggarapnya—namun, kini telah meluas masuk ke dalam ranah politik.²¹⁵ James Scott merupakan peneliti yang banyak menyajikan model tentang bagaimana interaksi antara pemilih dan politisi terbentuk sebagai potret bagaimana relasi antara para tuan tanah dan petani-penggarap di banyak negara di Asia Tenggara. Menurut Scott, di seluruh wilayah ini para petani-penggarap menyediakan jasa dan tenaga bagi para tuan tanah dimana mereka mengabdikan, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan ketika mereka menghadapi kesulitan hidup. Dengan memautkan diri mereka ke dalam relasi pertukaran semacam ini, para klien berusaha memperoleh jaminan keamanan dalam lingkungan kehidupan

²¹² Darwis, "Elit Politik Lokal dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali", *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.2 No.2. (Yogyakarta:2011) h.315.

²¹³ Miriam Budiarto, *Partisipasi Politik dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 28-58.

²¹⁴ Ralf Dahrendorf dan Goerge Simmel sebagaimana dikutip Haryanto, *Elit, Massa dan Kekuasaan; Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta: PolGov, 2017), h. 120.

²¹⁵ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale; Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2019), h. 30-31.

yang keras dan tidak tentu. Ketika pemilihan umum dilakukan dan memasuki kehidupan mereka di kampung, para klien itu memperoleh sebuah sumber daya politik yang baru, karena hanya dengan memberikan atau menahan suaranya mereka telah berpengaruh bagi nasib sang calon untuk kedudukan yang dikejanya.²¹⁶

Praktik politik klientelistik menurut Aspinall memang memiliki akar sejarah yang cukup dalam di dalam sejarah Indonesia. Karena memiliki akar kesejarahan yang kuat, maka penting dilakukan pembacaan terhadap realitas kekinian. Jika pada spektrum yang lebih luas seperti dalam konteks pemilihan di level nasional, wialayah dan kabupaten, praktik tersebut begitu kentara, maka bagaimana potret di level akar rumput fakta tersebut berbicara. Pada sub bab ini akan digambarkan pola-pola atau bentuk patronase-klientelisme dalam praktik demikrasi di level akar rumput pedesaan. Jika meminjam difinisi Martin Shefter, patronase diartikan sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.²¹⁷

Dalam praktiknya, patronase juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah).²¹⁸ Dalam pandangan Aspinall, tidak selamanya praktek patronase bersifat klientelistik. Kandidat yang memberikan sumber daya baik berupa barang maupun jasa kepada pemilih yang tidak pernah ditemui oleh sang kandidat atau tidak akan ditemui lagi tidak dapat dipahami sebagai klientelisme. Sebab, karakter lain yang melekat pada relasi klientelistik adalah adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*). Dengan demikian, dalam sebuah relasi, elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang paron dalam pemilu.²¹⁹

²¹⁶ James C Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", The Journal of Asian Studies Vol. 32, No. 1 (November, 1972). Lihat juga James C Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", The American Political Science Review, Vol. 66, No. 1 (March 1972)

²¹⁷ Martin Shefter, *Political Parties and the State : The American Historical Experience*. Princeton University Press: (Princeton:1994)

²¹⁸ Wolfgang Muno dalam Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, Jurnal Wacana Politik, Vol.2 No.1 Tahun 2017, h. 35.

²¹⁹ Aspinall & Sukmajati, 2016 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, "*Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov 2015), h.

Dalam praktik klientelisme, relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.²²⁰ Di beberapa desa lokus penelitian Sebagian tergambar bagaimana seorang kandidat kepala desa harus mempersiapkan modalitas finansial untuk kepentingan maju dalam ajang pemilihan kepala desa. Meskipun, ada juga yang sebatas mendasarkan pada modalitas social.

Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, NTB, Amirullah sebagai salah satu kandidat kepala desa telah menggelontorkan modalitas finansial sebesar 50 juta.²²¹ Biaya ini digunakan untuk kepentingan membeli snack, kopi pada saat pertemuan dengan warga, bukan untuk membeli suara. Menurut Misnah, tim pemenangan Amirullah, modalitas finansial tidak selamanya efektif.²²² Muhidin, kandidat kepala desa di desa Buwun Sejati, mengaku hanya bermodal uang 20 juta untuk cost politik selebihnya ia berkolaborasi dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten yang kebetulan memiliki konstituen di desanya sehingga program aspirasinya banyak dilakukan di desa kami. Demikian juga anggota DPRD provinsi juga diajak berkolaborasi sehingga kekurangan modalitas yang bersifat material kami bisa ditalangi atau ditutupi.²²³ Kasus di Buwun Sejati tersebut menggambarkan akan realitas adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yakni antara calon kepala desa dengan elit politik local di tingkat kabupaten dan provinsi. Hubungan timbal balik tersebut menggambarkan adanya dukungan yang diberikan yang sebenarnya tidak murni, karena ada persyaratan khusus yang harus dibayar berdasarkan consensus di antar kedua belah pihak patron-klient. Pola hubungan yang demikian disebut Lande sebagai hubungan pribadi yang sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*). Lande menyebut, konsep kemesraan

²²⁰ Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: Polgov 2015), h. 4-5.

²²¹ Hasil wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

²²² Hasil wawancara dengan Misnah, tim pemenangan Amirullah di Dusun Batu rimpang utara, Desa Jembatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat, Sabtu 9 Mei 2020.

²²³ Hasil wawancara dengan Muhidin, kandidat kepala desa Buwun Sejati Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Pembuwun, Desa Buwun Sejati Kec. Narmada kab. Lombok Barat pada hari Selasa, 12 Mei 2020.

yang muncul dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian yang diberikan oleh patron dan mendapatkan balasan kesetiaan yang diberikan oleh klien.²²⁴

I Nyoman Adwisana, kandidat kepala desa Suranadi Kecamatan Narmada NTB juga mengaku hanya bermodal tiga juta untuk bisa terpilih menjadi kepala desa lagi, itupun hanya untuk membayar transportasi saksi-saksi yang bertugas di TPS.²²⁵ Kandidat ini memang berlatar belakang incumbent dan penganut agama Hindu, agama yang dipeluk oleh mayoritas mayoritas desa Suranadi. Sementara Sahdi, rivalitasnya memiliki menyiapkan 18 juta yang digunakan dari awal sampai akhir dalam kampanye. Hanya saja menurut Sahdi, modalitas social jauh lebih berarti daripada modalitas finansial. Ia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya yang muslim sebagai salah satu calon kepala desa. Namun, jumlah kami yang muslim lebih sedikit ketimbang umat hindu sehingga sangat wajar incumbent menang karena secara panatisme agama tidak mungkin orang hindu akan memilih orang islam begitupun sebaliknya.²²⁶

Bentuk patronase juga dapat berupa vote buying. Terdapat kandidat kepala desa yang memberikan sejumlah uang, Rp-50.000,00. Sebagai dorongan agar meraka yang tidak tertarik untuk menyalurkan suara dalam pemilihan kepala desa menjadi turut terlibat dalam pemilihan kepala desa. Menurutnya kondisi demikian telah menjadi realitas dan budaya yang tidak dapat terelakan.²²⁷ Sementara di desa Karama, salah satu kandidat kepala desa jauh-jauh hari telah aktif membagikan sembako pada setiap perayaan keagamaan, momentum ini dinilai merupakan ruang yang produktif untuk mengenalkan dirinya terhadap berbagai elit agama maupun adat. Menurut salah satu tim pemenangannya, Hasna, mengakui faktor terbesar dari kemenangan jusman adalah selain sering berbagi, Jusman memiliki perlengkapan pesta, seperti Kursi, meja, kipas angin, janur kuning dan sebagainya yang justru sering dimanfaatkan dan digunakan oleh warga dalam setiap perayaan adat maupun keagamaan. Bahkan yang paling terasa

²²⁴ Keith R Legg, *Patrons, Clients, and Politicians*, terjemahan Affan Gaffar (Jakarta : Sinar Harapan, 1993),h.45

²²⁵ Hasil wawancara dengan I Nyoman Adwisana, kandidat kepala desa Suranadi Terpilih. Wawancara dilakukan di Suranadi Kec. Narmada Kab. Lombok Barat pada hari Minggu, 10 Mei 2020.

²²⁶ Hasil wawancara dengan Sahdi, kandidat kepala desa Suranadi tdaik Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Orong Sedalem Suranadi Kec. Narmada Kab. Lombok Barat pada hari Minggu, 10 Mei 2020.

²²⁷ Hasil Wawancara dengan Darmawati (Kepala Desa Terpilih), di Desa Balibo, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Mei 2020

menyentuh saat musim kemarau pada 2019, Jusman membagikan ribuan liter kubik air disetiap rumah warga yang terdampak pada kekeringan.²²⁸

Beberapa praktik tersebut di atas terpotret adanya relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Patronase memang biasanya digambarkan dengan berbagai bentuk pemberian baik berupa uangan tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah).²²⁹ Jika patronase lebih sering mewujud dalam bentuk distribusi sumber daya, maka klientelisme lebih menekankan pada modalitas jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality* dan resiprokal.²³⁰

D. Efektifitas Penggunaan Jaringan Identitas

Dalam diskursus mengenai struktur relasi elit, dalam konstelasi perpolitikan, berbagai sarjana politik memberikan ilustrasi melalui tingkat (kecenderungan) pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Paling tidak dapat dikatakan *stratifikasi teratas* adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*) *Lapisan kedua* di bawahnya adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. *Lapisan ketiga* terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah. *Lapisan keempat* terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik dan *Lapisan kelima* adalah kaum pemilih (*voters*).²³¹

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka posisi elit dapat dikategorikan berada dalam strata kedua maupun ketiga. Penggolongan ke dalam dua strata tersebut didasari pada kekuatan dan peran elit dalam konstelasi pemilihan

²²⁸ Hasil Wawancara dengan Jusman (Kepala Desa Terpilih). Wawancara dilakukan Jalan Poros Sampeang, Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Pada Minggu, 10 Mei 2020.

²²⁹ Wolfgang Muno dalam Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, Jurnal Wacana Politik, Vol.2 No.1 Tahun 2017. H. 35.

²³⁰ Dirk Tomsa, 2014. Party System Fragmentation in Indonesia : The Subnational Dimension. Journal of East Asian Studies 14 No.2. H. 249-278.

²³¹ Abdul Khalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, h.38

dengan pertimbangan karakteristik masyarakat yang relatif berbeda antar satu dan lainnya. Dalam pemilihan Pilkades tidak dapat dilepaskan dari kelompok sosial yang disebut dengan kelompok elite. Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk; satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu. Untuk itu sangat relevan untuk menakar kekuatan elit-lokal seperti tokoh adat yang memiliki relasi terhadap etnis guna menelisik proses demokratisasi akar rumput.²³²

Sebagai contoh adalah pada kontestasi pemilihan kepala desa, di Kabupaten Lombok, diakui oleh berbagai kontestan bahwa etnis sasak merupakan modal terbesar bahkan merupakan salah satu daya tarik tersendiri oleh masyarakat yang didominasi oleh etnis sasak. Oleh karenanya itu, faktor etnis secara sekuensial merupakan hal yang sentral dan dapat mempengaruhi kecenderungan para pemilih. Hal demikian juga terjadi pada Kabupaten Karama, yang didominasi oleh etnis Bugis dan Konjo. Berdasarkan preferensi pemilih, hal yang menjadi daya tarik masyarakat desa disamping faktor rasionalitas pemilih, finansial, dan kharisma ternyata primordialisme juga diyakini sebagai faktor yang cukup menentukan. Seperti kandidat Kepala Desa Jusman yang secara perolehan suara menempatkan dirinya terpilih sebagai kepala desa, mengingat disamping dirinya dapat meyakinkan kepada para pemilih atas program kerjanya, ia juga secara aktif mendekati kedua etnis masyarakat di desa tersebut, karena ia menilai bahwa dirinya merupakan Suku Bugis yang juga memiliki darah Konjo. Hal demikian terlihat dari upaya strategi memobilisasi masyarakat melalui berbagai komunikasi politiknya dengan menggunakan dua bahasa, Bugis dan Konjo, khususnya ketika berhadapan kepada tokoh-tokoh lokal yang menurutnya dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Postulat demikian secara kondisional dapat tergolong seperti yang digambarkan oleh Jeffrey Week sebagai identitas politik *political identity*. Lebih lanjut, hal demikian berkaitan dengan kepemilikan atau keanggotaan individu dalam kelompok (*belonging*) berdasarkan persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain.²³³ Sehingga terdapat dua kategori di dalamnya, yakni identitas sosial mengenai kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Hal ini menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Kemudian, identitas politik mengenai nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*).

²³² Abdul Khalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*, h.237

²³³ Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: UGM. hal 15

Lebih lanjut, konstelasi politik identitas juga di satu sisi digunakan oleh berbagai kandidat untuk mengoptimalkan manuver politiknya. Sering sekali berbagai kandidat menonjolkan etnis dan suku-nya sebagai bagian dari materi kampanye. Kondisi demikian tergambar dari Pemilihan kepala Desa Jembatan Kembar, Amirullah, yang merupakan peraih suara terbanyak pada pemilihan kepala desa Jembatan Kembar 2018 lalu. Pada setiap sosialisasi program tidak jarang materi dalam forum-forum di tingkat dusun, baik yang diselenggarakan melalui ruang tertutup (*closed*) maupun yang diciptakan (*created*), dirinya menuturkan materi mengenai ras keturunan.

Ruang tertutup (*closed*) setidaknya terlihat ketika proses perumusan strategi pemenangan yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh tim kampanye. Dengan menyusun daftar inventarisasi isu lokal termasuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat akan etnis dari kandidat. Lebih lanjut, strategi ini juga digunakan melalui perantara masyarakat dari luar desa, yang secara masif menyuarakan dan menguatkan keyakinan warga terhadap ras dan keturunannya. Kendati masyarakat luar desa tidak memiliki hak pilih namun mereka memiliki keluarga dan sahabat di desa yang dapat menentukan preferensi pilihan.

Sedangkan dalam ruang yang diciptakan (*created*) digunakan dengan mendatangi tokoh adat sebagai bagian dari manuver politik serta legitimasi dalam menyuarakan kapasitas kandidat. Kendati demikian, berbagai tokoh tersebut tidak dilibatkan dalam format tim pemenangan, namun diakui bahwa ketika dirinya telah mendatangi tokoh dan kemudian mendatangi masyarakat dengan dalil telah meminta izin dan restu, dirinya merasa telah mendapatkan legitimasi yang kuat dan dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk memilih dirinya. Karena menurutnya hal tersebut memang satu-satunya cara mempersatukan suara kampung yaitu dusun batu rimpang selatan dan dusun batu rimpang utara. Lebih lanjut ia menuturkan, bagaimana nenek moyang yang dulu memberikan rasa bangga pada ras dan keturunan, karena asal muasalnya dari satu keturunan dan menjadi besar seperti sekarang ini.²³⁴

Hal yang menarik dari strategi kampanye Amirullah adalah bahwa ternyata dirinya berhasil meyakinkan masyarakat desa dengan berbagai argumen yang mengindikasikan dirinya mampu untuk memimpin desa. Kendati demikian, faktor etnis diakui bukan satu-satunya dirinya dapat melaju sebagai pemenang, mengingat petaha juga merupakan bagian dari etnis sasak. Namun setidaknya etnis bagi masyarakat yang masih memiliki nuansa adat dan primordialisme yang erat, faktor etnis dapat menjadi modal dan strategi dalam mempengaruhi preferensi pemilih.

²³⁴ Wawancara, Amirullah (kepala desa Jembatan Kembar terpilih), di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Provinsi Lombok Barat.

Potret dari dinamika pemilihan kepala desa demikian jika ditelaah berdasarkan diliteratur kesarjanaan politik dalam menganalisa studi patron-klient berdasarkan aliran determinis, aliran argumentum kebudayaan dan pendekatan institusionalis,²³⁵ maka dapat dikatakan bahwa pola dinamika pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di desa Jembatan kembar lebih menonjolkan argumentum kebudayaan. Lebih lanjut, argumen kebudayaan disinyalir sebagai produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*).²³⁶

Diantara ilmuwan yang mendukung pandangan ini adalah Ayokunle Olumuyiwa Omobowale. Lebih lanjut, menurutnya kondisi demikian bukan sekadar merupakan hubungan sosial, tetapi juga sebuah “*political subcultures*”. Bahkan menurut Jaensch, diungkapkan: “*When the attitudes of a particular part of a population vary considerably in either intensity or content, that part can be said to have its own distinctive political subculture.*”

Terlepas dari pandangan relasi patron-klien, yang terjadi berdasarkan etnisitas tersebut, dalam tataran praktisnya, ternyata tidak setiap praktek patronase juga bersifat klientelistik. Kandidat yang memberikan sumber daya baik berupa barang maupun jasa kepada pemilih yang tidak pernah ditemui oleh sang kandidat atau tidak akan ditemui lagi tidak dapat dipahami sebagai klientelisme. Sebab, karakter lain yang melekat pada relasi klientelistik adalah adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*). Dengan demikian, dalam sebuah relasi, elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang patron dalam pemilihan.²³⁷ Lebih lanjut, potret demikian terlihat ketika berbagai kandidat justru tidak melibatkan tokoh etnis dalam menyusun strategi pemenangannya, melainkan hanya melakukan pendekatan secara emosional.

Peran elit/tokoh etnis tidak harus selalu terlibat dalam pembentukan keputusan politik seperti halnya harus ditempatkan pada format tim pemenangan. Mengingat dalam pertarungan politik akar rumput, jika seluruh kontestan diramaikan oleh seluruh etnis yang sama, maka secara sekuensial akan memicu pertarungan dalam skala elit-lokal (etnis) tersendiri. Secara umum, beberapa elit-lokal justru menghindari kondisi demikian sehingga

²³⁵ Burhanudin Muhtadi, “Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara Party ID dan Patron-Klien,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10. No.1, Juni 2013. H.41-57.

²³⁶ L. Taylor, “Clientship and Citizenship in Latin America”, *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 23, No. 2, 2004, hlm. 213-227.

²³⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmaja (Eds), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), h. 73-402.

relatif mengambil posisi yang tidak terlihat dan menerima semua kalangan untuk berdialog. Seperti elit agama, yang cenderung tidak membedakan kandidat satu dan lainnya, kendati para elit-lokal memiliki preferensi tersendiri dalam sikap politiknya.

Lebih lanjut, jika postur dari para kandidat dalam pemilihan kepala desa dipenuhi oleh kontestan yang memiliki etnis yang sama, tidak jarang juga identitas etnis tersebut direkatkan dengan agama. potret tersebut terlihat dari dinamika yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Suranadi. Yang secara keseluruhan kandidat diisi oleh calon yang berlatar belakang etnis sasak, dengan perbedaan agama yang cukup signifikan, antara kaum hindu dan muslim. I Nyoman Adwisana, yang merupakan incumbent dan terpilih kembali sebagai kepala desa berhasil mengalahkan Sahdi dan M Said. Dari ketiga kandidat tersebut, terlihat bahwa mereka merupakan suku sasak dan diakui sering terlibat dalam kegiatan sosial dan kerap mendatangi berbagai tokoh adat sebagai tradisi dari masyarakat desa. Namun hal yang menjadikan I Nyoman Adwisana terpilih, dalam pandangan Said dan Sahdi adalah bahwa masyarakat desa masih didominasi oleh agama hindu, mengingat para tokoh agama, hindu khususnya, lebih tertarik dengan kandidat yang berlatar belakang sama, baik secara etnis maupun agama. hal ini juga diakui oleh I Nyoman Adiwisana bahwa dirinya juga sering mendatangi tokoh-tokoh agama yang juga memiliki kesamaan latar belakang keagamaan dan etnis, bahkan dalam desa Suranadi terdapat kaum organisasi-organisasi informal yang juga berlatar belakang keagamaan seperti kelompok tani hindu dan muslim, serta kelompok kesenian dan tarian.

Relasi etnis dan keagamaan ini secara tidak langsung semakin meneguhkan realitas masyarakat yang masih memiliki nuansa politik identitas. Dalam pandangan Gutmann yang hal demikian menjadikan Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu.²³⁸

Dalam kondisi demikian sudah barang tentu peran elit yang berbasis etnis akan bergeser kepada elit yang berdimensi keagamaan. Oleh karenanya berbagai tokoh/elit lokal mencoba untuk menghindari konflik akibat pergeseran identitas tersebut, salah satunya dengan tidak ikut terlibat dalam format tim pemenangan salah satu kandidat, namun dengan tetap mempertahankan preferensi politiknya terhadap salah satu kandidat. Misalnya seperti yang dialami oleh Pak Arep, tokoh masyarakat dan mantan

²³⁸ Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press. hal. 1

kepala desa Suranadi, Kecamatan Narmada. Dirinya mengakui bahwa ia memilih sahdi, kandidat yang tidak terpilih. Namun secara pendekatan sosial keagamaan dirinya masih berhubungan secara baik dengan kepala desa terpilih, bahkan dalam kegiatan keagamaan dirinya tetap terhubung secara dekat kendati memiliki perbedaan keyakinan.²³⁹

Kondisi yang berbeda justru dapat terlihat ketika dihadapkan pada struktur masyarakat yang lebih memiliki tingkat partisipasi yang tinggi (baik partisipasi pemilih maupun keikutsertaan sebagai kontestan) disertai dengan didominasi kedua suku yang secara bersamaan, seperti yang terjadi pada Desa Balibo. Peran elit disinyalir menempati posisi yang sentral, dengan terlebih dahulu menganalisa kekuatan yang dimilikinya untuk kemudian ditempatkan secara formal dalam tim pemenang. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah pada kondisi demikian, entitas seperti etnis, secara praktis tidak terlalu mempengaruhi kecenderungan para pemilih terhadap para kandidat.

²³⁹ Wawancara, Pak Arep, Tokoh agama islam dan mantan Kades, di Desa Suranadi Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Pada 23 Mei 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstelasi perpolitikan pada tingkat nasional, lokal dan akar rumput (desa) secara relatif memiliki persamaan dalam kecenderungan para aktor politik dalam menciptakan relasi patron-klient. Perbedaan secara signifikan dalam konteks politik di tingkat akar rumput adalah adanya dominasi argumentasi kebudayaan baik yang sering digunakan kandidat maupun preferensi pemilih, sehingga terbuka secara praktik adanya pemanfaatan jaringan etnisitas dan identitas lainnya seperti agama, sebagai bagian dari strategi mendulang suara dan memobilisasi massa pemilih pada ajang perhelatan perebutan kekuasaan. Di satu sisi, hal demikian dapat diterima sebagai bagian dari realitas masyarakat desa yang memposisikan identitas sebagai alat yang berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial, sehingga individu “tertanam” dalam konteks partikular dari budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu, identitas individu dapat dimunculkan secara sosial dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan, gender, kewarganegaran dan lain sebagainya.

Hal ini secara sekuensial memberikan posisi elit lokal sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, sehingga posisi elit kerap disebut sebagai *local-strong man* (orang kuat). Namun kendati demikian, dalam kondisi tertentu, atau ketika dihadapkan pada struktur masyarakat yang lebih memiliki tingkat partisipasi yang tinggi (baik partisipasi pemilih maupun keikutsertaan sebagai kontestan) disertai dengan dominasi kedua suku yang secara bersamaan, seperti yang terjadi pada Desa Balibo. Peran elit disinyalir tidak menempati posisi yang sentral, sehingga tidak terlalu signifikan, sehingga strategi pemenangan cenderung dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa kekuatan postur masyarakat untuk kemudian ditempatkan secara formal dalam tim pemenangan sebagai upaya mengganti peran elit dalam upaya memobilisasi suara. Lebih lanjut, dalam kondisi demikian maka identitas atau argumentum kebudayaan tidak terlalu menjadi dasar utama dalam patron-klient.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdilah, Ubed S. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatera.
- Alcoff, L. M.. & Mohanty. S. P. 2006. *Reconsidering Identity Politics: An Introduction*. In L. M. Alcoff. M. Hames-Garcia. S. P. Mohanty. & P. M. L. Moya (Eds.). *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan.
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal San Transmigrasi Republik Indonesia.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arnold K. Sherman. Aliza Kolker. 1987. *The Sosial Bases of Politics*. California: Worsworth Publishing Company.
- Asdar, Muhammad. 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilihan Kepala Daerah Putaran Ke-II Tahun 2010 di Bulukumba*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta:Polgov
- Astuti, Sri Buchari. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*. Jakarta: YOI.
- Birch, Anthony H. 2007. *The Concepts and Theories of Modern Democracy*. Edisi ke-3. Oxon: Routledge.
- Birnir, J. K. 2007. *Ethnicity and Electoral Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bogdan, RC & Biklen. S.K. 1982. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Mehtods*. Boston : Allyn and Bacon. Inc.
- Campbel, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajr.
- Dahl, Robert A. 1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy as Control*. Yale University Press.

- Duvergen, Maurience. 2005. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwipayana, Ari dan Suroto Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eisenberg, A.. & Kymlicka, W. 2011. *Bringing Institutions Back In: How Public Institutions Assess Identity*. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.). *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. Vancouver: UBC
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Falsafah Kepemimpinan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Forrest, Joshua B. 2014. *The Demise of Territorial Localism*. paper prepared for presentation at the 23rd World Congress of Political Science. International Political Science Association. Montréal. Canada. July 22nd.
- Gama, Fatih Abisono Nasution. 2017. *Desa; Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gerald, Galang. "Refleksi Politik Demokrasi Desa: Revitalisasi Demokrasi Komunitarian Desa Dalam Menghadapi Konstelasi Globalisasi" Proceeding ICSGPSC.
- Gutmann, A. 2003. *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press.
- Hans Antlov. 2003. *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lappera Pustaka utama.
- Hatta, Mohammad. 1970. "Colonial Society and the Ideal of Social Democracy". dalam *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. ed. Herbert Feith Ithaca: Cornell University Press.
- Huntington, Samuel P dan Joan M Nelson. 1977. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Jaensch, D. 1992. *The Politics of Australia*, Melbourne: Macmillan.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. 1984. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite. Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. terjemah Zahara D. Noer. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi; Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lande, Carl H. 1977. 'Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' dalam *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*. Steffen W. Schimdt. James C. Scott (eds.). Berkeley: University of California Press.

- Legg, Keith R. 1993. *Patrons, Clients, and Politicians*. terjemahan Affan Gaffar. Jakarta : Sinar Harapan.
- Littlejohn, Stephen W. 1999. *Theories of Human Communication*. Edisi ke-5. Belmont-California. Wadsworth.
- Mas'ood, Mochtar. 1983. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Merkel, Wolfgang. 2003. *Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi*. Jakarta: FES.
- Michels. R. 1915. *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. Hearst's International Library Company.
- Morowit, D.L. 1998. "Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk". dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*. Bandung: ITB Pres.
- Rights, Ingram. D. 2004. *Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: Principle Compromises in a Compromised World*. Marryland: Rowman and Littlefield Publishers.
- Romli, Lili. 2019. *Bunga Rampai Demokratisasi Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian. Badan Keahlian DPR RI.
- Roniger, Luis. Favours. 2012. "*Merit Ribbons*" and *Serices: Analyzing the Fragile Resilience of Clientelism*. dalam Tina Hilgers. (ED). *Clientelism in Everyday Latin American Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Transformasi Ekonomi dan Politik Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Scheiner, E. 2007. "Clientelism in Japan: The Importance and Limits of Institutional Explanations". dalam Herbert Kitschelt dan Steven Wilkinson (Eds.). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge. UK: Cambridge Univ. Press. 2007. hlm. 276-297
- Schumpeter, Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper and Brothers.
- Setiawan, Ahmad. 1996. *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyaningrum, Arie. 2005. "Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial" dalam *Politik perlawanan* Yogyakarta: IRE.
- Shri, Henddy Shri Ahimsah Putra. 2007. *Patron & Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

- Stokes, Susan C. 2009. *Political Clientelism*. dalam Carles Boix dan Susan C Stokes. (ED). The Oxford HandBook of Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: KIK Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafii, Ahmad Maarif. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Shefter, Martin. 1994. *Political Parties and the State : The American Historical Experience*. Princeton University Press: Princeton.
- Titik, Widayanti. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: UGM.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi; Sejarah. Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIRed].
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. terj. Yohannes Kristiarto. dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Walle, Nicolas Van de. 2014. The Democratization of Clientelism in Sub-Saharan African. dalam Diego Abante Brun dan Larry Diamond. (ED). *Clientelism. Social Policy. and Quality of Democracy*. (Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.
- Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: UGM.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Yayasan TIFA.
- Wright, C. Mills. 2000. *The Power Elit*. New York: Oxford University Press.
- Zakaria, Yando. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: ELSAM.
- Zuhro, R. Siti Zuhro. 2009. *Demokrasi Lokal;Perubahan dan Kesenambungan* . Jakarta: Ombak.

B. Jurnal

- Adji, Rekha Pratama, “Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017”. Jurnal Wacana Politik. Vol. 2 No.1.
- Alamsyah. 2011. “Dinamika Politik Pilkadaes di Era Otonomi Daerah.” Jurnal Taman Praja. No.1/Vol.1..

- Cahyono, Heru. 2012. "Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru". *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 38 Nomor 2.
- Darwis. 2011. "Elit Politik Lokal dalam dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali". *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.2 No.2. Yogyakarta.
- Dian, Devy Cahyati dan Yonatan Hans Lutter Lopo. 2019. "Daily Patronage Politics: A Village Chief's Route to Power". *PCD Journal* Vol.VII. No. 2.
- Faishal, Muhammad. 2007. "Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia; Sebuah Pencarian Teoritik" *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 11 Nomor 1.
- Gaventa, John. 2006. "Finding The Spaces for Changes;A Power Analysis" *IDS (Institute of Development Studies)*. Volume 37 Number 6.
- Hafid, Abdul. 2013. "Belief System In Indigenous Community of Kajang In The Village of Tanah Towa. District Of Kajang. Regency Of Bulukumba" *Jurnal Patanjala* Vol. 5 No.1.
- Hanif, Hasrul. 2009. Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 12. No.3.
- Hasbullah. 2011. "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Symbol Agama dan Etnis dalam Pilkada." *Jurnal Ushuluddin*. Volume 17. No. 2.
- Hidayat, Endik. Budi Prasetyo. dan Setya Yuwana. 2018. "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri". *Jurnal Politik*. Vol 4. No. 1. Agustus 2018.
- Jawandri. 2013. "Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Naga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau." *eJournal Ilmu Pemerintahan*. No.1/Vol.1.
- L. Taylor. 2004. "Clientship and Citizenship in Latin America". *Bulletin o f Latin American Research*. Vol. 23. No. 2.
- Lande, C.H. 1993. "Political Clientelism in Political Studies: Ret- respect and Prospect". *International Political Science Review*. 4. 4.
- Landry, Pierre F.. et al.. 1994. "Election in Rural China: Competition Without Parties." *Jurnal Comparative Political Studies*. Vol. 43/ Issue 6, 2010.
- M. Rashiduzzaman. 2008. "Election on Politics in Pakistan Villages." *Journal of Commonwealth Political Studies*. Vol.4/ Issue 3.
- Muhammad, La Ode Elwan. 2019. "Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi. Kabupaten Maros. Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016)". *Jurnal Publicuho*. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Halu Oleo. Volume.1 No. 4.

- Muhtadi, Burhanudin. 2013. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara Party ID dan Patron-Klien." *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.10. No.1
- Muhtadi, Burhanudin. 2013. Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara "Party ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.10. No.1.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Dua Ratus Tahun Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Nilai Demokrasi Oleh Bangsa Indonesia". *Proceeding Semnas FISIP-UT*
- Olumuyiwa, Ayokunle Omobowale. 2008. "Clientelism and Social Structure: An Analysis of Patronage in Yoruba Social Thought". *Afrika Spectrum*. Vol. 43. No. 2. Hamburg: GIGA Institute of African Affairs.
- Decentralization. and Clientelism: New Relationships and Old Practices". *Latin American Perspectives*. Vol. 29. No. 5.
- Rian, Lesmana Andhika. 2017. "Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak". *Jurnal Kajian*. Vol. 22 No. 3.
- Rile, Clarissa Hayward. 1998. "*De- Facing Power*" *Journal Polity*. The University of Chicago Press Vol.1.
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". *The American Political Science Review*. Vol. 66. No. 1.
- Scott, James C. 1972. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia". *The Journal of Asian Studies* [Vol. 32. No. 1](#)
- Seymour, Martin Lipset. 1959. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review*. (53 (1).
- Taylor, L. 2004 "Clientship and Citizenship in Latin America". *Bulletin of Latin American Research*. Vol. 23. No. 2.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumika M Prijono. 1994. "Demokrasi dalam Masyarakat Tradisional Jawa" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XII Nomor 4. 1994.
- Tomsa, Dirk. 2014. Party System Fragmentation in Indonesia : The Subnational Dimension. *Journal of East Asian Studies* 14 No. 2.
- Wahyudi, Lutfi. Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Paradigma*. Vol.7 No.3 Desember 2018.
- Weinstock. D. M. 2006. "The Real World of (Global) Democracy". *Journal of Social Philosophy*. 37(1)
- Winters, Jeffrey A 2014.. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia." *Prisma*. Vol. 33 No. 1.

- Yani, Neneng Yuningsih dan Valina Singka Subekti. 2016. "Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? Studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013" *Jurnal Politik*. Vol. 1. No. 2.
- Zappala Gianni. 2010. "Clientelism, Political Culture and Ethnic Politics in Australia". *Australian Journal of Political Science*. Vol. 33. No. 3. 2010.

C. Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2019. <https://lombokbaratkab.bps.go.id/>
- Golput di Bulukumba. <http://fajar.co.id/read/103120/41/golput-di-bulukumba-110511-orang>.
- Heyes, Cressida. 2007. Identity Politics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. diakses dari Plato.Stanford.edu/entries/identity-politics.
<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/launching-pilkada-2020-bupati-semoga-partisipasi-pemilih-meningkat-90-persen>
<https://lombokbaratkab.go.id/sekda-taufiq-gandeng-forkopimda-tinjau-pilkades-serentak-di-kecamatan-lingsar/>
<https://radarselatan.fajar.co.id/ini-dia-64-desa-di-bulukumba-yang-akan-pilkades/>
- Kecamatan Lembar dalam Angka 2018. <https://lombokbaratkab.bps.go.id/>
- Lembaran Daerah Lombok Barat No 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Desa dan Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Lombok Barat. Lihat juga Kecamatan dan Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia <https://www.kemendagri.go.id/files/2019-05/Kode&Data%20Wilayah/52.ntb.fix.pdf>
- Parry, Geraint. 1969. Political Elites. London: George Allen and Unwin LTD.
- Pemerintah Desa Lingsar. <http://www.desalingsar.id/Sejarah/Detail>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Narmada. 2017. Profil SKPD Kecamatan Narmada
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Rencana Strategis 2017. (<http://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/RenstraKecamatanLembar2014-2019Review201701264402042018.pdf>)
- Thomas Koten. ed. (2017-09-27). "[Inilah Uniknya 2 Suku Konjo Sulawesi Selatan](#)". NetralNews.com.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Amirullah, kandidat kepala desa Jembatan Kembar Terpilih. Wawancara dilakukan di Dusun Batu rimpang utara. Desa

- Jambatan Kembar kec. Lembar kab. Lombok Barat. Sabtu 9 Mei 2020
- Wawancara dengan Ampo Upe (Tokoh Agama dan Pendukung Jusman). di Desa Karama. Kecamatan Rilau Ale. Kabupaten Bulukumba. Provinsi Sulawesi Selatan. tanggal 10 Mei 2020.
- Wawancar dengan Andi Ambo Upe. Tokoh Agama Desa Karama. Wawancara dilakukan di Dusun Lempongge. Desa Karama. Kec. Rilau Ale. Kab. Bulukumba pada Minggu. 10 Mei 2020.
- Wawancara dengan Darmawati. Kepala Desa Terpilih. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 10 Mei 2020. di Dusun Passimbungan. Desa Balibo. Kec. Kindang. Kab. Bulukumba.
- Wawancara dengan Calon Kepala Desa Batu Mekar terpilih. Juminah di Dusun Nyurbaye. Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat Sabtu 16 Mei 2020
- Wawancara dengan Calon Kepala Desa Buwun Sejati yang tidak terpilih Bambang Kurdi Sartono di Dusun Batu Asak. Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 12 Mei 2020
- Wawancara dengan H. Husain. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Balibo. Wawancara dilakukan pada hari Dusun Passimbungan. Desa Balibo. Kec. Kindang. Kab. Bulukumba pada 27 Mei 2020.
- Wawancara dengan Jusman (Kepala Desa Terpilih). Wawancara dilakukan Jalan Poros Sampeang. Dusun Buhung Luara. Desa Karama. Kec. Rilau Ale. Kab. Bulukumba Pada Minggu. 10 Mei 2020.
- Wawancara dengan Kepala Desa Buwun Sejati terpilih Muhidin di Dusun Pembuwun. Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 12 Mei 2020
- Wawancara dengan Kepala Desa Suranadi terpilih I Nyoman Adwisana di Dusun Karang anyar desa jambatan Kembar Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat 10 Mei 2020
- Wawancara. Pak Arep. Tokoh agama islam dan mantan Kades. di Desa Suranadi Kecamatan Narmada. Lombok Barat. Pada 23 Mei 2020.